



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2021**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Nomor : G/607/VL.02/HK/2021

160/2345/III.01/2021

Tanggal 10 November 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**
Alamat Kantor : Jalan R. W Monginsidi Nomor 69 Telukbetung
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung

2. a. Nama : **MINGRUM GUMAY**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Lampung

b. Nama : **ELLY WAHYUNI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

c. Nama : **RIRIN KUSWANTARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

d. Nama : **H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

e. Nama : **FAUZAN SIBRON**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Telukbetung, 10 November 2021

GUBERNUR LAMPUNG



100000
METRAI
TEMAPI
M00FAJKA33902107



ARINAL DJUNAIDI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



MINGRUM GUMAY
Ketua



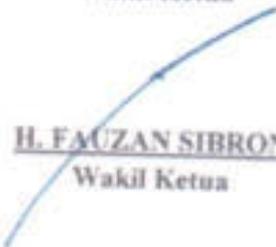
H. ELLY WAHYUNI
Wakil Ketua



H. RIRIN KUSWANTARI
Wakil Ketua



H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL
Wakil Ketua



H. FAUZAN SIBRON
Wakil Ketua

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Telukbetung, 10 November 2021

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
LAMPUNG



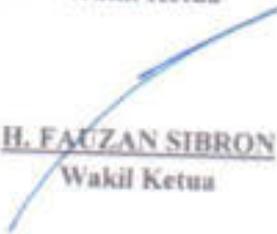
MINGRUM GUMAY
Ketua




H. ELLY WAHYUNI
Wakil Ketua


H. RIRIN KUSWANTARI
Wakil Ketua


H. RADEN MUHAMMAD ISMAIL
Wakil Ketua


H. FAUZAN SIBRON
Wakil Ketua

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
PROVINSI LAMPUNG TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
ATAS KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

TANGGAL 10 NOVEMBER 2021

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Tabikpun.....

Yth. Sdr.Gubernur Lampung

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Yth. Sdr. Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Para Staf Ahli Gubernur Lampung; Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; Kepala Dinas / Kakanwil / Badan serta Pimpinan Perguruan Tinggi se-Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN, BUMD Provinsi Lampung

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol dan Organisasi Masyarakat

Yth. Sdr. Tokoh - tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pimpinan Mass Media dan Para Wartawan

Yth. Bapak - ibu serta Hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat bertemu kembali menghadiri undangan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung

dalam rangka mendengarkan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang telah membawa kita menuju jalan yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Sdr. Gubernur Yth, Rekan – rekan Pimpinan DPRD & Anggota DewanYth., serta hadirin yang kami hormati.

Berkaitan dengan Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap :

1. Persetujuan Penyertaan Modal Barang Milik Daerah (BMD) Ex. Bank Bukopin Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
2. Persetujuan Pinjaman Jangka Panjang Daerah untuk Pembiayaan Pekerjaan Infrastruktur Jalan Prioritas Di Provinsi Lampung Kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
3. Penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Persetujuan atas Penyertaan Modal Provinsi Lampung berupa Barang Milik Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung yang telah disepakati Bersama pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rencana Penyertaan Modal Daerah berupa Barang Milik Daerah bernilai sebesar Rp.13.685.245.000,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. Penyertaan Modal Daerah Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah Sertifikat Hak Pakai No. 29 Tahun 1987 atas Nama Pemerintah Provinsi Lampung luas 1,224 m² dan 5 (lima) unit bangunan gedung ex-bank bukopin jalan wolter monginsidi teluk betung Bandar Lampung.
3. Penyertaan Modal diperuntukkan Pengembangan Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung; dan
4. Tidak diperkenankan Aset penyertaan Modal dimaksud dipindah tangankan kepada Pihak Lain.

Selanjutnya untuk Persetujuan atas Pinjaman Jangka Panjang Daerah yang telah disepakati Bersama pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

Rencana Besaran Pinjaman Daerah sebesar Rp.569.000.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Rupiah);

1. Jangka waktu pengembalian selama 5 (Lima) Tahun Anggaran (Pinjaman Jangka Panjang);
2. Ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur jalan prioritas Provinsi Lampung

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kiranya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung dapat menyetujui menjadi Keputusan DPRD Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan Yth.

Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Sdr. Gubernur Lampung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tanggal 3 Agustus 2021.

Penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan implementasi pelaksanaan amanat Undang - undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan lainnya; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta Asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Selain itu sejalan dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun 2022 bertujuan :

1. Menjaga kesinambungan antara tahapan – proses perencanaan pembangunan daerah dengan tahapan – proses penganggaran pembangunan daerah;

2. Menyampaikan uraian kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rancangan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaian.
3. Menjembatani pelaksanaan tugas fungsi Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sebagai acuan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

KUA dan PPAS Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 merupakan satu kesatuan dokumen penganggaran yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022. Secara operasional, penyusunan PPAS Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PPAS merupakan dokumen yang memuat skala prioritas pembangunan daerah, penentuan program untuk masing - masing urusan pemerintahan serta plafon anggaran sementara untuk masing - masing program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berikut target pencapaian kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah; termasuk di dalamnya alokasi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai dasar dalam penentuan skala prioritas dalam pembangunan Tahun Anggaran 2022;
2. Melakukan penataan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target dan sasaran pembangunan Tahun Anggaran 2022;

3. Menyusun kebijakan belanja yang terkait dengan dinamika permasalahan pembangunan yang perlu mendapat penanganan segera, yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional;
4. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sidang Paripurna Yth.

Proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA); dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan surat Gubernur Lampung Nomor : 900 / 2538 / VI.02 / 2021 tanggal 9 Juli 2021, perihal Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun 2022, untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung, dihasilkan kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap Asumsi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung pada Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 yang berjumlah 11 (sebelas) item; setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung disepakati, sebagai berikut :

1. Pada Pertumbuhan Ekonomi yang semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 4,3 – 5,3 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 3 - 4% setelah pembahasan menjadi 3,5 – 4 % diprediksikan Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Lampung akan berjalan dengan baik,

melihat kondisi **Covid – 19**, akan berangsur membaik dengan telah dilaksanakan Vaksinasi di Masyarakat Lampung.

2. Pada Inflasi di proyeksi KUA 2022 sebesar 2 – 4 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 $3,0 \pm 1$ % setelah pembahasan menjadi 2 – 4 %.
3. Pada PDRB per Kapita di proyeksi KUA 2022 sebesar 45 – 48 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 42 – 43 % setelah pembahasan menjadi 42 – 43 %.
4. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 4 – 4,7 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 4,4 – 4,3% setelah pembahasan menjadi 4,4 – 4,3 %.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung pada periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja 2021 di Provinsi Lampung sebanyak 4.494,95 ribu orang dan jumlah angkatan kerja Agustus 2021 sebanyak 4.494,95 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar : 4,67 % jumlah pengangguran sebanyak 209,57 ribu orang dan TPT Agustus 2021 sebesar 4,69 % jumlah pengangguran sebanyak 210,63 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah pengangguran dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja. Pada Target Makro KUA PPAS PPAS Provinsi Lampung Tahun 2022 ditargetkan 4 sampai dengan 4,7 %. Jumlah Pengangguran sebanyak 179.641 sampai dengan 211.079 orang. Kalau dibandingkan dengan Jumlah Pengangguran di tahun 2021 maka terget paling optimis akan terjadi penurunan Pengangguran pada tahun 2022 sekitar 30.988 orang. Upaya penurunan Jumlah Pengangguran di Provinsi Lampung dilakukan melalui program kegiatan pembangunan ekonomi baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UKM, Pariwisata serta program peningkatan daya saing tenaga kerja.

5. Pada Penduduk Miskin di proyeksi KUA 2022 sebesar 11,4 – 12,05 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 12,4 – 11,9 % setelah pembahasan menjadi 12,4 – 11,9 %.

6. Pada Indeks Gini di proyeksi KUA 2022 sebesar 0,31 – 0,33 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 0,308 – 0,324 % setelah pembahasan menjadi 0,308 - 324 %.
7. Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di proyeksi KUA 2022 sebesar 70 – 71,49 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 70 – 70,3% setelah pembahasan menjadi 70 – 70,3 %.
8. Pada Tingkat Kemantapan Jalan di proyeksi KUA 2022 sebesar 70 – 72,34 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 76 % setelah pembahasan menjadi 76 %.
9. Pada Nilai Tukar Petani semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 103 - 105 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 102 – 103 % setelah pembahasan menjadi 102 - 103 %.
10. Pada Pertumbuhan PAD semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 5,71 – 8,47 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 3,87 % setelah pembahasan menjadi 3,34 %. Pada potensi Pendapatan Daerah, akan bertambah dari Pajak Daerah PBBKB sebesar Rp. 10.000.000.000,- PAP Rp. 200.000.000,- Retribusi Daerah Rp. 957.595.248, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Rp. 230.759.438.668, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 112.767.736.084, Penambahan pada Pendapatan Transfer berasal dari Kabupaten / Kota (Bantuan Diklat Kabupaten) Rp. 2.136.381.000, Penambahan pada Hibah Program dari Pemerintah Pusat guna mendorong pengelolaan irigasi secara Integratif dan partisipatif, dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang mengedepankan kemajuan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan Petani Indonesia (IPDMIP) sebesar Rp. 5.354.233.800. Total Jumlah Penambahan PAD Rp. 362.175.384.800, tetapi Rp. 12.175.384.800 sifatnya mengikat sehingga tidak dapat dialokasikan Belanja bagi OPD lain, karena Penambahan tersebut, berasal dari Tata Kelola BLUD, yaitu : BLUD Labkes, BLUD RSJ, Bantuan Diklat Kabupaten dan Hibah IPDMIP. Sehingga Penambahan PAD sebesar Rp. 350.000.000.000 yang akan ditata di masing – masing Komisi DPRD Provinsi Lampung.

11. Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di proyeksi Target Makro PRPJMD Tahun 2022 6,915 % setelah pembahasan menjadi 6,915 %. Adalah Point yang baru yang merupakan tambahan Target Makro Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2022, dalam rangka mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menuangkannya dalam kegiatan OPD terkait setiap tahunnya. Di dalam dokumen RAD-GRK, ditetapkan empat (4) sektor dan beberapa OPD terkait yang menjadi prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut (Dinas Kehutanan), sektor pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura), sektor energi dan transportasi (Dinas ESDM; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan), serta sektor pengolahan limbah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Lingkungan Hidup). Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung akan berupaya untuk menurunkan emisi GRK sebesar 6,915%.

TABEL TARGET MAKRO PEMBANGUNAN KUA DAN PPAS 2022 DAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 - 2024

N0	URAIAN	Target Makro KUA DAN PPAS 2022	Target Makro PRPJMD Tahun 2022	Target Makro KUA PPAS Tahun 2022 Setelah Pembahasan Banang dengan TAPD
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,3 – 5,3	3 – 4	3,5 - 4
2.	Inflasi (%)	2 – 4	3,0 + 1	2 – 4
3.	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	45 – 48	42 – 43	42 – 43
4.	Tingkat PengangguranTerbuka (%)	4 – 4,7	4,4 – 4,3	4,4 – 4,3
5.	Penduduk Miskin (%)	11,4 – 12,05	12,4 – 11,9	12,4 – 11,9
6.	IPM	0,31 - 0,33	0,308 - 0,324	0,324 – 0,308
7.	Indeks Gini	70 – 71,49	70 – 70,3	70 – 70,3
8.	Tingkat Kemantapan Jalan	70 – 72,34	76	76
9.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 - 105	102 - 103	102 - 103
10	Pertumbuhan PAD (%)	5,71 – 8,47	3,87	3,34
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	6.915 %	6.915 %

Sidang Paripurna Yth.

Setelah melalui proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung, disepakati Rancangan KUA – PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

- I. **Pendapatan semula Rp 7.343.665.024.033 setelah pembahasan berubah menjadi Rp 6.558.085.742.933 berkurang sebesar Rp. 785.579.281.100.**

- II. **Belanja Daerah semula Rp 9.352.238.024.033 setelah pembahasan berubah menjadi Rp 7.001.699.025.933 berkurang sebesar Rp 2.340.538.998.100.**

- III. **Pembiayaan Daerah setelah pembahasan terjadi perubahan sebagai berikut :**
 1. **Penerimaan Pembiayaan Rp 2.199.753.000.000 setelah pembahasan berubah menjadi Rp. 644.793.283.000 berkurang sebesar Rp. 1.554.959.717.000.**

 2. **Pengeluaran Pembiayaan Rp 191.180.000.000 tidak terjadi perubahan.**

Setelah disepakati dalam rapat pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung Rencana target Pendapatan TA. 2022 dalam APBD Tahun Anggaran 2022 digambarkan pada struktur keuangan daerah sebagai berikut :

STRUKTUR PADA RANCANGAN KUA PPAS DAN BAPERDA APBD TA 2022 (09 NOV 2021)				
KODE REKENING	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS & APBD TA 2022	PEMBAHASAN BANANG	BERKURANG/ BERTAMBAH
A	B	D	F	H = F - D
4	PENDAPATAN DAERAH	7.343.655.024.033,00	6.558.085.742.933,00	- 785.579.281.100,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.093.154.391.718,00	3.447.849.161.718,00	354.694.770.000,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.668.659.165.839,00	2.678.859.165.839,00	10.200.000.000,00
a	Pajak Kendaraan Bermotor	905.000.000.000,00	905.000.000.000,00	-
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	624.000.000.000,00	624.000.000.000,00	-
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	560.000.000.000,00	576.000.000.000,00	10.900.000.000,00
d	Pajak Rokok	574.659.165.839,00	574.659.165.839,00	-
e	Pajak Air Permukaan	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	200.000.000,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.106.914.790,00	8.474.510.038,00	- 4.632.404.752,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.096.382.201,00	276.855.820.888,00	230.759.438.688,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	365.301.928.888,00	483.709.464.972,00	118.407.536.084,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.236.595.985.580,00	3.090.977.700.680,00	- 1.145.618.284.900,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.209.933.841.000,00	3.062.179.175.100,00	- 1.147.754.665.900,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	4.192.544.093.000,00	3.060.738.001.100,00	- 1.131.806.091.900,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum (DBH)	132.256.531.000,00	175.436.322.100,00	43.179.691.100,00
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum (DAU)	1.783.414.286.000,00	1.726.296.348.000,00	- 57.118.038.000,00
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus (DAK)	2.276.873.176.000,00	1.159.005.431.000,00	- 1.117.867.745.000,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	17.389.748.000,00	1.441.174.000,00	- 15.948.574.000,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	26.652.144.580,00	28.798.525.580,00	2.136.381.000,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Ferda Lainnya	26.652.144.580,00	28.798.525.580,00	2.136.381.000,00
4.2.2.4	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemkab/Pemkot	26.652.144.580,00	28.798.525.580,00	2.136.381.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.904.646.735,00	19.258.880.535,00	5.354.233.800,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.904.646.735,00	19.258.880.535,00	5.354.233.800,00
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	13.904.646.735,00	19.258.880.535,00	5.354.233.800,00
4.3.1.4.1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	13.904.646.735,00	19.258.880.535,00	5.354.233.800,00
5	BELANJA DAERAH	9.352.238.024.033,00	7.011.689.025.933,00	- 2.340.548.998.100,00
SELISIH PENDAPATAN DAN BELANJA		- 2.008.573.000.000,00	- 453.613.283.000,00	1.554.959.717.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.199.753.000.000,00	644.793.283.000,00	- 1.554.959.717.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59.000.000.000,00	75.793.283.000,00	16.793.283.000,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman	2.140.753.000.000,00	569.000.000.000,00	- 1.571.753.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	191.180.000.000,00	191.180.000.000,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
	Usulan Penyertaan Modal 5 BUMD Baru dan JVCo BHC	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	141.180.000.000,00	141.180.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	2.008.573.000.000,00	453.613.283.000,00	- 1.554.959.717.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SLPA)		0,00	0,00	0,00

Tabel : Pagu Anggaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022

STRUKTUR PADA RANCANGAN KUA PPAS DAN RAPERDA APBD TA 2022 (10 NOV 2021)				
KODE REKENING	URAIAN	UPDATE RANCANGAN KUA PPAS & APBD TA 2022	KESEPAKATAN KUA PPAS TA 2022	BERKURANG/ BERTAMBAH
A	B	E	F	M = F - E
4	PENDAPATAN DAERAH	6.195.910.358.133,00	6.558.085.742.933,00	362.175.384.800,00
5	BELANJA DAERAH	6.680.523.641.133,00	7.011.699.025.933,00	331.175.384.800,00
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.754.432.386.696,46	1.754.432.386.696,46	-
2	DINAS KESEHATAN	280.550.078.239,00	281.897.863.239,00	1.347.785.000,00
3	RUMAH SAKIT ABDEL MOELOEK	407.837.674.912,00	409.672.431.372,00	1.834.756.460,00
4	RUMAH SAKIT IRWA	38.260.369.409,00	38.762.597.949,00	1.502.228.540,00
5	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	955.778.950.000,00	1.127.278.950.000,00	171.500.000.000,00
6	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	115.687.424.940,00	135.687.424.940,00	20.000.000.000,00
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	101.095.242.500,00	152.616.182.500,00	51.520.940.000,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46.652.651.776,00	46.652.651.776,00	-
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.939.810.451,00	29.939.810.451,00	19.000.000.000,00
10	DINAS SOSIAL	37.204.872.953,00	38.004.872.953,00	800.000.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA	33.829.920.309,00	33.854.920.309,00	25.000.000,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.079.950.000,00	16.404.950.000,00	325.000.000,00
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.489.757.000,00	15.164.757.000,00	675.000.000,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.983.284.163,00	8.983.284.163,00	-
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA & TRANSMIGRASI	18.643.811.396,00	18.643.811.396,00	-
16	DINAS PERHUBUNGAN	21.599.003.300,00	22.099.003.300,00	500.000.000,00
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	38.753.961.507,48	39.553.961.507,48	800.000.000,00
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	17.860.921.000,00	18.110.921.000,00	1.250.000.000,00
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	18.929.198.524,00	18.929.198.524,00	-
20	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	54.462.501.520,00	74.342.501.520,00	19.880.000.000,00
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14.236.209.147,10	15.486.209.147,10	1.250.000.000,00
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.581.047.684,00	49.881.047.684,00	2.300.000.000,00
23	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMY KREATIF	21.297.020.033,00	21.822.020.033,00	525.000.000,00
24	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	78.796.872.393,00	81.248.177.393,00	2.511.305.000,00
25	DINAS PERKEBUNIAN	29.493.466.743,00	29.743.466.743,00	250.000.000,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	30.153.300.000,00	34.465.800.000,00	4.312.500.000,00
27	DINAS KEHUTANAN	76.034.396.070,00	79.284.396.070,00	3.250.000.000,00
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	20.687.670.000,00	20.687.670.000,00	-
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27.958.434.200,00	27.958.434.200,00	-
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.731.065.182,00	32.231.065.182,00	1.500.000.000,00
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH	1.507.508.029.908,01	1.482.065.683.208,01	-25.442.346.700,00
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	121.525.000.000,00	119.147.000.000,00	-2.378.000.000,00
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24.865.366.896,00	24.865.366.896,00	-
34	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	32.779.274.992,00	34.058.954.992,00	1.279.680.000,00
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11.998.517.834,00	12.098.517.834,00	100.000.000,00
36	BADAN PENGHUBUNG	18.062.432.951,00	20.562.432.951,00	2.500.000.000,00
37	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
38	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.078.654.200,00	49.445.190.700,00	6.366.536.500,00
39	BIRO HURUM	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
40	BIRO PEREKONOMIAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
41	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	3.500.000.000,00	3.960.000.000,00	460.000.000,00
42	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
43	BIRO ORGANISASI	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
44	BIRO UMUM	148.107.883.388,00	167.857.883.388,00	19.750.000.000,00
45	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	6.804.923.490,00	6.804.923.490,00	-
46	SEKRETARIAT DPRD	319.724.203.600,00	339.724.203.600,00	20.000.000.000,00
47	INSPEKTORAT PROVINSI	41.220.000.000,00	41.220.000.000,00	-
48	BADAN KESBANG DAN POLITIK	17.368.101.826,00	19.048.101.826,00	1.680.000.000,00
	SELISIH PENDAPATAN DAN BELANJA	- 484.613.283.000,00	- 453.613.283.000,00	31.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	675.793.283.000,00	644.793.283.000,00	-31.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.793.283.000,00	75.793.283.000,00	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman	600.000.000.000,00	569.000.000.000,00	-31.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	191.180.000.000,00	191.180.000.000,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
	Uraian Penyertaan Modal 5 BUMD Baru dan JVCo BHC	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	-
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	141.180.000.000,00	141.180.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	484.613.283.000,00	453.613.283.000,00	-31.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SLPA)	0,00	0,00	-

Sidang Paripurna Yth.

DPRD Provinsi Lampung, menegaskan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung, antara lain :

1. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Lampung :
 - a. Agar menjaga dan menata serta mengelola aset-aset Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi permasalahan dimasyarakat, seperti aset yang berada di Kota Baru, Sabah Balau dan Way Dadi dan lain – lain.
 - b. Dalam pelaksanaan Proses BLUD pada OPD yang terkait, agar menyampaikan dan berkomunikasi kepada DPRD Provinsi Lampung, sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aset yang ada di Way Dadi yang sedang dilakukan proses pelepasan kepada masyarakat untuk segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang saat ini sudah diproyeksikan dalam KUA PPAS APBD TA. 2022 agar dapat terealisasi sesuai dengan target pendapatan.
3. Terkait dengan program pemutihan PKB dan BBNKB di Provinsi Lampung pada masa pandemi saat ini, yang telah dilaksanakan ditahun 2021 kiranya dapat dilanjutkan, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat mengikuti Program Pemutihan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Penyampaian Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung kepada DPRD Provinsi Lampung agar tepat waktu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal Penyampaian Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung kepada DPRD Provinsi Lampung, agar penyajian data kepada DPRD Provinsi Lampung yang akan dibahas dipastikan sudah sesuai dengan kajian oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Lampung, sehingga Dokumen tersebut dapat dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sidang Paripurna Yth.

Demikianlah hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi acuan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung; demikian mohon maaf apabila ada hal – hal yang kurang berkenan pada semua pihak, selama Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung melaksanakan tugasnya.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 10 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
BADAN ANGGARAN**

KETUA,



MINGRUM GUMAY

Sekretaris Bukan Anggota



Hj. TINA MALINDA, S.Sos, MM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penyampaian dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam peraturan tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi Lampung).

Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan umum APBD baik kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal di tahun 2022. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian nasional dan daerah masih berada dalam situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang secara fundamental telah mengubah perkembangan dan tatanan sosial ekonomi secara nasional, khususnya Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi terus berjalan seiring dengan terus berubahnya episentrum pandemi. Memburuknya



kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 hingga kini menjadi pengingat penting bahwa pandemi belum berakhir dan pemulihan ekonomi masih rentan.

Krisis yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing, terutama melalui peningkatan Kualitas SDM, Pembangunan Infrastruktur, dan Reformasi Birokrasi yang mengarahkan pada Visi Pembangunan Lampung, yaitu **"Rakyat Lampung Berjaya"**.

Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 merupakan dokumen yang tersusun dari hasil kerjasama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Lampung dan Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Secara garis besar, dokumen ini mencakup kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi pencapaian. Sedangkan Rancangan PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan, dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun, dan menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Sebagai Penutup, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dalam penyusunan dokumen



Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan telah menyelesaikannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya kami mengharapkan diskusi dan pembahasan yang positif dan intensif dengan para Anggota DPRD Provinsi Lampung yang terhormat, untuk menyempurnakan Arah dan Strategi kebijakan ke depan. Pembahasan yang lebih intensif tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan dan gagasan, pemahaman yang lebih baik, serta perbaikan Perumusan Strategi Kebijakan Makro Ekonomi dan Fiskal yang lebih efektif, sehingga kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung dapat meningkat. Semoga kerja keras dan usaha-usaha kita bersama dapat memberikan hasil yang positif bagi Bangsa dan Negara, serta mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. DASAR HUKUM.....	4
D. OUTPUT KEGIATAN.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
A. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH	6
B. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI	34
C. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	35
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	39
A. ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM APBN T. A. 2022	39
B. ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM APBD T. A. 2022	52
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	80
A. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH	80
B. TARGET PENDAPATAN DAERAH	87



<i>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</i>	93
A. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH	93
B. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA	100
<i>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	105
A. UMUM	105
B. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	108
<i>BAB VII PENUTUP</i>	112



DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung TW I 2021 menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, persen.....	10
Tabel II-2	Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 menurut Pengeluaran (Tahun Dasar 2010, persen).....	13
Tabel II-3	Struktur PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku	14
Tabel II-4	Struktur PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 (y-o-y) Menurut Pengeluaran (persen)	15
Tabel II-5	Indeks Harga Konsumsi, Andil Maret 2021 (Deflasi), dan Tingkat Inflasi Tw I-2021 (yoy) Menurut Kelompok Pengeluaran (persen).....	19
Tabel II-6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2020.....	25
Tabel II-7	NTP Gabungan Provinsi Lampung Tahun 2010-2020....	28
Tabel II-8	Realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung 2016-2019.....	30
Tabel II-9	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Lampung 2016-2019.....	31
Tabel II-10	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah di Provinsi Lampung 2016-2019.....	32
Tabel III-1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Tahun 2021 dan 2022.....	40
Tabel III-2	Perkembangan APBN Tahun 2020 dan Tahun 2021....	43
Tabel III-3	Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari sisi Pengeluaran.....	46



Tabel III-4 Asumsi Ekonomi Makro Indonesia	
Tahun 2021-2022.....	50
Tabel III-5 Asumsi Ekonomi Makro Lampung Tahun 2022.....	75
Tabel IV-1 Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Sebelum dan	
Setelah Pandemi Covid 19 Provinsi Lampung.....	86
Tabel IV-2 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	
Tahun 2022.....	88
Tabel IV-3 Target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun	
2022.....	90
TABEL V-1 Rekaplan Plafon Belanja Sementara untuk Tahun	
Anggaran 2022.....	97
Tabel V-2 Alokasi Penganggaran Belanja Operasi Tahun 2022...	102
Tabel V-3 Alokasi Penganggaran Belanja Modal, Belanja Tidak	
Terduga, Dan Belanja Transfer Tahun 2022.....	104
Tabel VI-1 Rincian Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi	
Lampung Tahun 2022.....	106
Tabel VI-2 Total Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi	
Lampung 2022.....	108
Tabel VI-3 Total Alokasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi	
Lampung 2022.....	109
Tabel VI-4 Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi	
Lampung 2022.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2010-2020.....	11
Gambar II-2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, pada Tw I 2021 terhadap Tw I 2020 dan Tw 4 2020.....	12
Gambar II-3	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera pada Tw I 2021 YOY.....	16
Gambar II-4	Laju Inflasi Provinsi Lampung Tiap Bulan Januari 2018- Maret 2021.....	18
Gambar II-5	PDRB Per Kapita Provinsi Lampung ADHB.....	20
Gambar II-6	Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung dan Nasional.....	22
Gambar II-7	Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung Di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan.....	22
Gambar II-8	Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung 2015-2020.....	23
Gambar II-9	Indeks Gini Provinsi Lampung Maret 2016– Maret 2020.....	26
Gambar II-10	Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2017– September 2020.....	27
Gambar II-11	NTP Gabungan Provinsi Lampung Tahun 2018-2020	28
Gambar II-12	Distribusi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan.....	33
Gambar II-13	Distribusi Belanja Daerah Berdasarkan Sumber Anggaran.....	33
Gambar II-14	Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021.....	36



Gambar II-15 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022.....	37
Gambar III-1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Tahun 2021 dan 2022.....	42
Gambar III-2 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Kementerian Keuangan RI, 2021.....	45
Gambar III-3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2020.....	56
Gambar III-4 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2011-2020.....	56
Gambar III-5 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2020.....	57
Gambar III-6 Rasio Inflasi Provinsi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2011-2020.....	58
Gambar III-7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Nasional Tahun 2012-2020.....	59
Gambar III-8 Rasio Tingkat Penduduk Miskin Provinsi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2011-2020.....	60
Gambar III-9 Perbandingan IPM Lampung dan IPM Nasional Tahun 2010-2020.....	60
Gambar III-10 Rasio IPM Lampung Terhadap IPM Nasional Tahun 2010-2020.....	61
Gambar III-11 Perbandingan Pertumbuhan Indeks Gini Ratio Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020..	62
Gambar III-12 Rasio Perbandingan Indeks Gini Ratio Provinsi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2016-2020.....	63
Gambar III-13 Perkembangan NTP Nasional dan NTP Lampung Tahun 2015-2020.....	63
Gambar III-14 Rasio NTP Lampung Terhadap NTP Nasional Tahun 2015-2020.....	64



Gambar III-15 Bagan Alir Penentuan Hasil Prediksi Makro Ekonomi.....	65
Gambar III-16 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 – 2020.....	66
Gambar III-17 Prediksi Pergerakan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 – 2020.....	67
Gambar III-18 Prediksi Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010-2020.....	68
Gambar III-19 Prediksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010-2020.....	69
Gambar III-20 Prediksi Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2021- 2022, Berbasis Data Tahun 2010 – 2020.....	70
Gambar III-21 Prediksi IPM Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 – 2020.....	71
Gambar III-22 Prediksi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2014 – 2019.....	72
Gambar III-23 Prediksi Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 – 2020.....	73
Gambar III-24 Prediksi Pertumbuhan PAD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 – 2020.....	74
Gambar IV-1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Lampung.....	82
Gambar IV-2 Rasio Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap PDRB.....	83



Gambar IV-3 Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Lampung.....	84
Gambar V-1 Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2017- Tahun 2022 (Prediksi).....	99
Gambar VI-1 Laju Pertumbuhan dan prediksi pertumbuhan Pembiayaan Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022.....	107



BAB I ***PENDAHULUAN***

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan kesejahteraan inilah yang menjadi tujuan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah.



Pengalaman memperlihatkan bahwa ada salah satu syarat yang diperlukan untuk menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan daerah. Syarat tersebut dimulai dari mantapnya pemahaman pemerintah setempat terkait makna indikator-indikator dan variabel-variabel pembangunan serta pengertian kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kedua kebijakan tersebut harus saling melengkapi untuk berjalan ke arah yang sama.

Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan akan mengakibatkan semakin terarahnya penyelenggaraan pembangunan (termasuk di dalamnya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian) dan semakin tingginya respon masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dengan berupaya berkontribusi mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah setempat sebagai pengambil keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyusunan dokumen yang berisikan seluruh informasi penting mengenai indikator-indikator pembangunan ekonomi Provinsi Lampung sangat diperlukan sebagai pijakan awal untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bagi Daerah Provinsi Lampung. Indikator-indikator yang dimaksud dihimpun menjadi satu kesatuan ke dalam sebuah laporan. Indikator ini diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung. Penyusunan indikator ini terdiri dari data histori pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung di masa lalu yang akan digunakan untuk memproyeksikan kondisi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung di masa mendatang.

Indikator Makro Ekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makro ekonomi sangat



luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Walaupun dalam kesempatan ini penekanan pemanfaatan indikator ini bukan pada prediksi tetapi deskripsi terhadap kondisi Provinsi Lampung saat ini.

Pemanfaatan Indikator Makro Ekonomi lainnya adalah untuk mengetahui arah pembangunan di Provinsi Lampung. Arah pembangunan ini dapat terlihat dari hasil analisis terhadap indikator-indikator yang ada. Harapan akhirnya apabila indikator ini digunakan sebagai dasar kebijakan akan menghasilkan kebijakan umum, khususnya Kebijakan Umum Anggaran Daerah Provinsi Lampung yang lebih mewakili kondisi senyatanya pada masa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya kajian Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung ini adalah:

- a) Untuk menjaga kesinambungan antara tahapan- proses perencanaan pembangunan daerah dengan tahapan-proses penganggaran pembangunan daerah;
- b) Untuk menyampaikan uraian kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan rancangan perubahan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian;
- c) Untuk menjembatani pelaksanaan tugas fungsi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Sebagai acuan dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022



C. DASAR HUKUM

Penyusunan Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung ini berpedoman kepada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi



Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung tahun 2005-2025;
- 14) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Propinsi Lampung;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024;
- 16) Peraturan Gubernur Lampung tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Lampung tahun 2022

D. OUTPUT KEGIATAN

Output pekerjaan ini adalah database dan informasi yang akurat dan terkini mengenai Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi Lampung Tahun 2022, yang meliputi:

- 1) Kondisi Ekonomi Makro Daerah
- 2) Asumsi penyusunan APBD
- 3) Kebijakan Pendapatan Daerah
- 4) Kebijakan Belanja Daerah
- 5) Kebijakan Pembiayaan daerah
- 6) Strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (P.Todaro, 2000). Di samping itu, menurut Todaro (2000), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi beriringan dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi secara berkesinambungan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Istilah "proses" berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan (Kuznet, 1995). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam Indeks berantai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut :

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \cdot 100\%$$

Keterangan :

PE = Pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t

$PDRB(t-1)$ = Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)



Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu Perkembangan indikator makro ekonomi. Perkembangan indikator makro ekonomi daerah khususnya di Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia dan nasional. Pertumbuhan ekonomi dunia dan nasional saat ini sejak awal tahun 2020 hingga saat ini mengalami kontraksi terutama diakibatkan oleh efek pandemi Covid 19. Di Indonesia, dampak akibat pandemi Covid 19 mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -2,07 % (BPS, 2020). Kondisi demikian juga berdampak pada perkembangan indikator ekonomi makro daerah Lampung di tahun 2020 yang juga mengalami kontraksi hingga -1,67 % (BPS, 2020).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut prediksi Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, dimana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020 secara *quartile to quartile* (Q to Q). IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021 dan 6% pada tahun 2022. Proyeksi tersebut ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global (sumber bisnis.com, 8 Januari 2021). Pertumbuhan ekonomi ini akan mempengaruhi perkembangan indikator ekonomi provinsi lampung yang dapat diuraikan berikut ini.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (BPS, 2020).

Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan (Badan Pusat Statistik, 2021), yaitu:



a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha/sector, yaitu, 1. Pertanian; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7. Pengangkutan dan Komunikasi; 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha). Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama.



Dari ketiga pendekatan tersebut, BPS mempublikasi data PDRB berdasarkan pendekatan produksi dan pengeluaran yang dapat dilihat pada Tabel II-1 dan Tabel II-2.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 (Tabel II-1) dibandingkan dengan triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,10 persen (y-on-y), melemah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,74 persen. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -14,49 persen; Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami kontraksi pertumbuhan -13,19 persen; dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi pertumbuhan -12,68 persen (Berita Resmi Statistik, Triwulan I Tahun 2021).

Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 8,15 persen, diikuti Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 5,54 persen. Selain itu, Lapangan Usaha Pengadaan Air juga tumbuh positif sebesar 4,36 persen. Secara umum Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung TW I 2021 menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Tabel II-1



Tabel II-1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung TW I 2021 menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, persen

Lapangan Usaha	Triw I-2021 Terhadap Triw IV-2020 (q-to-q)	Triw I-2021 Terhadap Triw I-2020 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2021 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,31	-1,73	-0,49
B Pertambangan dan Penggalian	0,91	-6,05	-0,35
C Industri Pengolahan	-7,58	0,02	0,00
D Pengadaan Listrik, Gas	-4,13	-13,19	-0,02
E Pengadaan Air	-0,15	4,36	0,00
F Konstruksi	0,02	5,54	0,54
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,02	-5,93	-0,74
H Transportasi dan Pergudangan	-2,04	-14,49	-0,79
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,54	-12,68	-0,20
J Informasi dan Komunikasi	-0,10	8,15	0,41
K Jasa Keuangan	-3,76	1,46	0,03
L Real Estate	-0,04	-6,27	-0,20
M,N Jasa Perusahaan	-2,35	-7,46	-0,01
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,43	-5,35	-0,17
P Jasa Pendidikan	-0,07	-1,61	-0,05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,41	2,90	0,03
R,S,T,U Jasa lainnya	0,07	-10,21	-0,10
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,04	-2,10	-2,10

Sumber : Berita Resmi Statistik, Triwulan I Tahun 2021

Sedangkan jika dilihat dalam sepuluh tahun terakhir, Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Lampung sejak Tahun 2014 hingga Tahun 2019 cenderung mengalami laju pertumbuhan yang positif dan terus meningkat dari 5,08% hingga ke 5,26%. Namun demikian, Pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini sejak awal tahun 2020 mengalami kontraksi terutama diakibatkan oleh efek pandemi Covid 19. Di Provinsi Lampung, dampak pandemi Covid 19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,67 %. Laju pertumbuhan ini dapat dilihat pada Gambar II-1 berikut.



Gambar II-1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2010-2020

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Jika ditinjau dari sisi Pengeluaran (Tabel II-2), pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 (y-on-y) sebesar 2,10 persen. Komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami kontraksi sebesar -3,89 persen. Kontraksi yang ditandai dengan angka pertumbuhan negatif disebabkan beberapa faktor antara lain: pandemi COVID-19 berakibat pada menurunnya aktifitas produksi sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat, Himbauan *stay at home*, pelarangan mudik lebaran dan pengurangan aktivitas jasa angkutan penumpang berpengaruh pada penurunan konsumsi jasa transportasi dan pembelian BBM untuk kendaraan, dan Kebijakan *physical distancing* berpengaruh pada menurunnya konsumsi rekreasi dan budaya.



Gambar II-2

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung, pada Tw I 2021 terhadap Tw I 2020 dan Tw 4 2020



Sumber : Berita Resmi Statistik, Triwulan I Tahun 2021

Komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 persen yang disebabkan oleh terbatasnya kegiatan organisasi sosial dan keagamaan akibat pembatasan kegiatan berkumpul (*physical distancing*) dan penundaan penyelenggaraan Pilkada serentak. Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berkontraksi sebesar -3,66 persen yang disebabkan oleh realisasi belanja pegawai mengalami penurunan akibat perubahan kebijakan pemberian THR, Kontraksi belanja barang (operasional dan non operasional), belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dan Peningkatan belanja bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial (penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai BNPT/kartu sembako, dan PKH).

Komponen Laju Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,22 persen yang disebabkan oleh realisasi belanja modal pemerintah baik bangunan maupun non bangunan belum optimal, Kontraksi pada kegiatan sektor konstruksi dan Penurunan volume dan nilai impor barang modal. Komponen Ekspor barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 12,6 persen.



Tabel II-2

**Pertumbuhan PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 menurut
Pengeluaran (Tahun Dasar 2010, persen)**

Komponen	Triw I-2021 Terhadap Triw IV-2020 (q-to-q)	Triw I-2021 Terhadap Triw I-2020 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2021 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	0,03	-3,89	-2,42
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,18	0,28	0,00
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-48,13	-3,66	-0,20
4 PMTB	0,07	1,22	0,40
5 Perubahan Inventori	-	-	-
6 Ekspor Barang dan Jasa	-6,55	12,60	4,97
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-18,60	11,62	4,85
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,04	-2,10	-2,10

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, Triwulan I Tahun 2021

Struktur perekonomian Provinsi Lampung yang dicerminkan dari data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,15 persen); diikuti Industri Pengolahan (19,32 persen); serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,43 persen). Sementara itu penyumbang terendah dalam Struktur PDRB Provinsi Lampung Hingga Triwulan I Tahun 2021 adalah Sektor Pengadaan Air Bersih (0,11%), Sektor Jasa Perusahaan (0,15%) dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Struktur PDRB Provinsi Lampung hingga Triwulan I tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II-3



Tabel II-3

**Struktur PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 menurut
Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku**

Lapangan Usaha	Tahun 2020	Tahun 2020		Triw I-2021
		Triw I	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,90	29,70	25,61	29,15
B Pertambangan dan Penggalian	5,06	5,18	5,20	5,79
C Industri Pengolahan	19,41	18,86	21,71	19,32
D Pengadaan Listrik, Gas	0,16	0,16	0,15	0,14
E Pengadaan Air	0,11	0,10	0,12	0,11
F Konstruksi	9,35	9,23	10,30	10,04
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,85	11,10	11,48
H Transportasi dan Pergudangan	5,01	5,36	5,02	4,71
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,56	1,68	1,56	1,49
J Informasi dan Komunikasi	4,31	4,04	4,57	4,27
K Jasa Keuangan	2,18	2,16	2,39	2,24
L Real Estate	2,99	3,11	3,08	2,95
M,N Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,14
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	3,62	3,42	3,78	3,27
P Jasa Pendidikan	3,08	3,01	3,13	3,00
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	0,99	1,19	1,05
R,S,T,U Jasa lainnya	0,91	0,99	0,95	0,91
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, Triwulan I Tahun 2021

Jika ditinjau dari Struktur PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 (y-o-y) Menurut Pengeluaran, kontribusi bagi struktur ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2021 masih tetap didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 63,76 persen, kemudian komponen Impor Barang dan Jasa sebesar 49,26 persen diikuti Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 43,13 persen, dan Komponen PMTB sebesar 34,02 persen. Sedangkan untuk kontribusi terkecil disumbangkan oleh komponen Perubahan Inventori sebesar 0,84 persen. Adapun Struktur PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 (y-o-y) Menurut Pengeluaran secara detail dapat dilihat pada Tabel II-4



Tabel II-4

**Struktur PDRB Provinsi Lampung Tw I-2021 (y-o-y) Menurut
Pengeluaran (persen)**

Komponen	2020	2020		Triw I-2021
		Triw I	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	62,28	63,62	65,38	63,76
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,89	1,67	1,83	1,73
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,29	5,86	11,93	5,78
4 PMTB	32,85	32,36	35,03	34,02
5 Perubahan Inventori	0,53	0,53	0,48	0,64
6 Ekspor Barang dan Jasa	40,59	37,52	47,39	41,13
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	46,24	41,56	62,04	49,26
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS, Triwulan I Tahun 2021

2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Terhadap Sumatera dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.

Berdasarkan Berita Statistik tahun 2021 (BPS, 2021) sebagian besar provinsi di Indonesia pada triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan dibandingkan triwulan yang sama tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan terdalam



terjadi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar -5,16 persen, diikuti Pulau Kalimantan sebesar -2,23 persen. Kontraksi pertumbuhan terendah terjadi di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa masing-masing sebesar -0,86 persen dan -0,83 persen. Sementara itu, pertumbuhan positif terjadi di Pulau Maluku dan Papua sebesar 8,97 persen dan Pulau Sulawesi sebesar 1,20 persen. Struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 58,70 persen diikuti Pulau Sumatra sebesar 21,53 persen dan pulau-pulau lainnya masing-masing di kisaran 2-8 persen.

Di Pulau Sumatra, sebagian besar provinsi mengalami kontraksi. Provinsi Lampung mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam se-Sumatra sebesar -2,10 persen setelah Provinsi Aceh yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,95 persen. Sementara itu, dua provinsi lain menunjukkan pertumbuhan positif yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Riau yang tumbuh sebesar 0,97 persen dan 0,41 persen (Gambar II-3).

Gambar II-3

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera pada Tw I 2021 YOY



Sumber : Berita Resmi Statistik, Triwulan I Tahun 2021



3. Inflasi dan Deflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*), kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya (Auriga,2020).

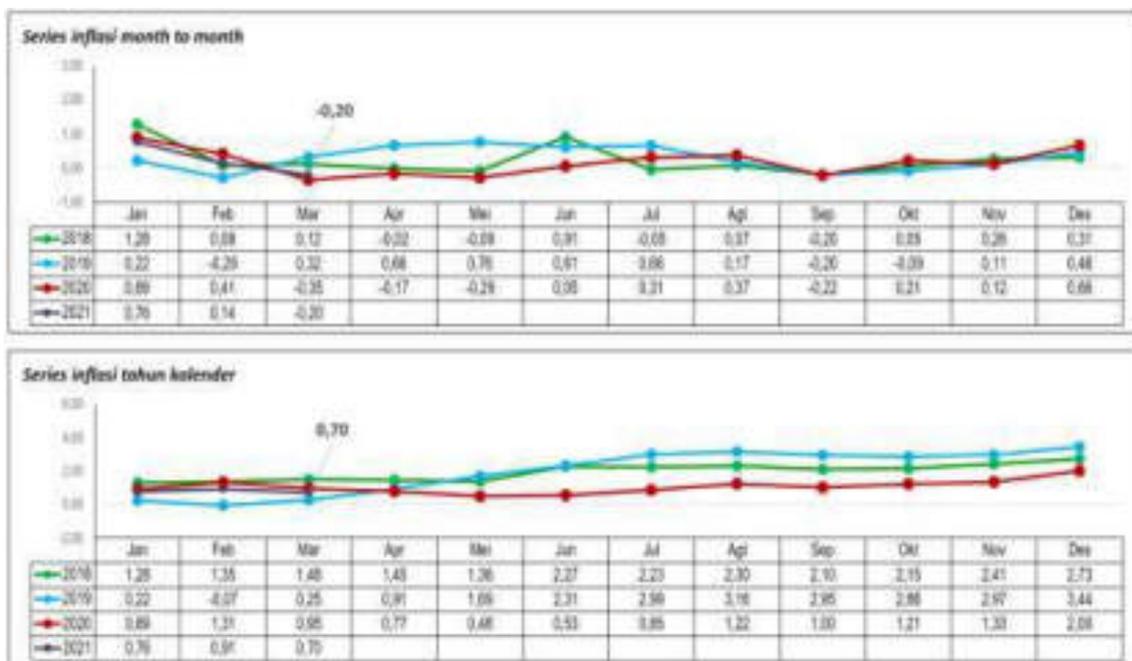
Sementara itu, instilah dari kebalikan Inflasi adalah Deflasi. Pengertian deflasi merujuk pada istilah perekonomian di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dalam OJK Pedia, deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia (*deflation*). Arti deflasi sendiri secara sederhana yakni ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Idris, 2021).

Inflasi dan deflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah Indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya, Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI), adalah Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen, serta beberapa pengukuran Indeks lainnya, seperti:

- ❖ Indeks biaya hidup atau cost-of-living index.
- ❖ Indeks harga produsen (IHP) adalah Indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- ❖ Indeks harga komoditas adalah Indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- ❖ Indeks harga barang-barang modal
- ❖ *Deflator* PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.



Laju inflasi di Provinsi Lampung pada triwulan I-2021 terpantau cukup terkendali. Perkembangan harga berbagai komoditi di dua kota pemantauan pada Maret 2021, secara umum mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan harga di dua kota, pada bulan Maret terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,32 pada bulan Februari 2021 menjadi 107,11 pada Maret 2021 atau mengalami deflasi sebesar 0,20 persen. Laju inflasi triwulan pertama tahun 2021 sebesar 0,70 persen dan inflasi *year on year* adalah sebesar 1,75 persen. Data perkembangan Inflasi bulanan dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar II-4.



Gambar II-4

Laju Inflasi Provinsi Lampung Tiap Bulan Januari 2018- Maret 2021

Adapun sepuluh komoditi yang memberikan andil deflasi terbesar selama bulan Maret 2021 adalah beras sebesar 0,16 persen; mobil 0,14 persen; cabai merah 0,08 persen; cabai rawit 0,05 persen; makanan ringan/snack 0,03 persen; telur ayam ras 0,03 persen; kangkung 0,02 persen; bayam 0,01 persen; emas perhiasan 0,01 persen; dan petai 0,01 persen.



Maret 2021, kelompok transportasi memberikan andil dalam pembentukan deflasi sebesar 0,13 persen; diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,12 persen. Sebaliknya, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,01 persen. Sementara, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tidak memberikan andil dalam pembentukan inflasi maupun deflasi. Tabel perkembangan Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi dapat dilihat pada Tabel II-5.

Tabel II-5
Indeks Harga Konsumsi, Andil Maret 2021 (Deflasi), dan Tingkat Inflasi
Tw I-2021 (yoy) Menurut Kelompok Pengeluaran (persen)

Kelompok Pengeluaran	IHK Provinsi Lampung				Andil Maret 2021	Inflasi Maret 2021 *)	Inflasi Tahun Kalender Maret 2021 **)	Inflasi Yoy Maret 2021 ***)
	Maret 2020	Desember 2020	Februari 2021	Maret 2021				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum	105,26	106,36	107,32	107,11	-0,20	-0,20	0,70	1,75
Makanan, Minuman dan Tembakau	107,66	108,87	111,67	111,20	-0,12	-0,42	2,14	3,29
Pakaian dan Alas Kaki	103,47	103,56	103,73	103,73	0,00	0,00	0,16	0,25
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar Lainnya	100,79	100,70	100,69	100,93	0,04	0,24	0,22	0,14
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	105,96	107,30	107,30	107,53	0,01	0,20	0,21	1,48
Kesehatan	107,28	109,01	109,67	109,55	0,00	-0,11	0,50	2,12
Transportasi	104,33	105,61	106,07	105,04	-0,13	-0,97	-0,54	0,68
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,24	97,35	96,74	96,76	0,00	0,03	-0,61	-2,49
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	105,44	107,94	108,03	108,03	0,00	0,00	0,08	2,46
Pendidikan	111,29	113,91	115,46	115,46	0,00	0,00	1,36	1,74
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	108,44	111,09	111,16	111,16	0,00	0,00	0,07	2,51
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,20	109,38	109,99	109,99	0,00	0,00	0,56	3,57

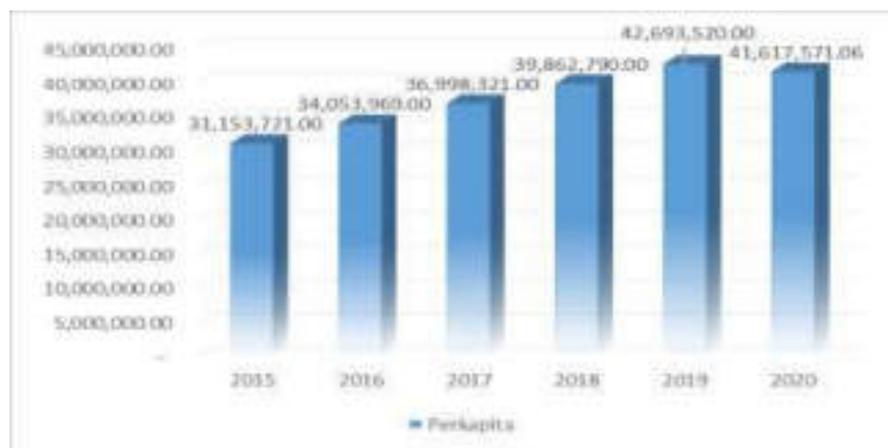
Sumber : BPS Lampung, 2021



4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu kriteria pengukuran kemajuan suatu Negara, karena besarnya pendapatan perkapita menjadi indikasi perekonomian masyarakat di suatu Negara. Pengukuran Pendapatan perkapita dapat diperoleh dari Pendapatan Nasional total dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu Negara (Boediono, 2008).

Nilai PDRB per kapita digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan secara umum. PDRB per kapita menunjukkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa pada periode tertentu. Semakin tinggi rata-rata PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya.



Gambar II-5 PDRB Per Kapita Provinsi Lampung ADHB

Jika dilihat dari data pendapatan perkapita selama periode sebelum pandemik Covid 19, Pendapatan Perkapita di Provinsi Lampung mengalami peningkatan positif. Namun demikian, sejak ada Pandemi Covid 19 pada tahun 2020, pendapatan perkapita masyarakat Provinsi Lampung saat ini mengalami penurunan dari Rp 42.693.520 di tahun 2019, menjadi Rp 41.617.571 di tahun 2020 (Gambar II-5), sebagai akibat karena pendapatan menurun tidak proporsional dengan pertumbuhan penduduk.



5. Pengangguran Terbuka

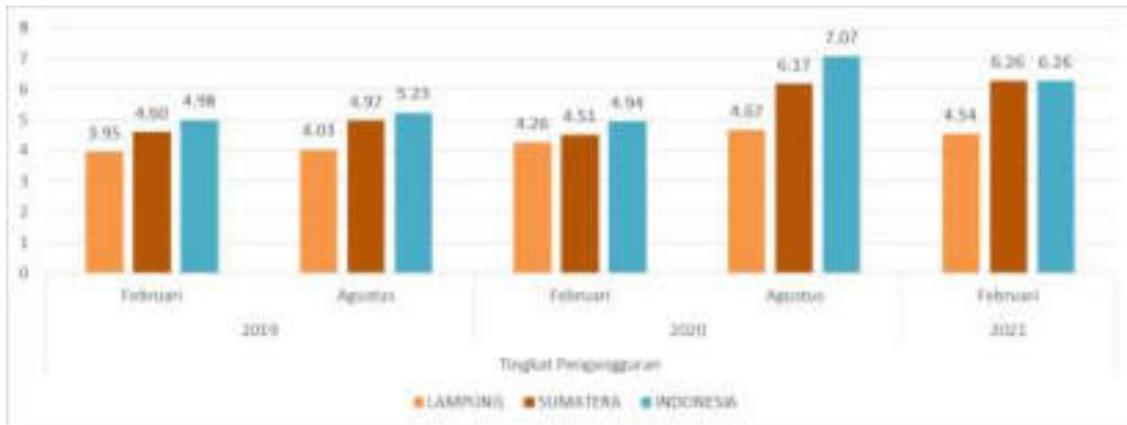
Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki keinginan untuk bekerja, berpendidikan, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Pengangguran terbuka merupakan tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis bisa dibilang cukup banyak karena memang belum memperoleh pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal (Pratama,2020).

Menurut BPS Tahun 2020 Klasifikasi orang yang disebut sebagai Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

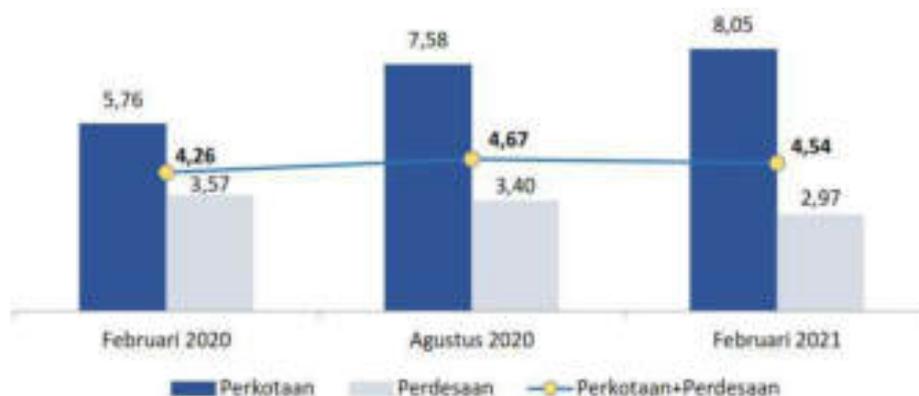
Sedangkan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Angka pengangguran terbuka di Provinsi Lampung mengalami kenaikan pada Februari 2020 (4,28 persen) dibandingkan periode Februari 2019 (3,96 persen), dan pada Februari 2021 cenderung meningkat (4,54%). Jika dibanding dengan angka pengangguran Nasional, angka pengangguran Lampung ini masih di bawah angka pengangguran nasional yang tercatat sebesar 4,99 persen (Gambar II-6).



Gambar II-6
Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung dan Nasional

Berdasarkan wilayah (Gambar. II-6), dilihat dari daerah tempat tinggalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Februari 2020, TPT di perkotaan sebesar 5,76 persen, sedangkan TPT pada wilayah perdesaan sebesar 3,57 persen. Dibandingkan Februari 2021, TPT wilayah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 2,29 persen, sedangkan wilayah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,60 persen.



Gambar II-7
Tingkat Pengangguran Provinsi Lampung Di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

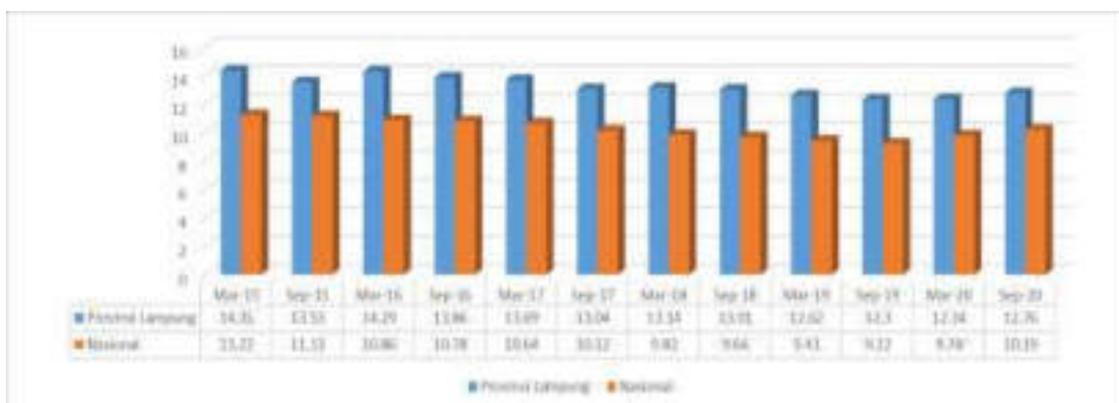


6. Kemiskinan

Menurut BPS, Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Angka penduduk miskin Provinsi Lampung Pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,05 juta orang (12,34 persen), naik sebesar 7,84 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 1,04 juta orang (12,30 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 adalah sebesar 9,02 persen atau naik 0,42 poin dibandingkan September 2019 yang sebesar 8,60 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 13,83 persen atau mengalami penurunan 0,13 poin jika dibandingkan September 2019 yang sebesar 13,96 persen seperti pada Gambar II-8.

Gambar II-8
Persentase Penduduk Miskin Indonesia dan Lampung
2015-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah (2021)



7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Menurut Badan Pusat Statistik, IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

- a. Umur panjang dan hidup sehat
- b. Pengetahuan
- c. Standar hidup layak

Selama periode tahun 2015 s.d. 2019 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66,95 pada tahun 2015 menjadi 69,57 di tahun 2019, dan sebesar 69,69 pada tahun 2020 dengan jumlah pertumbuhan IPM 0,17 jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Tabel II-6). Namun demikian, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional. Untuk memacu ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung secara konsisten terus melanjutkan program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi penduduk sebagai prioritas pembangunan.

Peningkatan IPM Provinsi Lampung juga tercermin dari pencapaian IPM pada level Kabupaten/Kota. Selama periode 2018 hingga 2020, IPM se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan (Tabel II-6). Pada periode 2020, tercatat tiga kabupaten yang mengalami kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Pesisir Barat 1,32 persen, Kabupaten Lampung Pesawaran 1,20 persen dan Kabupaten Lampung Barat sebesar 1,14 persen. Kemajuan pembangunan manusia di tiga kabupaten tersebut lebih dikarenakan perbaikan dimensi standar hidup layak. Sementara itu tercatat tiga Kabupaten/Kota yang mengalami pembangunan manusia paling lambat selama periode 2018-2020, yaitu Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,43 persen, Kabupaten Tengah sebesar 0,44 persen, dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,43 persen. (Komparasi Lampung – Sumatera – nasional)



Tabel II-6

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung Menurut
Kabupaten/Kota, 2018-2020**

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia			Pertumbuhan 2019-2020
	2018	2019	2020	
Lampung Barat	66,74	67,50	67,80	0,44%
Tanggamus	65,67	66,37	66,42	0,08%
Lampung Selatan	67,68	68,22	68,36	0,21%
Lampung Timur	69,04	69,34	69,37	0,04%
Lampung Tengah	69,73	70,04	70,16	0,17%
Lampung Utara	67,17	67,63	67,67	0,06%
Way Kanan	66,63	67,19	67,44	0,37%
Tulang Bawang	67,70	68,23	68,52	0,43%
Pesawaran	64,97	65,75	65,79	0,06%
Pringsewu	69,42	69,97	70,30	0,47%
Mesuji	62,88	63,52	63,63	0,17%
Tulang Bawang Barat	65,30	65,93	65,97	0,06%
Pesisir Barat	62,96	63,79	63,91	0,19%
Bandar Lampung	76,63	77,33	77,44	0,14%
Metro	76,22	76,77	77,19	0,55%
Provinsi Lampung	69,02	69,57	69,69	0,17%
Sumatera	71,18	71,79	71,8	0,01%
Nasional	71,39	71,92	71,94	0,03%

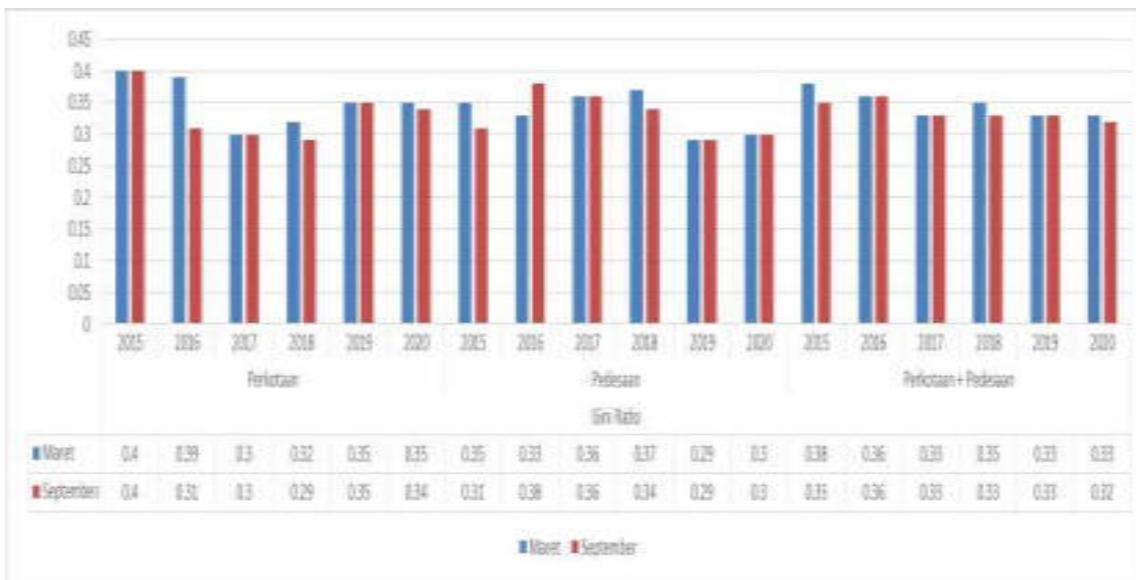
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2020

8. Indeks Gini

Ukuran Indeks gini (Gini Ratio), digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antarkelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai Indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

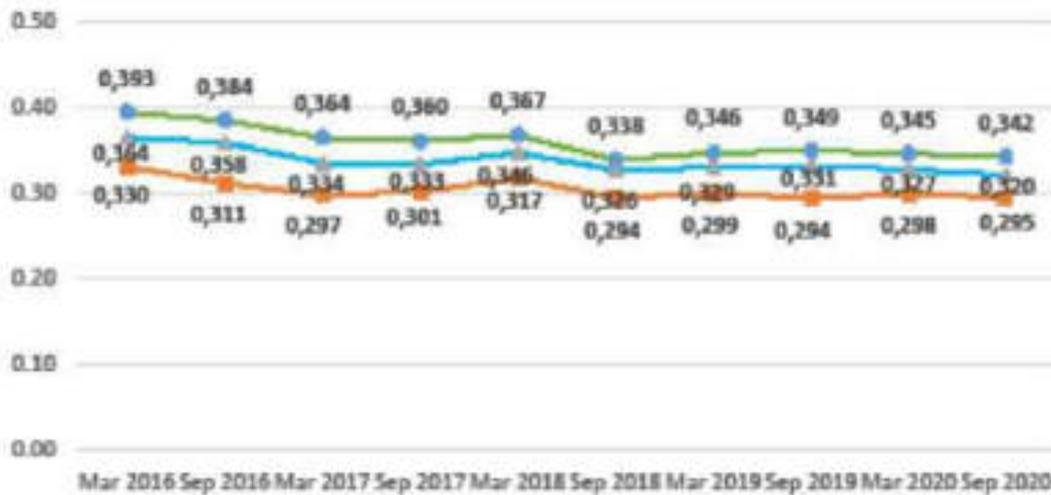


(Kuncoro, 2015) Berdasarkan Gambar dibawah, secara semesteran Indeks gini Lampung mengalami fluktuasi. Mesti mengalami fluktuasi, Indeks gini Lampung sepanjang periode pengamatan menunjukkan tingkat ketimpangan yang masih rendah (kurang dari 0,4). Membandingkan dengan nilai Indeks gini Nasional. Indeks Gini Provinsi Lampung pada Maret 2020 sebesar 0,327 masih berada di bawah nilai Indeks gini secara Nasional yang tercatat sebesar 0,381. (BPS, 2021).



Gambar II-9
Indeks Gini Provinsi Lampung Maret 2016– Maret 2020

Meskipun tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, kesenjangan pendapatan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: peningkatan kriminalitas atau konflik sosial. Oleh karenanya, upaya melakukan redistribusi pendapatan antar kelompok pendapatan akan tetap menjadi fokus perhatian, sehingga mampu mendorong redistribusi perekonomian daerah.



Gambar II-10

**Indeks Gini Provinsi Lampung dan Indonesia
Maret 2017– September 2020**

Sumber : BPS Provinsi Lampung, diolah

Gambar II-10 menunjukkan bahwa Indeks Gini Provinsi Lampung cenderung stabil berkisar antara 0,32 – 0,33. Namun, Indeks Gini Provinsi Lampung pada September 2020 menurun pada level Indeks sebesar 0,320.

9. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani, yang merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Nilai Tukar Petani jika bernilai 100 maka ini berarti impas, sedangkan jika bernilai lebih dari 100 berarti pendapatan petani lebih besar dari pengeluaran dan jika bernilai kurang dari 100 berarti pendapatan petani lebih kecil dari pengeluaran (BPS, 2020). Perkembangan nilai tukar petani (NTP) Provinsi Lampung rata-rata s/d TW II 2020 mencapai 91,83 dari target sebesar 107. Kalau kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 (y-o-y) maka NTP pada Bulan Juni 2020 ini turun sebesar 10,14 poin, walaupun jika ditinjau dari bulan Januari ke Bulan Juni

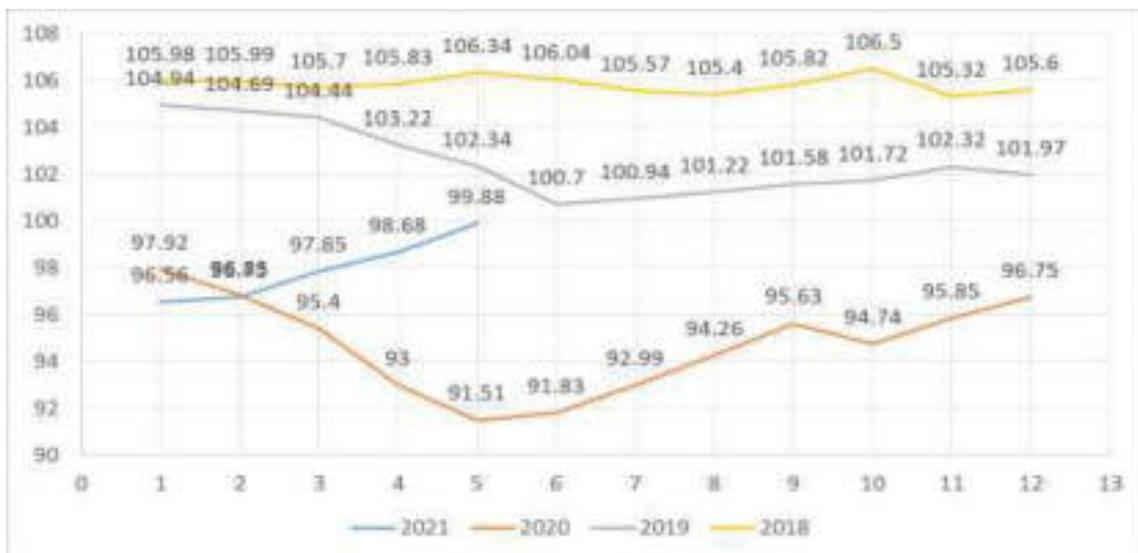


2021 cenderung menunjukkan peningkatan menjadi 99,88 di bulan Mei 2021 (Gambar II-11).

Tabel II-7 NTP Gabungan Provinsi Lampung Tahun 2010-2020

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2021	96.56	96.75	97.85	98.68	99.88							
2020	97.92	96.83	95.4	93	91.51	91.83	92.99	94.26	95.63	94.74	95.85	96.75
2019	104.94	104.69	104.44	103.22	102.34	100.7	100.94	101.22	101.58	101.72	102.32	101.97
2018	105.98	105.99	105.7	105.83	106.34	106.04	105.57	105.4	105.82	106.5	105.32	105.6
2017	104.96	104.19	103.82	103.82	104.09	104.18	103.57	105.45	105.97	106.62	107.1	107.35
2016	103.68	103.6	102.73	103.54	104.13	104.59	104.25	104.54	103.34	103.46	103.86	105.12
2015	103.2	103.2	102.3	101.43	102.16	102.42	103.41	103.7	104.21	104.09	104.04	103.84
2014	102.3	102.29	102.31	103.61	103.47	103.99	104.84	105.94	106.53	106.95	105.13	103.16
2013	124.77	124.37	123.64	124.29	124.29	125.35	124.88	124.39	124.84	124.64	124.27	125.43
2012	124.58	124.69	124.34	124.92	125.06	125.25	125.55	125.82	126.34	126.23	126.11	126.04
2011	117.29	117.62	118.24	119.24	121.49	122.67	123.51	123.37	123.7	123.67	123.24	123.74
2010	111.8	112.04	112.37	112.75	113.7	115.45	115.21	115.91	117.03	118.31	117.82	118.1

Oleh karenanya perlu upaya ekstra untuk mengungkit nilai NTP dimasa mendatang baik berkaitan dengan sektor Tanaman Pangan, Holtikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, Perikanan Tangkap maupun Perikanan Budidaya.



Gambar II-11

NTP Gabungan Provinsi Lampung Tahun 2018-2020

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Juni 2020



10. Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan pemerintah daerah Provinsi Lampung bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja daerah (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.



Tabel II-8

Realisasi Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung 2016-2019

No	URAIAN	REALISASI				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN	5.588.722.511.301,34	6.813.755.099.492,40	7.137.049.975.851,00	7,266,993,438,827.88	7.019.319.471.883,36
1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.368.796.251.247,34	2.750.596.478.331,40	2.902.313.507.327,46	3,018,067,291,159.88	2.842.286.479.070,36
1.1.1	Pajak Daerah	2.051.836.519.458,22	2.451.408.220.072,00	2.577.739.717.944,23	2,627,888,230,394.00	2.386.345.268.304,00
1.1.2	Retribusi Daerah	7.184.465.984,00	7.322.619.001,00	7.801.377.392,00	11,069,477,866.00	17.080.208.104,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	26.696.866.021,45	27.522.159.554,80	27.771.046.310,18	27,837,905,348.92	29.873.630.623,14
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	283.078.399.783,67	264.343.479.703,60	289.001.365.681,05	351,271,677,550.96	408.987.372.039,22
1.2	Dana Perimbangan	3.158.712.900.538,00	2.643.744.659.461,00	4.207.157.804.891,00	2,627,195,349,110.00	2.461.886.209.957,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	145.745.610.056,00	144.778.671.118,00	126.119.301.793,00	87.416.096.820,00	123.204.760.040,00
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	39.730.387.355,00	104.561.372.263,00	89.921.761.457,00	51.128.238.596,00	34.589.203.086,00
1.2.3	DAU	1.321.679.032.000,00	1.851.595.354.000,00	1.854.701.094.160,00	1,906,780,297,000.00	1.732.551.921.000,00
1.2.4	DAK	1.651.557.871.127,00	542.809.262.080,00	449.744.110.044,00	581.870.716.694,00	571.540.325.831,00
1.2.5	DAK Non Fisik	-	-	1.686.671.537.437,00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	61.213.359.516,00	1.419.413.871.700,00	27.578.663.633,00	1.621.730.798.558,00	1.715.146.782.856,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.426.215.516,00	10.374.402.200,00	11.858.698.341,00	11.362.590.000,00	8.946.876.858,00
1.3.2	Dana Penyesuaian	40.671.144.000,00	7.500.000.000,00	-	26,756,363,000.00	46.434.098.000,00
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.116.000.000,00	1.401.539.469.500,00	15.719.965.292,00	17.746.958.783,00	-
1.3.4	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	1.659.765.807.998,00

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2021



PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022



Tabel II-9
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah di Provinsi Lampung 2016-2019

No	URAIAN	REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.337.212.484.344,00	3.993.213.131.367,19	4.345.688.270.387,53	4.601.397.972.205,73	4.551.254.974.689,94
1	Belanja Pegawai	743.620.265.318,00	1.579.565.384.733,00	1.660.859.828.142,00	1.761.589.035.076,00	1.731.078.969.141,00
2	Belanja Bunga			1.784.056.321,00	33.382.304.468,00	31.583.615.813,00
3	Belanja Subsidi			1.852.030.960,00	926.015.480,00	-
2	Belanja Hibah	1.450.803.387.985,00	1.288.548.794.355,83	1.466.423.924.696,31	1.329.394.600.511,00	1.437.518.594.295,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.587.280.000,00	4.509.000.000,00	529.560.000,00	1.030.000.000,00	352.400.000,00
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten//Kota dan Pemerintah Desa	1.089.846.007.459,00	1.018.147.805.682,36	1.128.477.614.768,22	1.459.179.743.870,73	1.231.408.694.144,94
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten//Kota dan Pemerintah Desa	46.368.543.582,00	81.576.898.096,00	81.983.574.200,00	15.896.272.800,00	-
7	Belanja Tidak Terduga	3.987.000.000,00	20.865.248.500,00	3.777.681.300,00	-	119.312.701.296,00
2	BELANJA LANGSUNG	2.139.709.111.310,51	2.955.624.935.770,50	3.193.300.695.732,50	2.457.315.916.818,68	2.416.103.473.492,69
1	Belanja Pegawai	95.685.683.120,00	136.911.774.410,00	154.147.095.721,00	166.083.743.332,00	240.233.396.093,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.038.243.623.007,51	1.367.228.488.664,86	1.309.826.167.166,66	1.277.194.649.465,29	1.423.341.867.179,80
3	Belanja Modal	1.005.779.805.183,00	1.451.484.672.695,64	1.729.327.432.844,84	1.014.037.524.021,39	752.528.210.219,89
BELANJA DAERAH		5.476.921.595.654,51	6.948.838.067.137,69	7.538.988.966.120,03	7.058.713.889.024,41	6.967.358.448.182,63



Tabel II-10
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah di Provinsi Lampung 2016-2019

No	URAIAN	REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	102.511.594.856,67	204.312.510.503,50	534.042.206.308,21	213.991.004.690,84	336.132.388.142,31
	1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	102.511.594.856,67	204.312.510.503,50	54.158.268.808,21	93.875.534.190,84	336.132.388.142,31
	Penerimaan Pinjaman Daerah			479.883.937.500,00	120.115.470.500,00	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	160.000.000,00	86.138.166.352,00	197.176.332.704,00
	1 Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	160.000.000,00	15.550.000.000,00	56.000.000.000,00
	2 Pembayaran Pokok Utang				70.588.166.352,00	141.176.332.704,00
	PEMBIAYAAN NETTO	92.511.594.856,67	189.312.510.503,50	533.882.206.308,21	127.852.838.338,84	138.956.055.438,31

Sumber : BPKAD Provinsi Lampung, 2021



penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,37 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dari 2,86 trilyun menjadi 3,02 trilyun rupiah. Namun, pada tahun 2020 PAD Provinsi Lampung menurun (Tabel II-8).

B. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Penetapan indikator kinerja daerah pada dokumen RKPD bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada tahun masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk keperluan ini, diperlukan pengukuran ataupun evaluasi atas target yang telah terpasang dan mengevaluasinya, sehingga bisa diprediksikan apakah target tersebut akan dapat dicapai di akhir tahun, dengan syarat ada penambahan sumberdaya ataupun tidak akan tercapai karena suatu kondisi sehingga diperlukan perubahan asumsi sebagaimana telah tercantum dalam dokumen perencanaan Tahunan (RKPD). Ada kalanya juga dalam perjalanan pelaksanaan RKPD (APBD), terdapat perubahan kondisi yang menyebabkan asumsi Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah terprediksi dalam dokumen perencanaan, mengalami penyesuaian, dan terkoreksi di tengah jalan. Asumsi Kebijakan Keuangan ini bisa meliputi pendapatan, belanja ataupun kebijakan pemerintah yang harus dijalankan oleh Pemerintah.

Perubahan asumsi inilah yang kemudian berakibat pada penyesuaian volume kegiatan, pagu anggaran kegiatan maupun munculnya beberapa kegiatan baru dalam upaya menjalankan amanat kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk mengukur sejauhmana Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) berjalan sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran serta urgensi tingkat prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.



C. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Berkaitan dengan Penanganan Kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga sangat didukung oleh DPRD, Forkopimda, Lembaga masyarakat lintas agama, Perguruan Tinggi, serta partisipasi mandiri dari berbagai elemen masyarakat dan dunia usaha.

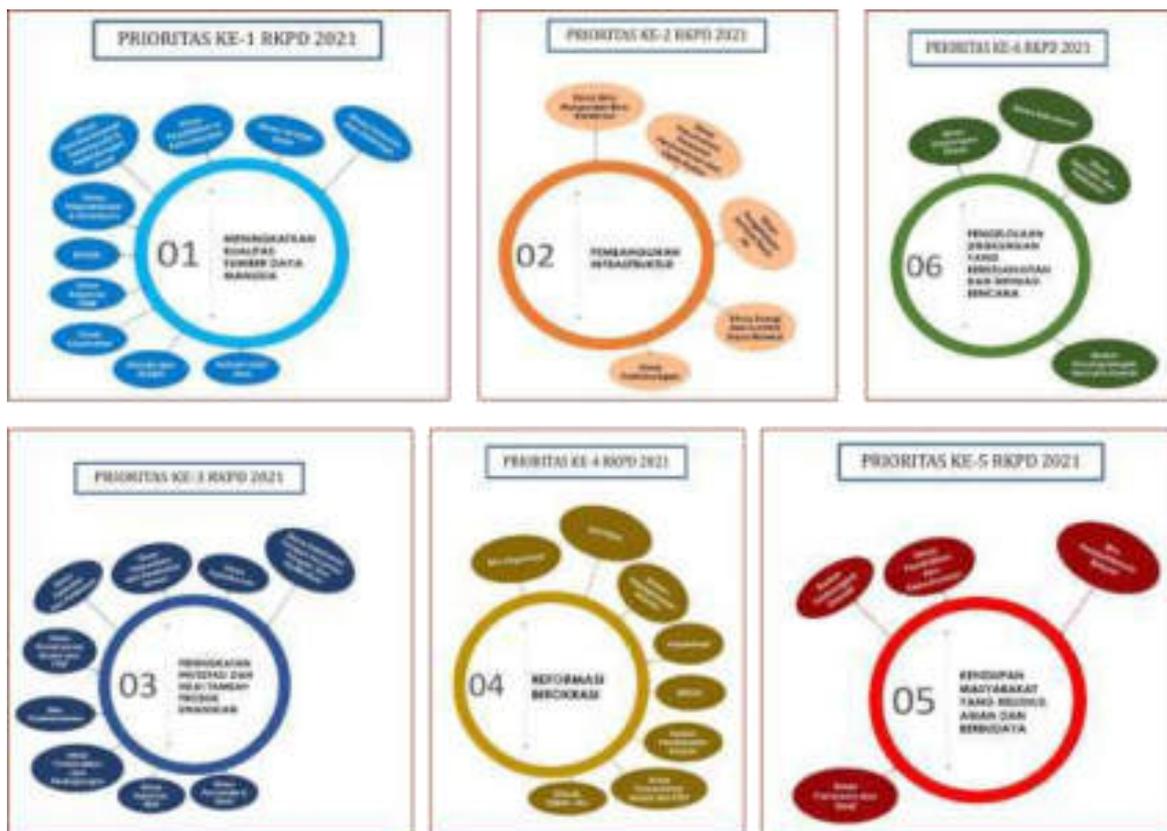
Kebijakan penanganan Covid 19 memerlukan penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, upaya surveilans, kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi dan produksi dengan normal. Serta, Terus mengkampanyekan dan berdisiplin protokol kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) dan 3 T (*Testing, Tracing, dan Treatment*), Mensukseskan program vaksinasi Covid-19, Penurunan prevalensi gizi buruk/ stunting.

Berkaitan dengan peningkatan SDM Berkualitas, masih terdapat ketimpangan kualitas SDM di antaranya di daerah Kabupaten, yaitu nilai IPM komposit rata-rata lama sekolah yang masih di bawah 8 tahun, sehingga perlu diakselerasi dengan program Kejar Paket Belajar.

Kemudian pentingnya melakukan sinergi pembangunan antar daerah. Pencapaian sasaran pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan dapat menjadi perekat bersama antar jenjang pemerintahan untuk bersinergi, melalui sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan konvergensi dari kebijakan, penguatan kelembagaan, penganggaran, penetapan mata program dan kegiatan, hingga penempatan lokasi.



Sejalan dengan hal tersebut, dalam RKPD Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 yang bertajuk : “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Menuju Lampung Berjaya. Adapun prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung tahun 2021, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

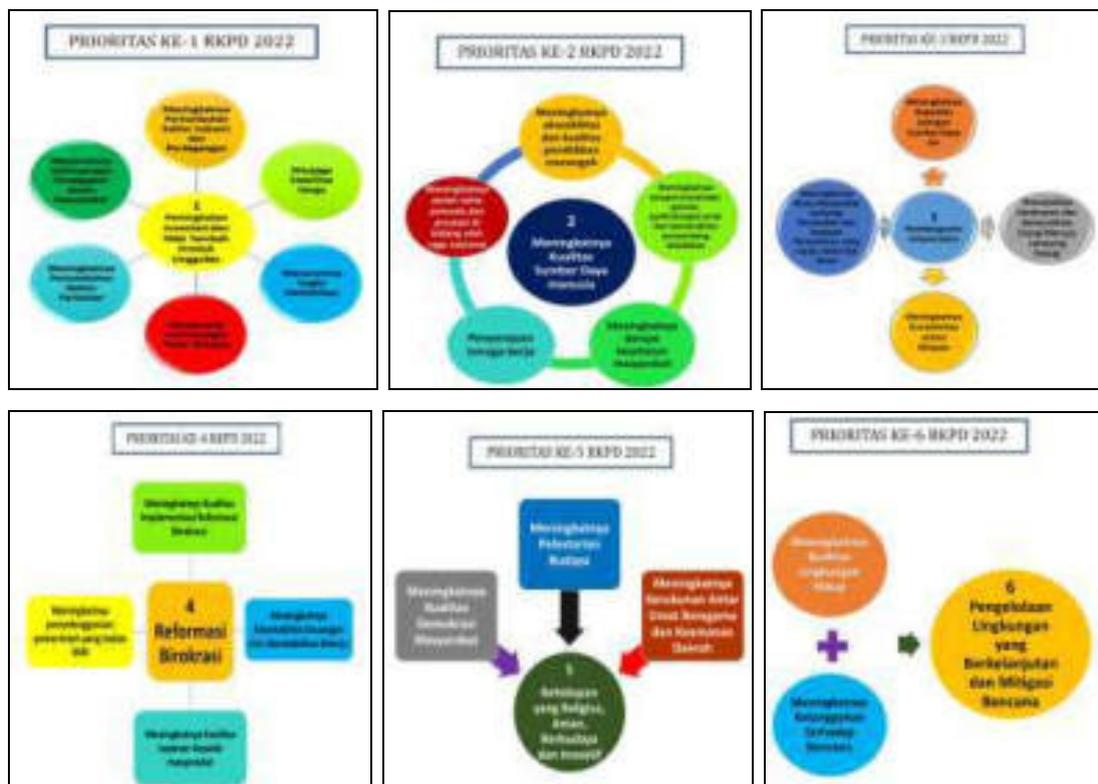


Gambar II-14 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021

Kemudian dalam rangka pembangunan yang berjalan secara berkesinambungan, maka untuk melanjutkan target pembangunan ditahun 2021, maka Arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Provinsi Lampung pada Tahun 2022 sebagai tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022, yaitu **Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas**. Arah kebijakan pembangunan daerah terkait dengan Pemulihan Ekonomi, Penguatan



ketahanan pangan daerah, Peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan kepada koperasi, kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis padat karya, Pengaktifan kembali roda bisnis secara berangsur, seraya memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Hal ini tertuang dalam RKP Tahun 2022, dengan prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung tahun 2022, sebagai berikut :



Gambar II-15 Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022

Tanpa adanya sinergi lintas bidang, maka pembangunan akan berjalan tanpa koordinasi. Konsekuensi adalah, keluaran (*output*) dan capaian (*outcome*) pembangunan daerah tidak akan maksimal, bahkan manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) positif dari pembangunan tersebut kurang atau tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.



Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan ke depan, dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, maka pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Lampung memiliki rencana beberapa program/kegiatan. Antara lain:

1. Pembangunan jembatan pancang sepanjang 9 (sembilan) km yang menghubungkan Pelabuhan Panjang dengan Kawasan Wisata Teluk Pandan,
2. Pembangunan *shortcut* jalur kereta api Tegineneng-Tarahan sepanjang 42 km.
3. Pembangunan Sport Center di Kawasan Kota Baru,
4. Pembangunan Fasilitas Kesehatan berstandar Internasional di kawasan Aero City, Bandara Radin Inten II,
5. Pembangunan Food Estate di Kabupaten Way Kanan dan Mesuji.
6. Pembangunan Kereta Api cepat Palembang-Bakauheni di ruas Tol Trans Sumatera *Highways*,
7. Pembangunan Kawasan terintegrasi Pariwisata Bakauheni Harbour City (BHC);
8. Pembangunan Jalan Strategis RE Martadinata--Simpang Teluk Kiluan.

Selain pembangunan infrastruktur strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melaksanakan beberapa program inovasi daerah yang juga memerlukan dukungan pemerintah kabupaten/Kota dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi daerah, antara lain Implementasi Program Kartu Petani Berjaya, *Smart Village*, *Smart School*. Hal ini dalam rangka Memantapkan SDM Berkualitas dan Perekonomian yang Berdaya Saing, dengan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM APBN T. A. 2022

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 meliputi pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk dilakukan analisis agar menghasilkan *output* dan rekomendasi yang tepat. Oleh karena itu, asumsi dasar sangat diperlukan yang digunakan dalam APBD T. A. 2022.

1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Nasional Tahun 2021 dan 2022

Pandemi Covid-19 tetap menjadi tantangan utama dan sekaligus dapat diperhatikan sebagai acuan untuk menciptakan prospek ekonomi nasional utama sebagai pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pemerintah diharapkan mampu bisa memanfaatkan pandemi untuk melakukan reformasi struktural dengan baik. Ini bisa dilihat dari masyarakat dan pemerintah yang menunggu kabar baik dari vaksin dan keyakinan bahwa vaksin bisa kembali memulihkan semuanya. IMF memperkirakan Ekonomi Global akan tumbuh 6% pada 2021 dan 4,4% pada tahun 2022. Sedangkan World Bank Tahun 2021 sebesar 4,0 dan 2022 sebesar 3,8. Sementara, OECD Tahun 2021 memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Global sebesar 5,6 % dan Tahun 2022 sebesar 4,0%. Proyeksi tersebut ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19 serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global.



Sementara itu, menurut IMF WEO memperkirakan Kondisi Pertumbuhan Ekonomi ASEAN di 2022 masih dalam arah peningkatan ke tingkat 6,1 persen dari proyeksi 4,9 persen di tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2022 akan didukung oleh keberlanjutan reformasi struktural ekonomi nasional yang mengarah pada pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Sama Hal nya dengan Negara lain, pemulihan ekonomi ini tentu sangat bergantung pada penanganan potensi Gelombang kedua Pandemi Covid 19, pada tahun 2021.

Tabel III-1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara
Tahun 2021 dan 2022

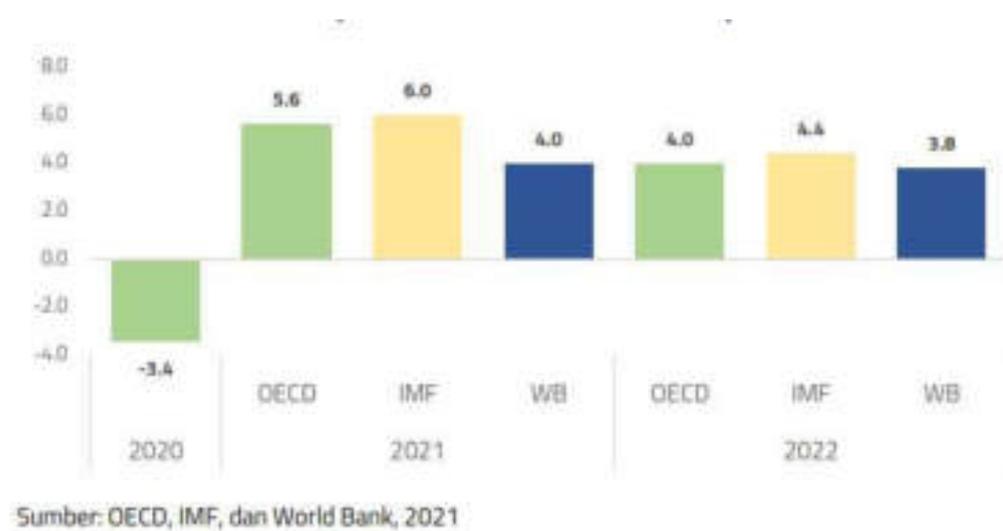
Negara	2020	2021F		2022F	
		Jan-21	Apr-21	Jan-21	Apr-21
Negara Maju	-4.7	4.3	5.1	3.1	3.6
AS	-3.5	5.1	6.4	2.5	3.5
Zona Eropa	-6.6	4.2	4.4	3.6	3.8
Jerman	-4.9	3.5	3.6	3.1	3.4
Perancis	-8.2	5.5	5.8	4.1	4.2
Inggris	-9.9	4.5	5.3	5.0	5.1
Jepang	-4.8	3.1	3.3	2.4	2.5
Korea	-1.0	3.1	3.6	2.9	2.8
Negara Berkembang	-2.2	6.3	6.7	5.0	5.0
Tiongkok	2.3	8.1	8.4	5.6	5.6
India	-8.0	11.5	12.5	6.8	6.9
Indonesia	-2.1	4.8	4.3	6.0	5.8
Brazil	-4.1	3.6	3.7	2.6	2.6
Rusia	-3.1	3.0	3.8	3.9	3.8
Arab Saudi	-4.1	2.6	2.9	4.0	4.0
AfSel	-7.0	2.8	3.1	1.4	2.0
ASEAN-5	-3.4	5.2	4.9	6.0	6.1
Indonesia	-2.1	4.8	4.3	6.0	5.8
Malaysia	-5.6	7.0	6.5	6.0	6.0
Singapura	-5.4	5.0*	5.2	2.6*	3.2
Thailand	-6.1	2.7	2.6	4.6	5.6
Filipina	-9.5	6.6	6.9	6.5	6.5
Vietnam	2.9	6.7*	6.5	7.4*	7.2

*Proyeksi WEO Okt 2020; Sumber: IMF WEO, April 2021



Dengan demikian, kunci untuk peningkatan prospek ekonomi nasional pada tahun 2021 dan 2022 sangat ditentukan oleh penanganan kesehatan. Pemerintah diharapkan dapat lebih serius menangani kesehatan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Jika mampu menangani permasalahan kesehatan pada tahun tersebut, maka diharapkan proses pemulihan ekonomi berjalan normal.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 masih akan dibayang-bayangi oleh dampak pandemi Covid-19. Namun, sebagian orang yakin turbulensi akan berakhir karena harapan besar vaksin Covid-19 sebagai *game changer* yang utama. Beberapa lembaga keuangan dunia dan domestik telah mengeluarkan prediksi ekonomi di 2021. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai proyeksi ekonomi Indonesia dalam zona positif, di mana ekonomi mulai mengalami rebound pada semester kedua 2020. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6% pada 2021 dan 44% pada tahun 2022. Proyeksi tersebut ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin Covid-19, serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global. Untuk mengamankan momentum pemulihan yang sedang terjadi, dukungan kebijakan yang memadai sangat penting. Bauran kebijakan ekonomi makro yang akomodatif diharapkan tetap jalan di 2021.



Gambar III-1
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara
Tahun 2021 dan 2022

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di zona positif menyusul proyeksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik di level 7,4% di sepanjang 2021. Pandangan itu berpijak pada peluncuran vaksin yang efektif pada kuartal I-2021 di negara-negara besar, negara-negara berkembang, dan negara-negara kecil. Berdasarkan hasil analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional mulai menunjukkan angka positif. Salah satu faktornya adalah proses vaksinasi yang mulai berjalan. Ekonomi Indonesia pada Maret-April 2021 diproyeksikan tumbuh dalam rentang antara 4,5%-5,5%. Begitu pula pada Mei-Juni 2021, ekonomi diprediksi bertahan di level 4,5%-5,5%.

APBN 2021, dengan jelas menunjukkan bahwa pendapatan akan meningkat dari Rp 1.699 Triliun (2020) menjadi Rp 1.743,6 Triliun (2021), begitu juga belanja yang mengalami peningkatan dari Rp 2.739,2 Triliun (2020) menjadi 2.750,0 Triliun (2021). Perkembangan dari rencana vaksinasi dan pemberlakuan dari protokol kesehatan yang diharapkan akan menghambat penularan dari virus, terutama di ruang



publik, secara bertahap diprediksikan akan berpengaruh terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial.

Tabel III-2 Perkembangan APBN Tahun 2020 dan Tahun 2021

APBN	2020	2021
PENDAPATAN NEGARA	1.699,9	1.743,6
Penerimaan Pajak	1.404,5	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,1	298,2
Hibah	1,3	0,9
BELANJA NEGARA	2.739,2	2.750,0
Belanja Pemerintah Pusat	1.975,2	1.954,5
Transfer ke Daerah & Dana Desa	763,9	795,5
KESEIMBANGAN PRIMER	(700,4)	(633,1)
DEFISIT ANGGARAN	(1.039,3)	(1.006,4)
PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.039,2	1.006,4

Sumber : Kemenkeu Informasi APBN, 2021

Dari sisi pendapatan, pajak tentu masih menjadi sumber penerimaan terbesar pada APBN 2021 dengan 2,8% kenaikan menjadi Rp1.444,5 triliun dari Rp1.404,5 triliun pada revisi APBN 2020. Pada sisi belanja, pemerintah saat ini akan lebih memfokuskan pos belanja pada tiga aspek utama yakni fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan perlindungan sosial dengan masing-masing proporsi sebesar 26,9%, 26,2%, dan 13,3% dari total belanja pemerintah pusat. Belanja yang lain di luar belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yakni sebesar Rp795,5 triliun. Di antara semua pos belanja yang telah dialokasikan, pos fungsi ekonomi dan perlindungan sosial memegang peranan penting terutama selama masa pandemi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, dan mengatasi dampak dari penyebaran virus Covid19 melalui beberapa program spesifik seperti ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan bantuan langsung tunai. Selain itu, pemerintah juga telah merencanakan untuk membentuk skenario terbaru dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 2021 dengan total alokasi dana diperkirakan akan mencapai Rp553,1 triliun. Program



yang ditawarkan tetap bertujuan untuk pemulihan ekonomi berupa bantuan untuk UMKM dan bisnis, perlindungan sosial, program prioritas, dan tentu saja alokasi untuk kesehatan. Seiring dengan dijalankannya program PEN, sistem yang lebih baik terutama dalam mekanisme penyaluran harus ditingkatkan agar manfaat dari program dapat benar-benar dirasakan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa APBN 2021 memang terasa lebih optimis dibandingkan dengan APBN 2020, dengan adanya peningkatan pendapatan dari pajak dan bukan pajak. Namun, defisit yang terhitung pada APBN 2021 masih sedalam pada APBN 2020, walaupun terdapat sedikit perbaikan yang tercatat pada -5,70% dari PDB. Hal ini karena pos belanja juga masih memerlukan banyak pembiayaan selama masa pandemi, sementara pos pendapatan masih belum pulih sepenuhnya. Padahal, pemerintah telah mengumumkan bahwa nilai defisit akan kembali ke tingkat yang normal yakni 3% dari PDB pada tahun 2023. Di sisi lain, peningkatan kasus Covid-19 juga memberi tanda bahwa pandemi sampai saat ini masih berlangsung dan belum terlihat akan berakhir dalam waktu dekat. Keadaan yang tidak pasti ditakutkan akan membawa pemerintah ke dalam babak baru dari tantangan, terutama dalam mengatasi dampak dari pandemi.

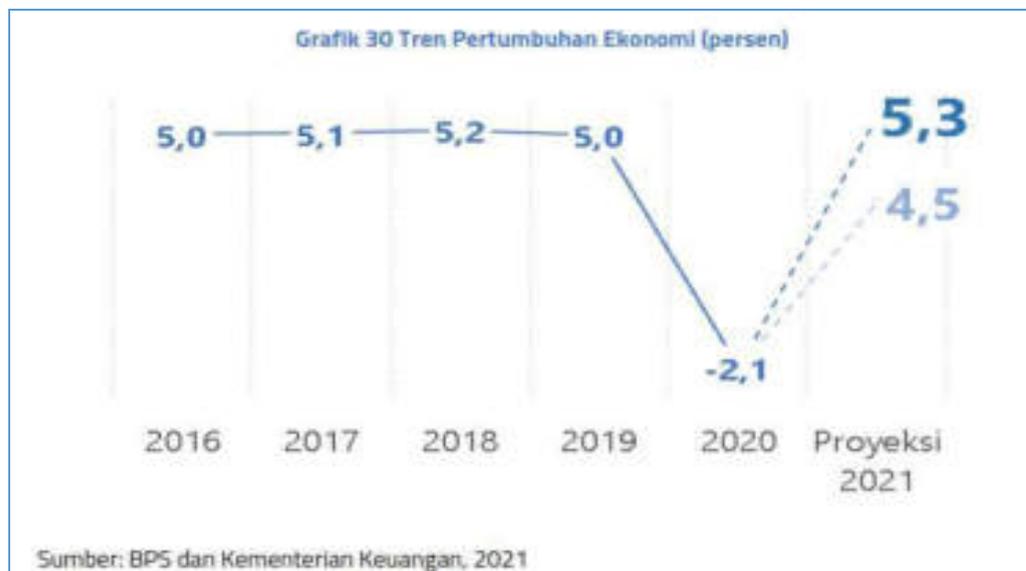
2. Asumsi Ekonomi Makro Nasional dalam APBN TA 2022

Tahun 2020 telah menjadi tahun yang cukup menantang seiring dengan penyebaran virus yang cukup masif, yang tentu saja memakan banyak korban. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah telah mencanangkan beberapa langkah yang substansif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial di tengah aktivitas yang sementara ini dibatasi dan diberhentikan akibat penyebaran virus. Namun, langkah langkah yang belum pernah ditempuh sebelumnya seperti program Pemulihan Ekonomi



Nasional (PEN) di sisi lain juga membutuhkan dana yang cukup banyak, terlihat dari dalamnya defisit APBN 2020 yang mencapai -6,34% dari PDB. Selain kebutuhan biaya untuk rencana pemulihan, beberapa insentif yang diberikan selama pandemi seperti keringanan pajak, juga menurunkan pendapatan pemerintah yang secara langsung menambah beban bagi APBN 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menembus 5% pada September-Oktober 2021. Lalu, ekonomi diprediksi bertahan di level 5% pada Desember 2020, sebagaimana tertuang di asumsi APBN 2021. Kementerian Keuangan Memprediksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia selama Tahun 2021 berada di kisaran 4,5 – 5,5 %. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi tahun ini masih sangat bergantung dengan perkembangan Covid-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka pertumbuhan ekonomi cenderung ke arah positif.



Gambar III-2
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menurut Kementerian Keuangan RI, 2021



Akselerasi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi berpotensi terjadi. Apalagi pada 2021 ini pemerintah juga telah merencanakan anggaran sebesar Rp 403,9 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dari total dana ini, sebesar Rp 25,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk anggaran kesehatan. Bahkan anggaran kesehatan ini masih akan ditambah dengan belanja yang tidak terserap pada Tahun 2020. Sementara itu, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 110,2 triliun. Pemerintah pun masih akan memberikan insentif usaha sebesar Rp 20,6 triliun dan dukungan UMKM serta pembiayaan korporasi senilai Rp 63,84 triliun. Disain kebijakan fiskal yang ekspansif memberikan jaminan bahwa *outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan jauh lebih baik dibanding pada 2020 yang kontraksi.

Tabel III-3
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari sisi Pengeluaran

	Outlook 2021			Proyeksi 2022		
		-			-	
PDB	4,5	-	5,3	5,2	-	5,8
Sisi Pengeluaran						
Konsumsi Rumah Tangga	3,7	-	4,3	5,1	-	5,3
Konsumsi LNPRT	0,5	-	1,9	6,0	-	7,8
Konsumsi Pemerintah	4,3	-	5,4	3,2	-	4,4
PMTB	5,7	-	7,0	5,4	-	6,9
Ekspor Barang dan Jasa	7,3	-	11,5	4,3	-	6,8
Impor Barang dan Jasa	8,6	-	14,2	3,6	-	7,8

Sumber : KEM dan PPKF Kementerian Keuangan Tahun 2022

Sejalan dengan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tersebut, Bank Indonesia (BI) optimis bahwa perekonomian Indonesia pada 2021 akan kembali ke zona positif, bahkan melesat hingga berada di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Ketahanan perekonomian pada tahun 2021 ditopang oleh membaiknya sejumlah komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu perbaikan kinerja ekspor didukung dengan perbaikan



pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi swasta maupun konsumsi pemerintah juga cenderung akan menguat dengan adanya relaksasi kebijakan *social distancing* dan vaksinasi masal. Komponen itu bisa kokoh menopang perekonomian domestik seiring dengan bergulirnya stimulus fiskal lewat program perlindungan sosial. Selanjutnya, sumber pertumbuhan ekonomi yang lain datang dari investasi langsung seiring dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kemudian, dukungan kebijakan pengendalian inflasi diperlukan untuk menjamin terjaganya daya beli masyarakat dan mengendalikan dampak dari penambahan likuiditas. Seiring dengan pelaksanaan reformasi structural, termasuk di sektor pangan, laju inflasi diharapkan dapat tetap bergerak sesuai dengan sasaran inflasi. Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah di tahun 2022, masih akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari global dan domestik. Berdasarkan perspektif global, arah kebijakan moneter yang akan diambil oleh *The Fed* sebagai otoritas moneter Amerika Serikat akan menjadi perhatian utama. Potensi keberlanjutan *stance* kebijakan moneter akomodatif akan sangat bergantung pada pencapaian tingkat inflasi dan pengangguran di tahun sebelumnya. Berdasarkan perspektif domestik, upaya pemulihan ekonomi secara berkelanjutan serta reformasi struktural terutama di sektor infrastruktur diharapkan dapat mendorong kepercayaan investor, sehingga investor asing di dalam negeri tetap terjaga. Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dengan otoritas terkait di sektor keuangan, salah satunya melalui program pendalaman pasar keuangan serta reformasi struktural di sektor keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus masuk modal asing ke Indonesia dan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2022 akan berada pada kisaran Rp 13.900 hingga 15.000 per dolar AS.



Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun di tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 6,32 - 7,27 persen. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 Tahun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal dan risiko ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun memiliki peluang melanjutkan tren penurunan pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia.

Upaya peningkatan kinerja hulu migas pada Tahun 2022 diprediksi akan terus meningkat dengan berbagai kebijakan sebagai rangkaian dari upaya transformasi menuju pencapaian 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada Tahun 2030. Hal ini seiring dengan perkiraan harga minyak mentah dunia yang diprediksi terus mengalami peningkatan seiring sinyal positif dari perekonomian global yang semakin membaik. Program kerja utama yang mencakup pengeboran, kerja ulang, perawatan sumur, serta optimalisasi fasilitas produksi akan terus dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) juga akan terus didorong dalam rangka menahan tingkat penurunan alamiah lapangan migas nasional. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, *lifting* minyak dan gas bumi pada Tahun 2022 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 686 – 726 ribu BPH dan 1.031 – 1.103 ribu BSMPH.

Sementara itu dari sisi kesejahteraan sosial, dengan melihat perkembangan indikator ekonomi hingga April 2021, pemerintah optimis atas kesejahteraan masyarakat yang akan mengalami perbaikan di Tahun 2021 dan 2022. Program PEN yang tetap berlanjut hingga Tahun 2022 akan turut menjadi katalisator pemulihan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi 2021 diperkirakan berada pada rentang 4,5 – 5,3 persen (*y-o-*



y) yang akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, dan mampu mencegah terjadinya PHK pada 2021. Selain itu, program vaksinasi juga akan turut mendukung ekonomi pulih lebih cepat. Tanda-tanda pemulihan ini telah terlihat di triwulan I-2021, dimana kontraksi PDB mengecil menjadi 0,74 Persen (*y-o-y*). Seiring dengan pulihnya ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 turun menjadi 6,26 persen dari Agustus 2020 lalu yang sempat menyentuh 7,07 persen. Pada akhirnya kondisi ini akan mendorong peningkatan penghasilan rumah tangga, sehingga tingkat kemiskinan diharapkan akan membaik, dan akan kembali menjadi *single digit*. Selain itu, pemerataan pembangunan juga terus berjalan dengan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah di berbagai daerah dan dengan terus menyalurkan program perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sehingga rasio gini diharapkan akan kembali turun di Tahun 2021. Demikian juga dengan terus mendorong perbaikan kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan dan Kesehatan, IPM diharapkan akan mengalami perbaikan pada 2021, setelah sempat stagnan pada tahun sebelumnya. Perbaikan indikator kesejahteraan ini diharapkan terus berlanjut pada tahun 2022.

Dengan Memperhatikan berbagai Uraian tersebut diatas, asumsi makro ekonomi di tingkat nasional (hasil pembahasan antara pemerintah dengan DPR) disepakati sebagai berikut :



Tabel III-4

Asumsi Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2021 - 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	Pertimbangan Asumsi		
		2021	2022	
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,5 %	5,2-5,8%	Asumsi <i>baseline</i> 2021 tercapai > 4% di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19.
2	Inflasi	2-4 %	2-4%	Inflasi relatif stabil
3	Nilai Tukar Rupiah rata-rata	Rp 13.700 – 14.900 / USD	Rp. 13.900-15.000 /USD	Kurs relatif stabil di kisaran 14.000 pada Tahun 2020
4	Suku Bunga SBN	6,29 – 8,29 %	6,32 – 7,87 %	Surat Berharga Negara (SBN) relatif stabil
5	Harga Minyak Mentah rata-rata	40-50 USD / barel	60-70 USD/barel	Indonesian Crude Price (ICP) mengalami volatilitas tahun lalu, dari terendah 20,6 USD/barel di April 2020 dan memasuki 2021 pada kisaran 63 USD/barel
6	<i>Lifting</i> Minyak rata-rata	677 – 737 ribu barel perhari	686 - 726 ribu barel/hari	Sejak 2016 <i>lifting</i> minyak bumi terus menurun dari kisaran 800 ribu barel/hari, hingga realisasi <i>lifting</i> terendah Tahun 2019 sebesar 746 ribu barel/hari
7	<i>Lifting</i> Gas rata-rata	1.085-1.173 Ribu Barel setara minyak per hari	1.031-1.103 ribu barel/hari	<i>Lifting</i> gas juga terus mengalami penurunan, tahun 2018 sebesar 1.145 ribu barel/hari, 2019 sebesar 1.057 ribu barel/hari, dan Tahun 2020 sebesar 1.007 ribu barel/hari
8	Tingkat Kemiskinan	9,2-9,7 %	9,0-9,5%	Target APBN 2021 sebesar 9,2 - 9,7% dan capaian 2020 sebesar 10,19%, <i>outlook</i> Tahun 2021 sebesar 9,6%
9	Indeks Pembangunan	72,78 – 72,95	71.91-72,08	Capaian tahun 2019 sebesar 71,92, dan



PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022



No	Indikator Makro Ekonomi			Pertimbangan Asumsi
		2021	2022	
	Manusia			tahun 2020 sebesar 71,94, <i>outlook</i> Tahun 2021 sebesar 71.93
10	Rasio Gini	0,377 – 0,379	0.375 - 0,377	Capaian Tahun 2019 sebesar; 0.380, 2020 sebesar 0.385, <i>outlook</i> Tahun 2021 sebesar 0.380
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,7 – 9,1	6,3 – 6,8%	Target APBN 2021 sebesar 7,7-9,1%, capaian Tahun 2020 sebesar 7,07%, <i>outlook</i> 2021 sebesar 6,7%
12	Nilai Tukar Petani	102-104	102-104	Capaian Tahun 2019 sebesar 100,52 dan Tahun 2020 sebesar 100,35, <i>outlook</i> IMF 2021 100,40

Sumber : KEM dan PPKF Kementerian Keuangan Tahun 2022



B. ASUMSI DASAR YANG DI GUNAKAN DALAM APBD T. A. 2022

1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Lampung Tahun 2021 dan 2022

Perekonomian Lampung cenderung menunjukkan perbaikan, walaupun masih berhadapan dengan Pandemi COVID-19 hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV 2020 terkontraksi sebesar 2,26% (y-on-y) atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi sebesar 2,41% (y-o-y). Namun demikian, realisasi pertumbuhan ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV 2019 sebesar 5,07% (y-on-y). Realisasi pertumbuhan pada triwulan IV 2020 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera (-2,21%; y-o-y) dan Nasional (-2,19%; y-on-y). Realisasi tersebut secara spasial menempatkan Lampung pada peringkat ke-6 dari 10 provinsi di Sumatera pada triwulan IV 2020. Adapun secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan IV 2020 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing sebesar Rp84,74 triliun dan Rp57,36 triliun. Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp88,39 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp59,11 triliun. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,10 persen dibanding triwulan I-2020 (y-on-y), melemah dibanding capaian triwulan I-2020 yang tumbuh sebesar 1,74 persen. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,49 persen. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,89 persen. Jika tinjau dari triwulan ke triwulan, maka Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 tumbuh sebesar 3,04 persen dibanding triwulan IV-2020 (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan,



dan Perikanan sebesar 18,31 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh masing-masing sebesar 0,07 persen dan 0,03 persen.

Dari sisi pengeluaran, perbaikan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh perbaikan kinerja ekspor. Pada triwulan IV 2020, ekspor tercatat tumbuh 5,23% (y-on-y) seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang utama Lampung, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan India. Adapun kelompok komoditas ekspor yang mengalami peningkatan signifikan, yakni kelompok lemak dan minyak hewan/nabati serta kelompok kopi, teh, dan rempah-rempah. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah (-0,15%; y-o-y), dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) (-1,02%; y-o-y) membaik didorong oleh percepatan realisasi anggaran pemerintah daerah, khususnya belanja barang dan jasa, serta pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga (-3,97%; y-o-y), dan investasi (-8,47%; yoy) berkontraksi lebih dalam. Kontraksi konsumsi rumah tangga tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kasus pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya kembali berbagai pembatasan, serta melandainya mobilitas masyarakat di lokasi perdagangan ritel, rekreasi, dan taman. Berakhirnya panen komoditas pertanian dan perkebunan pada triwulan IV 2020 turut memengaruhi penurunan konsumsi masyarakat, sebagaimana tercermin pada kontraksi Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih terjadi pada triwulan IV 2020 (-4,73%; y-o-y). Kinerja investasi juga menurun dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja modal pemerintah, kegiatan sektor konstruksi yang masih berkontraksi, serta masih berlangsungnya perilaku *wait and see* dunia usaha akan perkembangan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19.



Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 (y-on-y) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,10 persen. Kontraksi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) masing-masing sebesar 3,89 persen dan 3,66 persen. Sebaliknya, beberapa komponen yaitu Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan positif. Komponen Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 12,60 persen, diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,22 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sebesar 0,28 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB Pengeluaran) tumbuh sebesar 11,62 persen. Sedangkan dari triwulan ke triwulan, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2021 dibanding triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 3,04 persen (q-to-q), meningkat jika dibandingkan dengan capaian triwulan I-2020 sebesar 2,87 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada Komponen PK-RT dan Komponen PMTB, masing-masing sebesar 0,03 persen dan 0,07 persen.

Optimisme vaksinasi COVID-19 pada awal tahun 2021 berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini ditinjau dari Kinerja investasi pada tahun 2021 yang diperkirakan cukup kuat, meskipun masih terbatas seiring perilaku *wait and see* dunia usaha terkait perkembangan COVID-19. Namun demikian, berlanjutnya pembangunan beberapa proyek strategis, serta proyek infrastruktur pemerintah lainnya diperkirakan dapat menopang pemulihan Kinerja Investasi. Sementara itu, ekspor pada tahun 2021 yang diperkirakan ditopang oleh ekspor antar daerah cenderung meningkat sejalan dengan berlangsungnya puncak musim panen padi, dan pulihnya konsumsi rumah tangga.



Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Lampung diperkirakan akan tumbuh menguat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2020 yang berkontraksi sebesar -1,67% (yoy), dengan asumsi kegiatan *social distancing* akibat pandemi COVID-19 masih akan berlangsung di 2021, meskipun kegiatan *social distancing* akan menurun seiring dengan meluasnya implementasi vaksin COVID-19. Secara umum, prospek akselerasi ekonomi didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi COVID-19 di tahun 2020 (*base effect*).

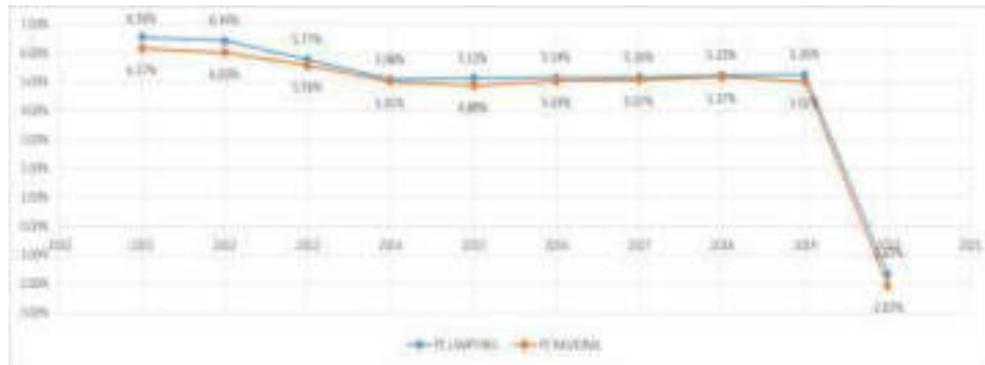
Prospek inflasi pada tahun 2021 diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran 3,0% ± 1% (y-o-y), dengan probabilitas di akhir tahun 2021 mendekati nilai tengah 3,0%, dan mengingat terdapat beberapa hal yang menjadi risiko peningkatan tekanan inflasi khususnya yang berasal dari kelompok bahan makanan serta kelompok inti seiring dengan proyeksi meningkatnya konsumsi masyarakat yang didorong oleh optimism keberhasilan penerapan vaksin COVID-19.

2. Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Lampung dalam APBD TA 2022

a. Perbandingan Realisasi Makro Ekonomi Terhadap Makro Ekonomi Daerah

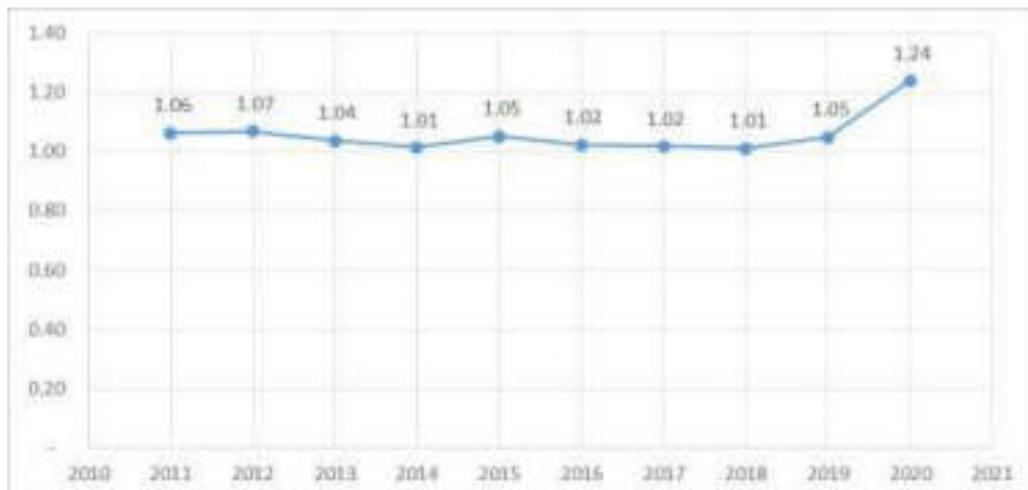
1) Pertumbuhan EKonomi

Gambaran laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Selama 10 Tahun terakhir selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. Hal ini memberikan gambaran bahwa kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung secara umum tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasional.



Gambar III-3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2020

Dengan melihat laju pertumbuhan Ekonomi nasional dan Provinsi Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa rasio Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung Cukup Baik, di mana pada Tahun 2020 meskipun mengalami pertumbuhan yang minus, namun Pertumbuhan Ekonomi Lampung masih diatas Nasional sebesar 1,24% (Gambar III-4). Pertumbuhan Ekonomi Lampung selalu berada di atas Nasional, selama 10 tahun terakhir. Hal ini memberikan Optimisme besar terhadap pemulihan ekonomi Lampung di tahun 2021 dan 2022

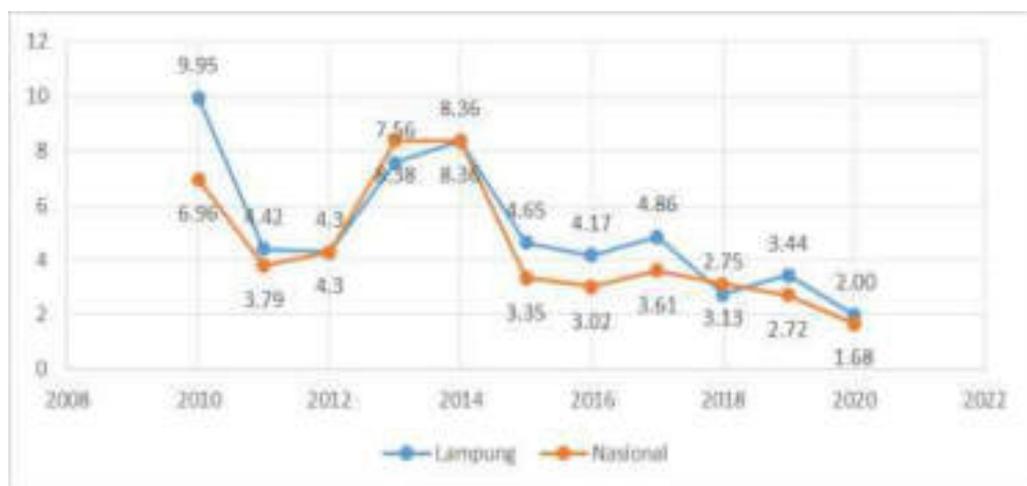


Gambar III-4 Rasio Pertumbuhan Ekonomi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2011-2020



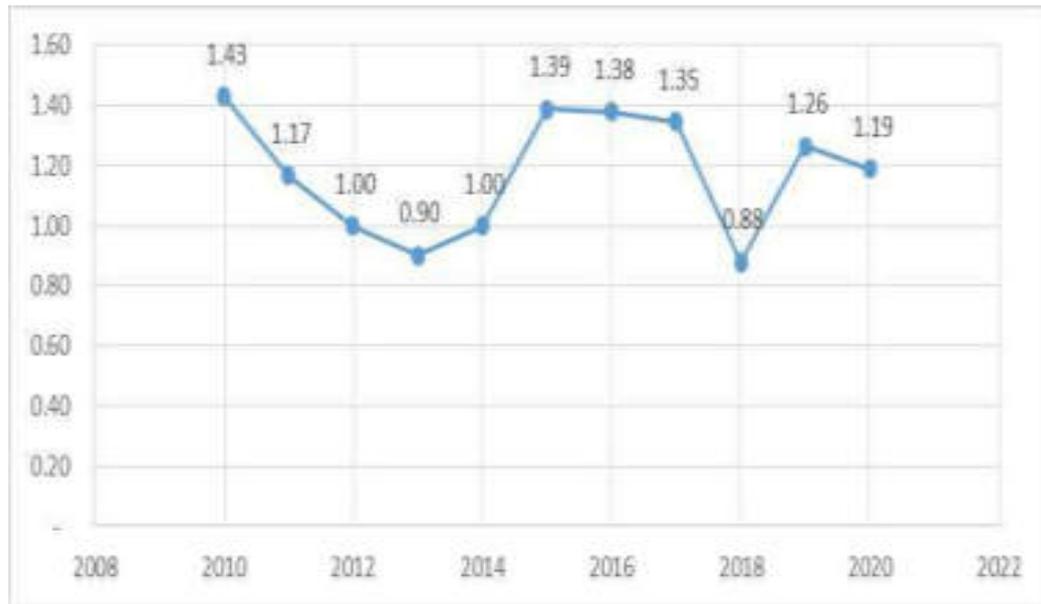
2) Inflasi Daerah

Selama 10 Tahun Terakhir Gambar Inflasi Provinsi Lampung selalu mengikuti inflasi nasional dan cenderung stabil. Sempat mencapai 9,95% di tahun 2010, kemudian secara perlahan hingga berada di kisaran 2-5% selama periode 2014-2020. Tabel laju inflasi daerah dan nasional dapat dilihat pada Gambar III-5.



Gambar III-5 Perkembangan Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2011-2020

Dengan memperhatikan perkembangan inflasi daerah dan nasional maka dapat diketahui bahwa rasio inflasi daerah selama 10 tahun terakhir cenderung fluktuatif, tetapi stabil, dan tidak jauh dari pergerakan Inflasi Nasional. Hal ini berarti harga umum cukup aman seiring dengan stok penawaran barang dan jasa yang terjaga dengan baik. Kondisi ini menggambarkan Optimisme besar terhadap pemulihan ekonomi Lampung di tahun 2021 dan 2022. Rasio Inflasi daerah terhadap nasional dapat dilihat pada Gambar III-6.



Gambar III-6 Rasio Inflasi Provinsi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2011-2020

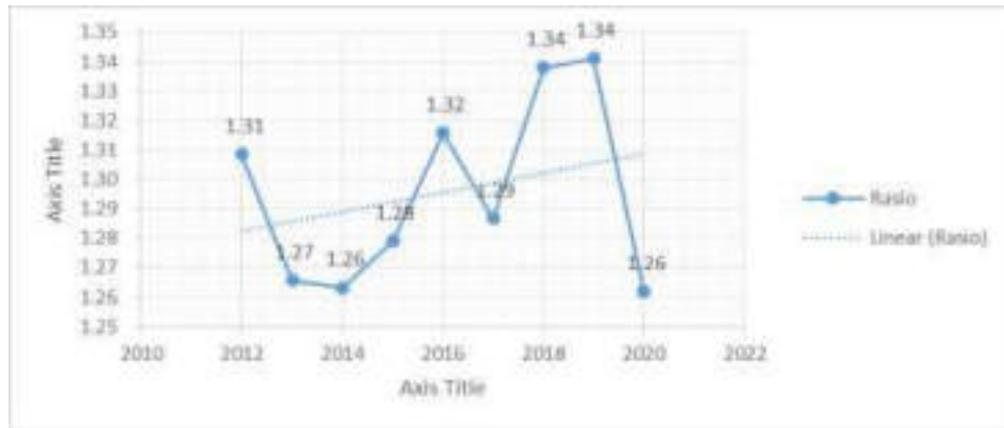
3) Rasio Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan Lampung, jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional, masih lebih tinggi. Hal ini memberi gambaran bahwa Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung masih menjadi permasalahan ekonomi yang harus diselesaikan. Walaupun jumlahnya cenderung menurun tiap tahunnya, tetapi tingkat kemiskinannya masih tinggi, sehingga pemerintah Provinsi Lampung perlu mengarahkan kebijakan umum anggaran belanja pada pengentasan kemiskinan untuk dapat dipertimbangkan sebagai program prioritas.



Gambar III-7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Lampung dan Nasional Tahun 2012-2020

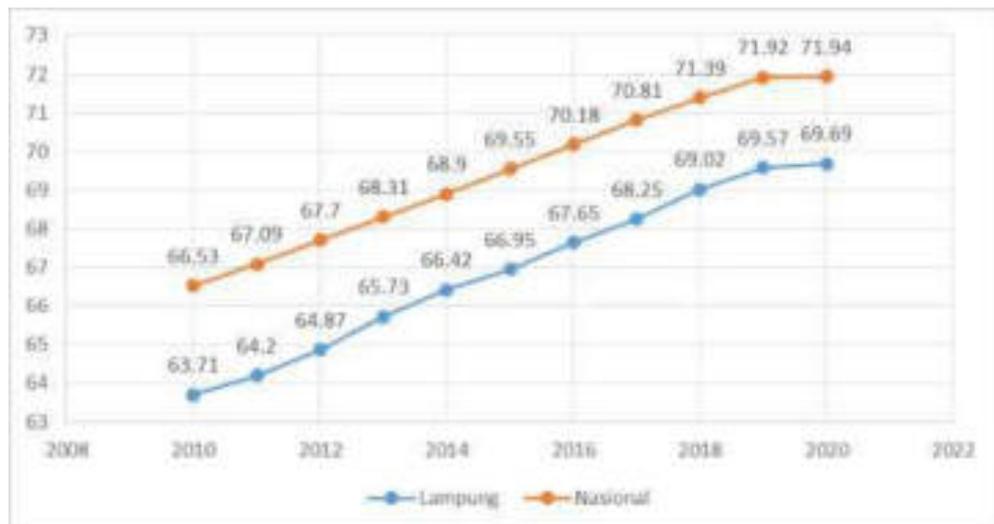
Gambar III-7 di atas menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Provinsi Lampung selama 10 (sepuluh) tahun terakhir mengalami penurunan dari 15,65 persen (2012) menjadi 12,34 persen (2020). Namun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung masih lebih tinggi jika dibandingkan nasional yaitu 9,78 persen di tahun 2020. Dengan melihat data selama 10 tahun terakhir rasio tingkat kemiskinan di Lampung terhadap Nasional mengalami penurunan dari 1,31 (2012) menjadi 1,26 (2020). Program pengentasan kemiskinan harus lebih di tingkatkan dalam rangka menurunkan rasio tingkat kemiskinan, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan masyarakat menjadi sejahtera,



Gambar III-8 Rasio Tingkat Penduduk Miskin Provinsi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2011-2020

4) Rasio Indeks Pembangunan Manusia

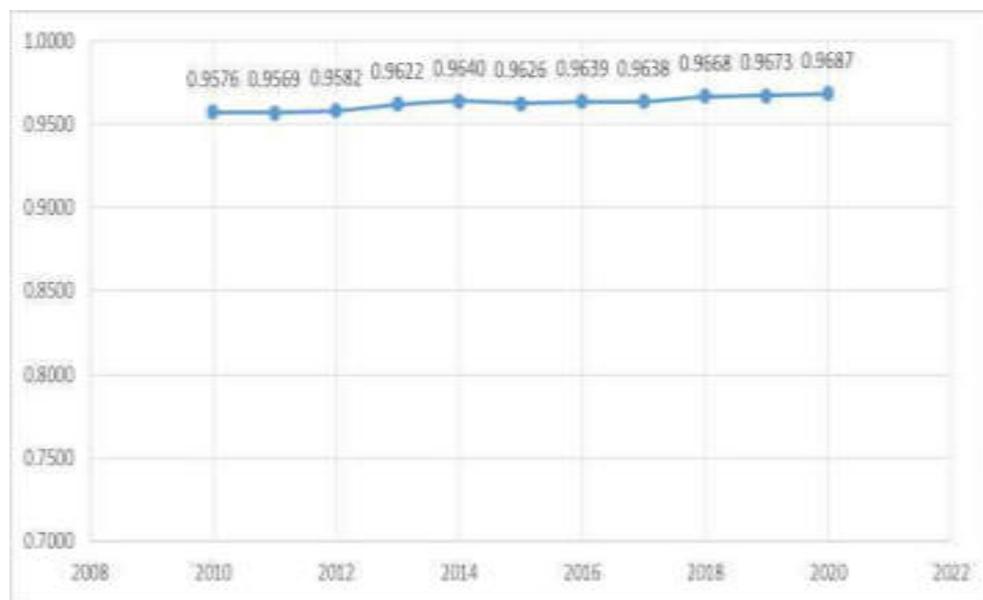
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung masih berada di bawah IPM Nasional. Hal ini berarti bahwa akses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, secara khusus di Provinsi Lampung masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM nasional.



Gambar III-9 Perbandingan IPM Lampung dan IPM Nasional Tahun 2010-2020



Data pada Gambar III-9 di atas menunjukkan RASIO INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA masih kurang dari satu selama 10 tahun terakhir, yang menandakan IPM Lampung masih berada di bawah Nasional. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Lampung perlu mengupayakan alokasi pendanaan dan kegiatan untuk meningkatkan IPM, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Lampung.

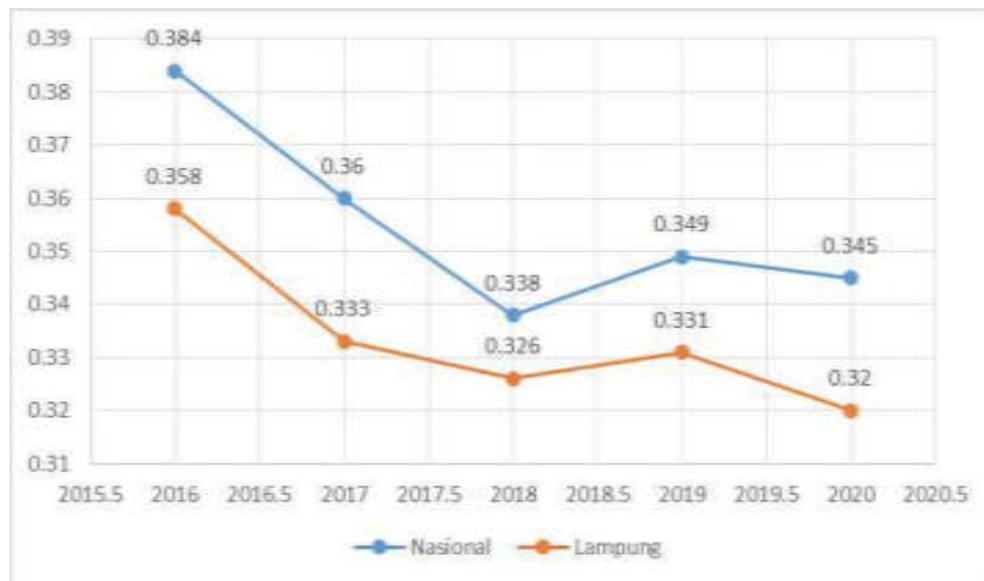


Gambar III-10

Rasio IPM Lampung Terhadap IPM Nasional Tahun 2010-2020

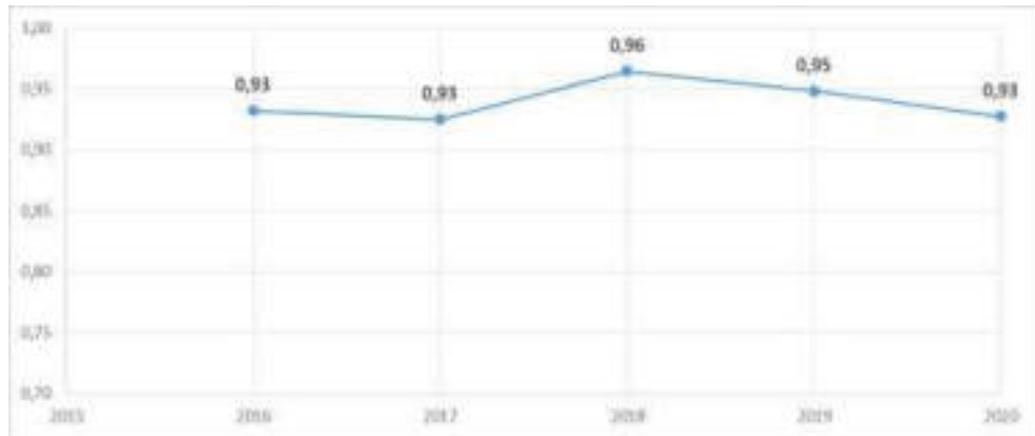
5) Rasio Indeks Gini

Indeks Gini Provinsi Lampung dalam 5 (lima) tahun terakhir masih berada di bawah Indeks Gini Nasional. Hal ini berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh di Provinsi Lampung masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional.



Gambar III-11 Perbandingan Pertumbuhan Indeks Gini Ratio Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020

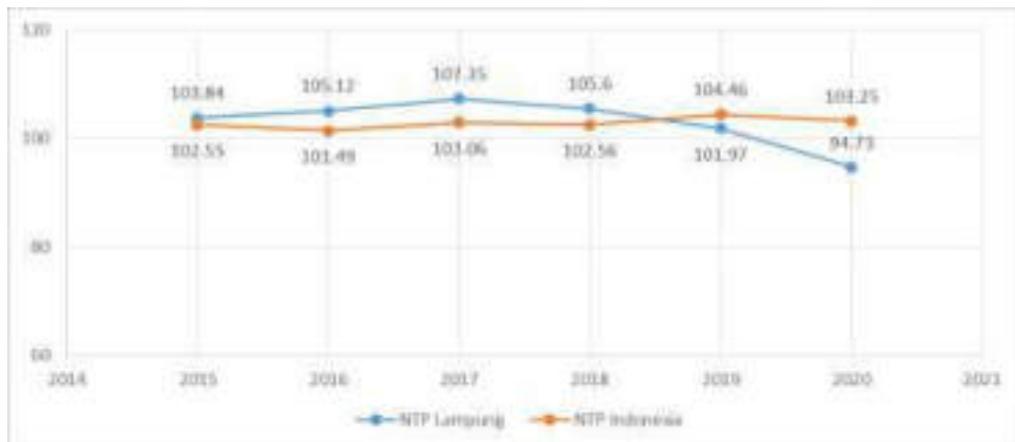
Gambar III-11 menunjukkan bahwa rasio Indeks Gini Provinsi Lampung masih berada di bawah rasio Indeks Gini nasional. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh di Provinsi Lampung masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional. Oleh karena itu, Provinsi Lampung perlu mengupayakan program-program terkait pemerataan pembangunan di masa depan dapat ditingkatkan, dan diharapkan dapat terus berlanjut pada level rasio Indeks Gini berkisar antara 0,32 – 0,33, yang diharapkan cenderung dapat diturunkan di bawah level 0,32 hingga tahun berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat terutama masyarakat kota dan masyarakat desa.



Gambar III-12 Rasio Perbandingan Indeks Gini Ratio Provinsi Lampung Terhadap Nasional Tahun 2016-2020

6) Rasio Nilai Tukar Petani (NTP)

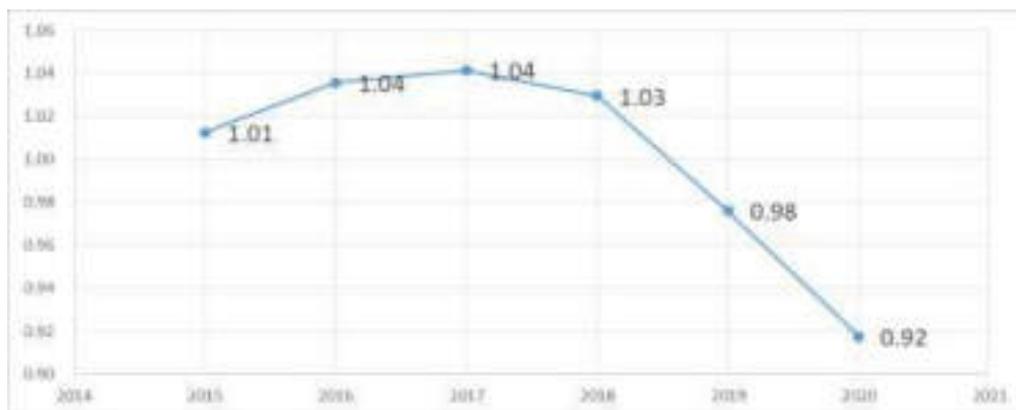
NTP Di Provinsi Lampung saat ini dapat dikatakan mengalami penurunan secara *year on year*. Hal ini dapat dilihat NTP Provinsi Lampung terus turun hingga tahun 2020 dari tahun 2017 sebesar 107,35 hingga ke 94,73. Jika dibandingkan dengan NTP nasional, proposi NTP Provinsi Lampung juga semakin di bawah NTP Nasional di Tahun 2020, mencapai 103,25. Artinya terjadi penurunan nilai tukar di Provinsi Lampung terhadap Nilai Tukar Petani secara nasional.



**Gambar III-13
Perkembangan NTP Nasional dan NTP Lampung
Tahun 2015-2020**



Data Rasio Perbandingan antara NTP Nasional terhadap RASIO NTP Provinsi Lampung menunjukkan bahwa dalam 2 Tahun Terakhir Rasio NTP Provinsi Lampung mengalami Penurunan terhadap NTP Nasional (Gambar III-14). Rasio NTP Provinsi Lampung terhadap NTP Nasional pada Tahun 2020 adalah 0,92. Hal ini menandakan perlu upaya lebih untuk meningkatkan produksi pertanian, sehingga nilai produksi pertanian baik dari segi mutu produksi maupun dari peningkatan nilai harga produk pertanian dapat meningkatkan NTP dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Petani di Provinsi Lampung.



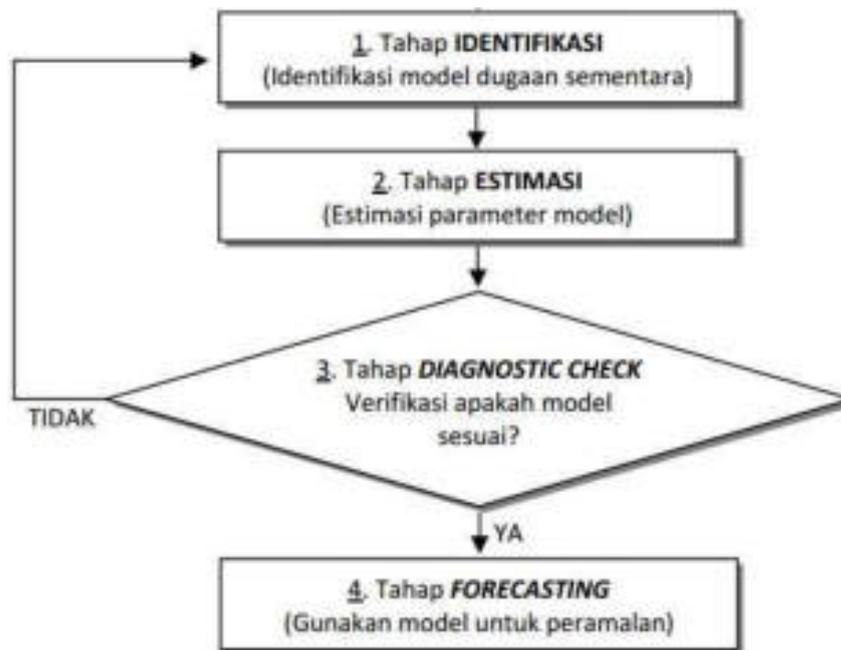
Gambar III-14

Rasio NTP Lampung Terhadap NTP Nasional Tahun 2015-2020

b. Pengukuran Prediksi Makro Ekonomi Provinsi Lampung 2022

Hasil analisis indikator makro ekonomi dapat digunakan untuk menentukan Asumsi Dasar Penyusunan Anggaran. Hasil analisis indikator makro ekonomi dapat diperoleh dengan melihat tren pola pergerakan penurunan atau peningkatan indikator ekonomi. Pengukuran tren pola pergerakan ekonomi makro baik nasional maupun daerah

menggunakan **Model Autoregresif Integrated Moving Average (ARIMA)**, yaitu model yang secara penuh dapat digunakan untuk membuat peramalan. ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek. Perhitungan analisis dengan ARIMA menggunakan Program aplikasi Statistik **EViews** (Anton, 2003).



Gambar III-15 Bagan Alir Penentuan Hasil Prediksi Makro Ekonomi

Hasil prediksi data makro ekonomi dapat dijadikan acuan untuk menentukan Kebijakan Umum dan strategi capaian Kebijakan Umum Anggaran daerah Provinsi Lampung.

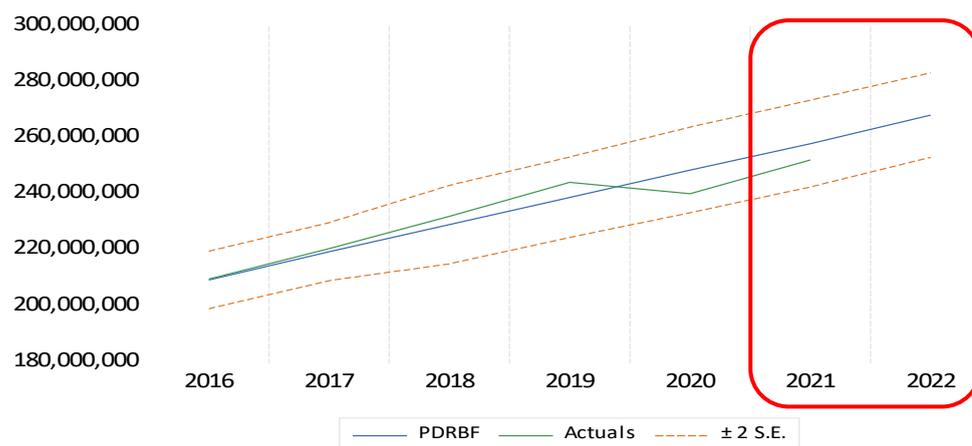
Pengukuran prediksi Indikator Makro Ekonomi merupakan analisis perkembangan makro ekonomi yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan makro ekonomi di masa depan. Analisis prediksi pertumbuhan ekonomi makro dilakukan untuk melihat Tren pertumbuhan Makro Ekonomi tahun prediksi dan tahun berjalan, kemudian analisis prediksi juga dilakukan dengan menggunakan



Komparasi data dan interpolasi data. Data indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung yang dianalisis dengan model ARIMA, yaitu sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil perhitungan berdasarkan data realisasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi diprediksi Tahun 2021 berada pada posisi 3,5 - 4,5 persen, kemudian di tahun 2022 diprediksi mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada posisi 4,22 - 4,71 Persen. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi ini akan terus meningkat, seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada perekonomian daerah.



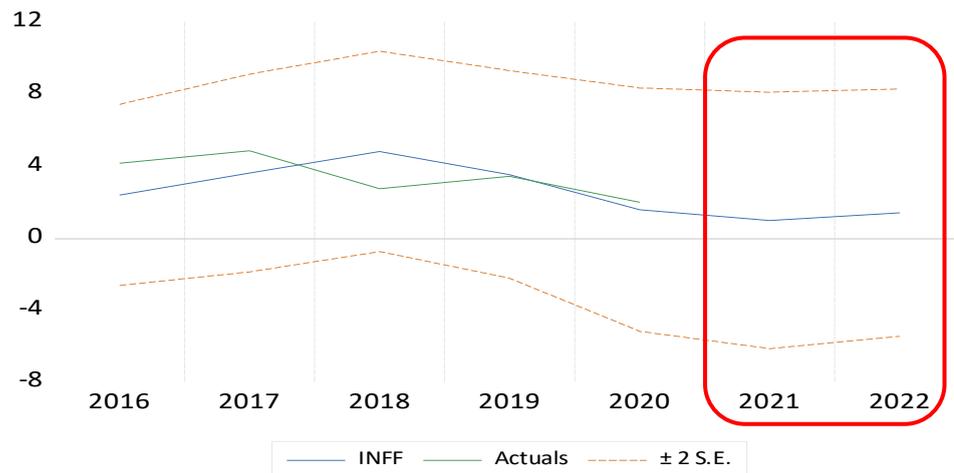
Gambar III-16 Prediksi Pertumbuhan Ekonomi 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020

2. Inflasi Daerah

Prospek inflasi pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan masih tetap terjaga pada kisaran $3,0\% \pm 1\%$ (y-o-y) berdasarkan data ril Tahun 2015 - 2020. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi nasional. Strategi-



strategi tersebut tertuang dalam konsep 3K, yaitu keterjangkauan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif (Bank Indonesia, 2021). Strategi kebijakan tersebut juga diselaraskan sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.

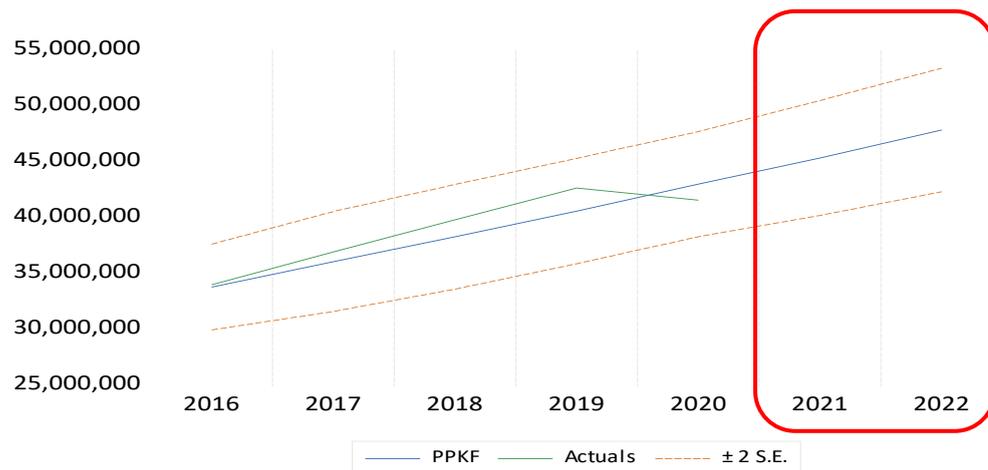


Gambar III-17

Prediksi Pergerakan Inflasi Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita merupakan suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat di Provinsi Lampung. Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung diprediksi akan meningkat Tahun 2021 berkisar antara 43 Juta rupiah hingga 45 Juta rupiah, kemudian kembali meningkat di Tahun 2022 antara 45 Juta rupiah hingga 48 Juta Rupiah. Peningkatan ini dapat terjadi Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan pemulihan ekonomi nasional.

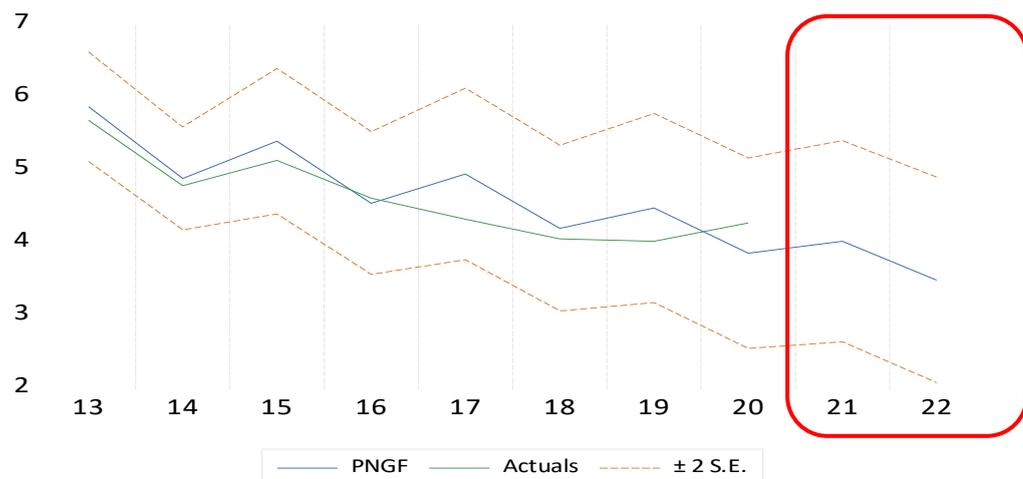


Gambar III-18

**Prediksi Pendapatan Perkapita Provinsi Lampung Tahun
2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020**

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka diprediksikan akan terus menurun. Peningkatan Investasi dan seiring dengan penurunan kebijakan pembatasan sosial secara bertahap maka lapangan pekerjaan secara berangsur-angsur juga akan terbuka, yang memberi kesempatan kepada Angkatan Kerja untuk bekerja Kembali, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka akan Menurun, sebagai akibat pertumbuhan ekonomi membaik. Prediksi Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2021 akan berada pada kisaran 4 - 5 persen, dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid 19 yang belum pasti mereda. Kemudian di Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka diperkirakan akan mengalami penurunan hingga berkisar antara 3,7 – 4,7 Persen.

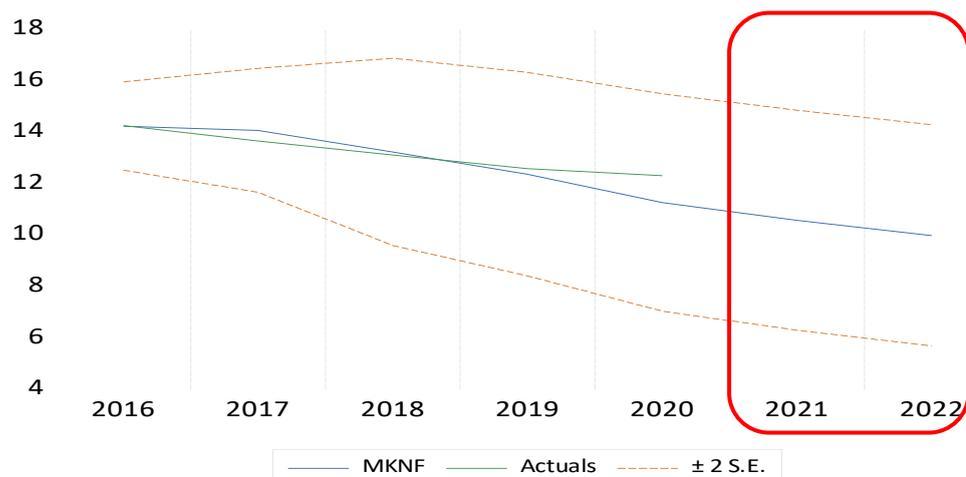


Gambar III-18

Prediksi Tingkat Pengangguran Terbuka Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020

5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan diprediksi akan Menurun, seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi dan efektifitas vaksin COVID-19. Perkiraan penurunan kemiskinan pada Tahun 2021 berada di kisaran 11 - 12 persen dan pada Tahun 2022 turun di antara 10,6 - 11,5 persen.



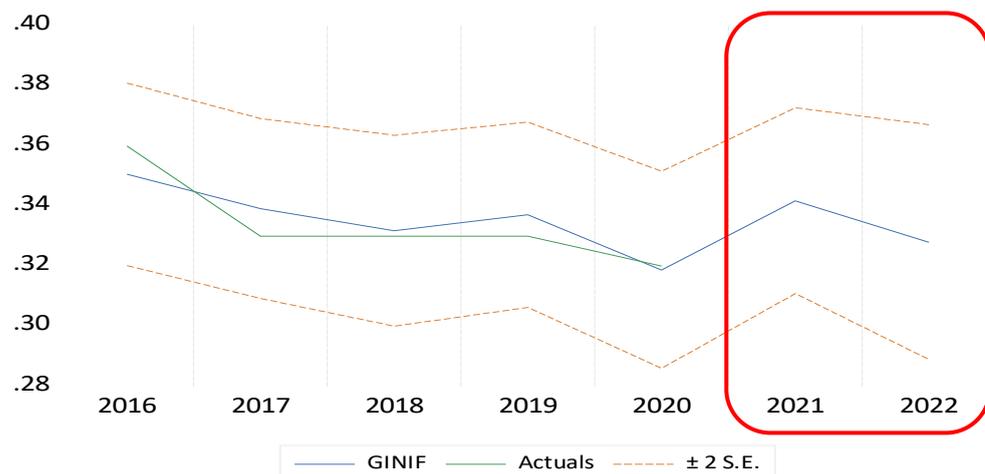
Gambar III-19

Prediksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020



6. Indeks Gini

Indeks Gini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung. Hasil prediksi Indeks gini di Provinsi Lampung akan semakin turun mengikuti peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat pengangguran. Indeks Gini pada Tahun 2021 diperkirakan berada di antara 0,32 - 0,33, dan pada Tahun 2022 Indeks Gini berada pada kisaran 0,31 - 0,33. Baik dan buruknya Indeks gini bergantung dari pemulihan ekonomi nasional yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

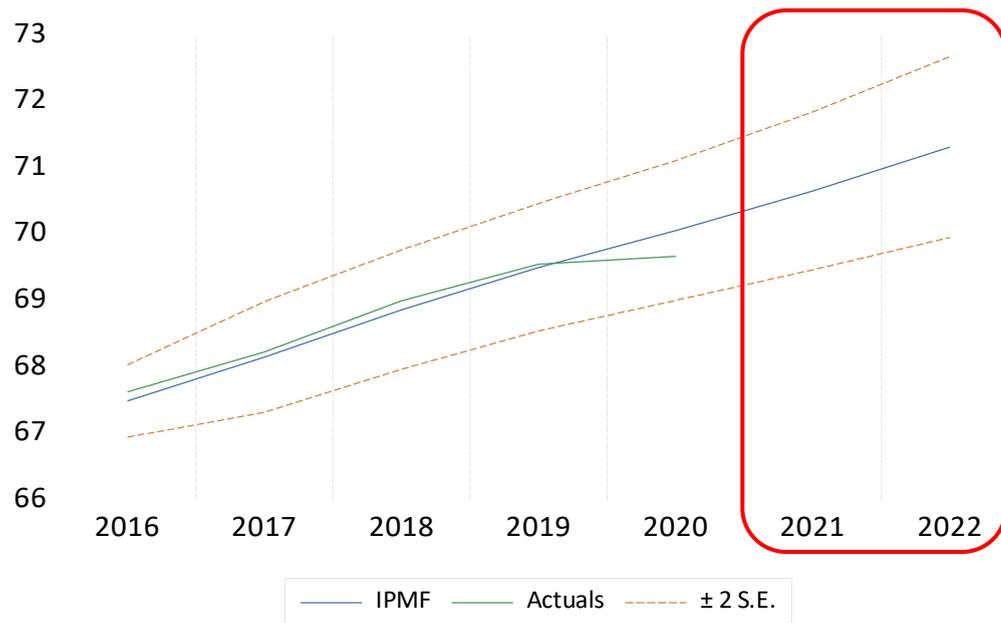


Gambar III-20

**Prediksi Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2021-2022,
Berbasis Data Tahun 2010 - 2020**

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM diprediksi mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi dan efektifitas vaksin COVID-19. IPM pada Tahun 2021 diperkirakan meningkat di kisaran 70,5 – 72,1, kemudian di Tahun 2022 mengalami peningkatan dikisaran angka 71 - 73. Peningkatan IPM ini diharapkan terjadi sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi daerah.

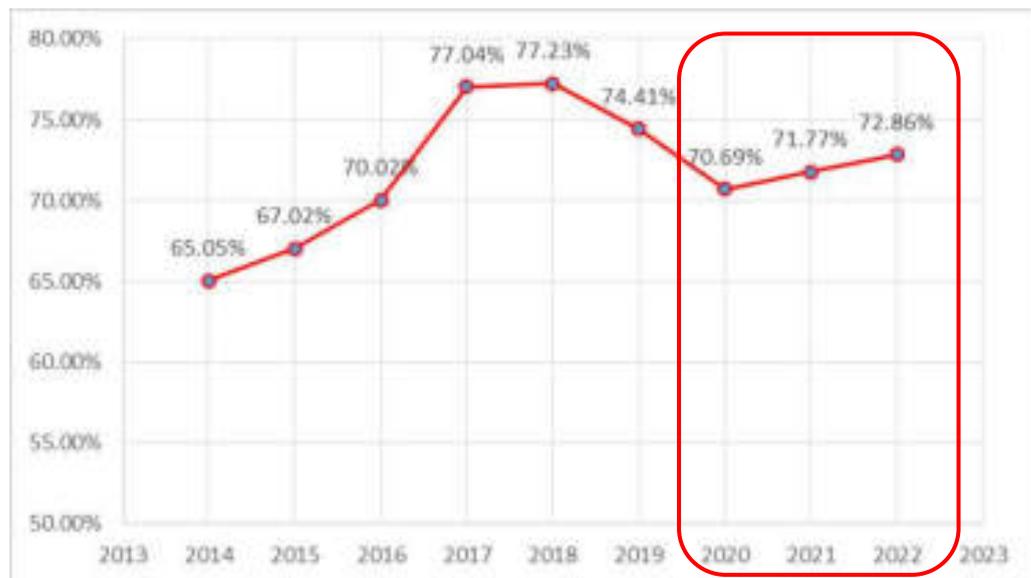


Gambar III-21

**Prediksi IPM Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis
Data Tahun 2010 - 2020**

8. Tingkat Kemantapan Jalan

Tingkat kemantapan jalan saat ini berada di kisaran 66%. Artinya perlu ada peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai target tingkat kemantapan jalan hingga Tahun 2022. adanya penurunan tingkat kemantapan jalan pada tahun 2019 dan 2020 akibat adanya refokusing anggaran di masa Pandemi Covid membuat terjadinya penurunan Tingkat Kemantapan Jalan. Dengan melihat pada data tersebut, maka prediksi tingkat kemantapan jalan ditargetkan pada tahun 2021 adalah sebesar 71,77 persen. Sedangkan pada tahun 2022 diharapkan mampu mencapai target berkisar antara 72,86 persen.

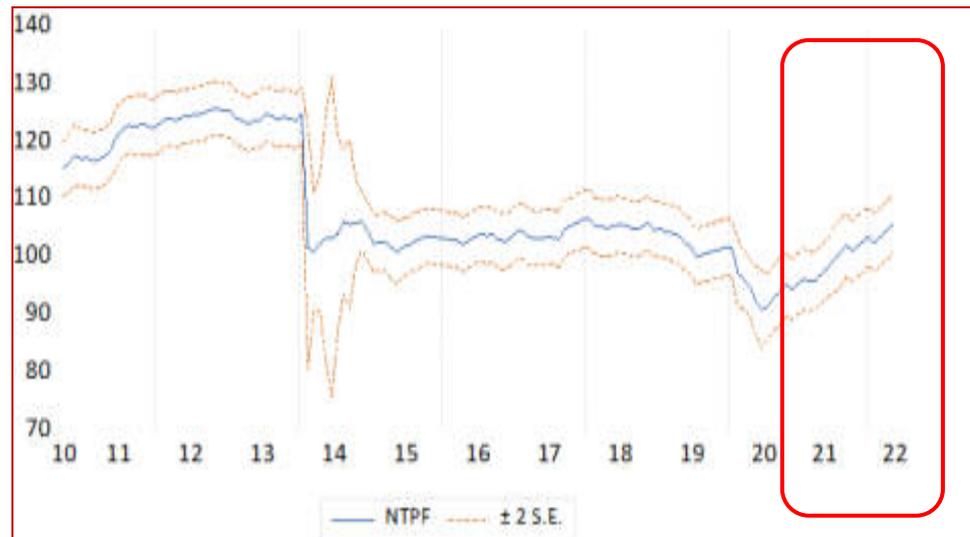


Gambar III-22

Prediksi Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2014 - 2019

9. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang terjadi saat ini masih fluktuatif. Namun demikian, jika ditinjau dari tren yang terjadi dari semester kedua Tahun 2020 hingga kuartal 1 Tahun 2021, laju NTP Provinsi Lampung terus mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhinya antara lain sebagai akibat fokus pemerintah melalui program petani berjaya yang mampu meningkatkan NTP Provinsi Lampung. Diperkirakan NTP Provinsi Lampung pada Tahun 2021 mengalami peningkatan antara 100,73 – 101,67. Kemudian, di Tahun 2022 NTP Provinsi Lampung akan mengalami peningkatan antara 102-56 – 103,78, yang dapat dilihat pada Gambar III-23.

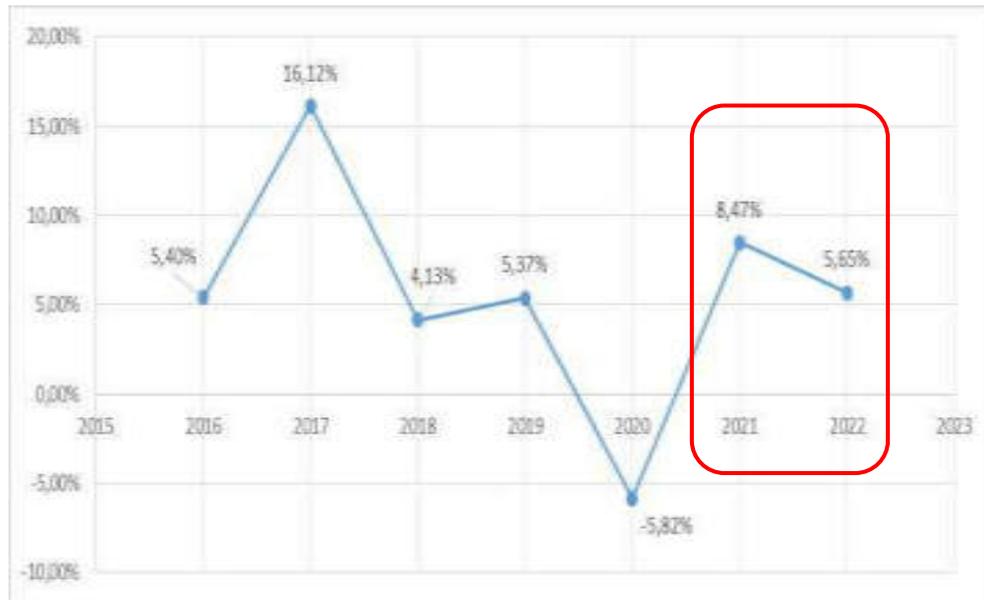


Gambar III-23

**Prediksi Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Lampung Tahun
2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020**

10. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD saat ini cukup fluktuatif pertumbuhannya. Hal ini dikarenakan Pertumbuhan PAD sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan PAD nya. Berkaitan dengan hal tersebut, diperkirakan Pertumbuhan PAD pada Tahun 2021 merupakan tahun ekspansif dengan kebijakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan, dan pendapatan lain-lain yang sah, dan diperkirakan Program tersebut akan mampu meningkatkan PAD berkisar 8,47% persen. Kemudian, Pertumbuhan PAD di Tahun 2022 sangat tergantung pada kebijakan stabilitas dan penguatan, sehingga perkiraan Pertumbuhan PAD hanya berkisar di antara 5,65% persen.



Gambar III-24 Prediksi Pertumbuhan PAD Provinsi Lampung Tahun 2021-2022, Berbasis Data Tahun 2010 - 2020

Keberadaan Data dan Informasi tersebut di atas, dengan mendasarkan pada data Asumsi Makro Ekonomi Nasional, Asumsi Rasio Makro Ekonomi Daerah terhadap Nasional, dan Data Prediksi Pertumbuhan dalam tiga kategori (Prediksi Moderat, Prediksi Optimis, dan Prediksi Pesimis) selama 10 tahun yang berdasarkan pada Data ril di periode tertentu, serta Target Asumsi Makro Ekonomi menurut RKPD Daerah Provinsi Lampung tahun 2022, maka penetapan Asumsi Makro Ekonomi daerah Provinsi Lampung perlu diawali dengan koordinasi Kecocokan Data dan Informasi bersama instansi-instansi terkait melalui forum FGD yang melibatkan Bank Indonesia, BPS, Bappenda, Bappeda dan instansi-instans terkait lainnya. Hasil forum FGD menyepakati penentuan Target Asumsi Makro Ekonomi daerah Provinsi Lampung tahun 2022, yang dapat dilihat pada Tabel III-5.



Tabel III-5
Asumsi Ekonomi Makro Lampung Tahun 2022

No	Indikator Makro Ekonomi	INDIKATOR MAKRO EKSISTING s/d Q1 – 2021	ASUMSI MAKRO NASIONAL 2022	ASUMSI RASIO MAKRO EKONOMI DAERAH TERHADAP NASIONAL 2022	ASUMSI MAKRO RKPD TAHUN 2022	PREDIKSI ASUMSI MAKRO EKONOMI 2022			Target Asumsi Makro Ekonomi KUA Tahun 2021 (yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung)	TARGET MAKRO EKONOMI 2022
						Prediksi Makro optimis	Prediksi Makro Moderat	Prediksi Makro Pesimis		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,10	5,2-5,8	5,5-6,1%	4,3-5,3	4.71 %	4.47%	4,22%	2,5 – 3,5	3,5 – 4
2	Inflasi (%)	1,75	2-4	1-3	2 – 4	3	2,5	2	2 – 4	2 – 4
3	PDRB Perkapita (Rp Juta Rupiah /tahun)	41,62	56,9 (2020)	44 – 45	45-48	48	46,5	45	41 - 43	42-43
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	6,3 – 6,8	4,3 – 4,8	4-4.5	3,7	4.2	4,7	4 – 4,5	4,4 - 4.3
5	Tingkat Kemiskinan (%)	12,76	9,0-9,5	11,0-11,5	11,7- 12,2	10,6	11	11,5	12,4 – 12,76	11,9-12,04
6	Indeks Gini	0,32	0.375 - 0,377	0.30 - 0,31	0,32- 0,33	0.31	0.31	0.32	0,310 - 0,334	0,308-0,324
7	Indeks Pembangunan Manusia	69,69	71.91-72,08	69-71	71,49	73	70	71	69,69 – 70	70-70,3
8	Tingkat Kemantapan Jalan (%)	77,23	91	80-81	72,34	72,86	72,32	71,77	70,69-74,25	76
9	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,88 (Mei)	102-104	104	105	103,78	103,1	102,56	101-102	102-103
10	Pertumbuhan PAD (%)	-5,824%	-	5,2%	5,71%	8,47%	7,09%	5,71%	12,62	3,34 %
11	Efek Rumah Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	6,915

Sumber : Hasil Analisis, 2021



Tabel III-5 merupakan hasil pembahasan target makro pembangunan pada KUA dan PPAS Tahun 2022 serta Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Lampung, dihasilkan kesepakatan antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung terhadap Asumsi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Lampung pada Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2022 yang berjumlah 11 (sebelas) item; setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung disepakati, sebagai berikut :

1. Pada Pertumbuhan Ekonomi yang semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 4,3 – 5,3 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 3 - 4% setelah pembahasan menjadi 3,5 – 4 % diprediksikan Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Lampung akan berjalan dengan baik, melihat kondisi Covid – 19, akan berangsur membaik dengan telah dilaksanakan Vaksinasi di Masyarakat Lampung.
2. Pada Inflasi di proyeksi KUA 2022 sebesar 2 – 4 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 3,0 + 1 % setelah pembahasan menjadi 2 – 4 %.
3. Pada PDRB per Kapita di proyeksi KUA 2022 sebesar 45 – 48 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 42 – 43 % setelah pembahasan menjadi 42 – 43 %.
4. Pada Tingkat Pengangguran Terbuka semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 4 – 4,7 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 4,4 – 4,3% setelah pembahasan menjadi 4,4 – 4,3 %. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung pada periode bulan Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja 2021 di Provinsi Lampung sebanyak 4.494,95 ribu orang dan jumlah angkatan kerja Agustus 2021 sebanyak 4.494,95 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar : 4,67 % jumlah pengangguran sebanyak 209,57



ribu orang dan TPT Agustus 2021 sebesar 4,69 % jumlah pengangguran sebanyak 210,63 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah pengangguran dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja. Pada Target Makro KUA PPAS PPAS Provinsi Lampung Tahun 2022 ditargetkan 4 sampai dengan 4,7 %. Jumlah Pengangguran sebanyak 179.641 sampai dengan 211.079 orang. Kalau dibandingkan dengan Jumlah Pengangguran di tahun 2021 maka target paling optimis akan terjadi penurunan Pengangguran pada tahun 2022 sekitar 30.988 orang. Upaya penurunan Jumlah Pengangguran di Provinsi Lampung dilakukan melalui program kegiatan pembangunan ekonomi baik sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, UKM, Pariwisata serta program peningkatan daya saing tenaga kerja.

5. Pada Penduduk Miskin di proyeksi KUA 2022 sebesar 11,4 – 12,05 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 12,4 – 11,9 % setelah pembahasan menjadi 12,4 – 11,9 %.
6. Pada Indeks Gini di proyeksi KUA 2022 sebesar 0,31 – 0,33 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 0,308 – 0,324 % setelah pembahasan menjadi 0,308 - 324 %.
7. Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di proyeksi KUA 2022 sebesar 70 – 71,49 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 70 – 70,3% setelah pembahasan menjadi 70 – 70,3 %.
8. Pada Tingkat Kemantapan Jalan di proyeksi KUA 2022 sebesar 70 – 72,34 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 76 % setelah pembahasan menjadi 76 %.
9. Pada Nilai Tukar Petani semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 103 - 105 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 102 – 103 % setelah pembahasan menjadi 102 - 103 %.
10. Pada Pertumbuhan PAD semula di proyeksi KUA 2022 sebesar 5,71 – 8,47 % dan Target Makro PRPJMD Tahun 2022 3,87 % setelah pembahasan menjadi 3,34 %. Pada potensi Pendapatan Daerah, akan



bertambah dari Pajak Daerah PBBKB sebesar Rp. 10.000.000.000,- PAF Rp. 200.000.000,- Retribusi Daerah Rp. 957.595.248, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan Rp. 230.759.438.668, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 112.767.736.084, Penambahan pada Pendapatan Transfer berasal dari Kabupaten / Kota (Bantuan Diklat Kabupaten) Rp. 2.136.381.000, Penambahan pada Hibah Program dari Pemerintah Pusat guna mendorong pengelolaan Irigasi secara Integratif dan partisipatif, dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional yang mengedepankan kemajuan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan Petani Indonesia (IPDMIP) sebesar Rp. 5.354.233.800. Total Jumlah Penambahan PAD Rp. 362.175.384.800, tetapi Rp. 12.175.384.800 sifatnya mengikat sehingga tidak dapat dialokasikan Belanja bagi OPD lain, karena Penambahan tersebut, berasal dari Tata Kelola BLUD, yaitu : BLUD Labkes, BLUD RSJ, Bantuan Diklat Kabupaten dan Hibah IPDMIP. Sehingga Penambahan PAD sebesar Rp. 350.000.000.000 yang akan ditata di masing – masing Komisi DPRD Provinsi Lampung.

11. Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di proyeksi Target Makro PRPJMD Tahun 2022 6,915 % setelah pembahasan menjadi 6,915 %. Adalah Point yang baru yang merupakan tambahan Target Makro Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2022, dalam rangka mengimplementasikan rencana aksi mitigasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Lampung No. 32 A tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung dan menuangkannya dalam kegiatan OPD terkait setiap tahunnya. Di dalam dokumen RAD-GRK, ditetapkan empat (4) sektor dan beberapa OPD terkait yang menjadi prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut (Dinas Kehutanan), sektor pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura), sektor energi dan transportasi (Dinas ESDM; Dinas



Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perhubungan), serta sektor pengolahan limbah (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Lingkungan Hidup). Pada Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung akan berupaya untuk menurunkan emisi GRK sebesar 6,915%.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud, yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi Pendapatan Daerah yang akan dianggarkan dalam R-APBD tahun anggaran 2022 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah diperoleh melalui:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mendasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksana bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, serta potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan asumsi-asumsi ekonomi makro yang memiliki pengaruh terhadap target pendapatan daerah dan retribusi daerah.



Pemerintah daerah tidak melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Penganggaran hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan menghitung nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memerhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Penganggaran lain-lain PAD yang Sah dilakukan dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek sesuai kode rekening yang berkenaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pendapatan Transfer

Dana Transfer yaitu transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebelum terbitnya Perpres atau PMK tentang rincian APBN Tahun 2022 yang memuat pengelolaan dana transfer ke daerah, maka dapat mengacu pada peraturan tahun sebelumnya.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

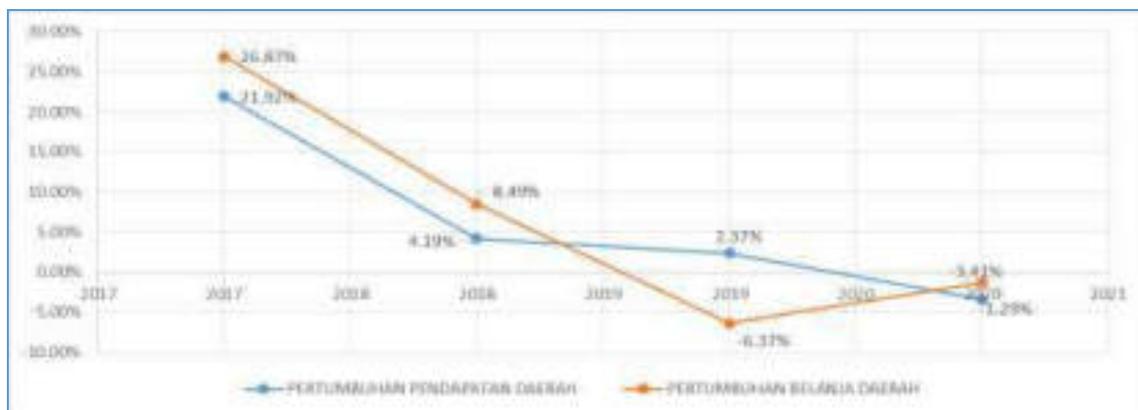
Meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan, dan dikoordinasikan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan.

Optimisme masyarakat dan pelaku usaha terhadap keberhasilan implementasi vaksinasi COVID-19 tahun 2021 untuk perbaikan aktivitas ekonomi terus berlanjut setelah proses pembalikan arah (*turning point*) yang terjadi di triwulan I 2021. Permintaan domestik melanjutkan pemulihan



terbatas, dan ekspor membaik signifikan. Selain itu, kondisi makro ekonomi juga menunjukkan perbaikan dan relatif stabil yang tercermin pada membaiknya inflasi dan variabel lainnya. Kondisi tersebut mendorong ke arah perbaikan anggaran belanja daerah. Laporan Arus Kas Keluar Pemerintah Provinsi Lampung sampai dengan triwulan IV 2020 mencatatkan realisasi belanja sebesar Rp1,31 triliun, terpantau meningkat sebesar 25,65% (y-o-y) dibanding dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1,04 triliun. Peningkatan terbesar bersumber dari belanja barang yang merupakan komponen belanja dominan (85,64%) di Provinsi Lampung. Dengan upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berpotensi kembali normal, berlanjut hingga Tahun 2022. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik secara umum akan berdampak pada kinerja keuangan negara maupun keuangan daerah, terutama dari sisi penerimaan.

Jika ditinjau dari pertumbuhan belanja dan pendapatan daerah sejak tahun 2018 baik Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 juga mengalami penurunan dikarenakan penurunan dana perimbangan daerah. Sementara itu, penurunan pada Tahun 2020 dikarenakan ada *refocusing* anggaran untuk penanganan dan antisipasi dampak pandemi. *Refocusing* mengharuskan ada pengurangan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.



Gambar IV-1 Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Lampung

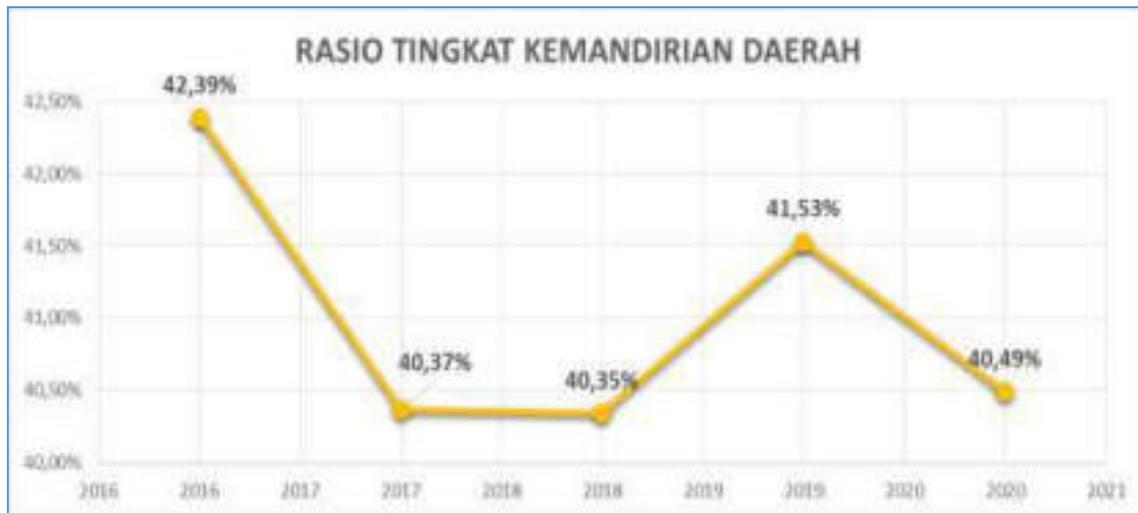


Sementara itu, rasio Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung selama 5 tahun Terakhir Berkisar 2 - 4% (Gambar IV-2). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perolehan pendapatan daerah terhadap PDRB secara keseluruhan masih rendah. Jika dibandingkan dengan nasional, rasio pendapatan daerah ini juga masih lebih rendah. Artinya perlu ada pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam setiap mata anggaran pada Belanja Daerah, khususnya pada program-program unggulan daerah yang dapat mendorong ke peningkatan PDRB dan Pendapatan Daerah secara umum



Gambar IV-2 Rasio Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap PDRB

Tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari Rasio Tingkat Kemandirian. Rasio Tingkat Kemandirian Daerah menggambarkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Rasio Tingkat Kemandirian Daerah juga menjadi acuan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Tingkat Rasio Kemandirian Provinsi Lampung cukup fluktuatif dan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan, terakhir di tahun 2020 rasio Tingkat Kemandirian daerah Provinsi Lampung berada dikisaran 40,49%. Hal ini menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut masih rendah. Di sisi lain campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, dengan harapan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dianggap sedikit mampu untuk melaksanakan otonomi daerah.



Gambar IV-3 Rasio Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi Lampung

Memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan pendapatan daerah pada APBD T.A. 2022 Provinsi Lampung diarahkan untuk memelihara stabilitas fiskal daerah sekaligus mendukung proses pemulihan sosial ekonomi daerah, dan menghindari terjadinya distorsi ekonomi. Kebijakan Fiskal APBD 2022 utamanya diarahkan untuk menjaga dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah, penguatan reformasi struktural, akselerasi prioritas pembangunan daerah. Tahun 2022 menjadi momentum melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah. Rancanangan APBD 2022, difokuskan pada kelanjutan kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi yang ekspansif dan konsolidatif.

Ditinjau dari pendapatan daerah, reformasi di bidang perpajakan akan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi antara pendapatan perpajakan dan PNBPN. Sedangkan di bidang PNBPN, Pemerintah akan terus optimalkan aset daerah dan BUMD untuk bisa menghasilkan dividen maupun pendapatan sehingga pelayanan publik dapat meningkat.

Selanjutnya dari sisi belanja, reformasi dilakukan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Kebijakan Pemerintah pusat terkait Efisiensi Belanja masih



akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, belanja APBN diarahkan untuk membantu masyarakat serta pembangunan infrastruktur, bukan untuk pembangunan kantor dan kendaraan dinas pemerintah. Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian kita tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang hadir.

Selain belanja yang dilakukan Kementerian/Lembaga, belanja pemerintah daerah yang berasal dari TKDD juga ditingkatkan kualitasnya. DAU dan DBH digunakan untuk mendorong layanan publik. Dana transfer khusus (termasuk DAK fisik dan nonfisik) dialokasikan untuk membantu pelayanan dasar di masyarakat. Sedangkan dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.

Jika ditinjau dari realisasi pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah terdapat penurunan selama masa pandemi Covid 19. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV-2 . Laju Pendapatan Daerah berkontraksi -3,41 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada pendapatan transfer yang berkontraksi sebesar -6,29 persen. Pandemi covid 19 telah membawa dampak pada penurunan pendapatan transfer dikarenakan ada kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19. Kemudian, pos Pendapatan Asli Daerah juga terjadi penurunan pertumbuhan dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 sepanjang Tahun 2020. Resesi Ekonomi yang terjadi berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat serta ada kebijakan *social distancing* yang berdampak pada penurunan pembayaran pajak daerah yang menyumbang pendapatan tertinggi di pos Pendapatan Asli daerah. Sedangkan Pendapatan lain-lainnya juga mengalami kontraksi pertumbuhan, tetapi hanya -0,87 persen. Data Realisasi Pendapatan Daerah pada Kondisi Normal Sebelum Pandemi dan Setelah Pandemi Covid 19 Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel IV-1.



Tabel IV-1 Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Pandemi Covid 19 Provinsi Lampung

URAIAN	Masa Pandemi Covid		Kondisi Normal Sebelum Pandemi		Pertumbuhan %
	2020 (Rp)	Persentase Realisasi Terhadap Target	2019 (Rp)	Persentase Realisasi Terhadap Target	
PENDAPATAN	7.019.319.471.883,36	96,90%	7.266.993.438.827,88	98,58%	-3,41%
Pendapatan Asli Daerah	2.842.286.479.070,36	95,95%	3.018.067.291.159,88	101,03%	-5,82%
Pajak Daerah	2.386.345.268.304,00	97,25%	2.627.888.230.394,00	98,61%	-9,19%
Retribusi Daerah	17.080.208.104,00	149,42%	11.069.477.866,00	84,83%	54,30%
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	29.873.630.623,14	99,39%	27.837.905.348,92	87,47%	7,31%
Lain-lain PAD yang sah	408.987.372.039,22	87,56%	351.271.677.550,96	126,61%	16,43%
Pendapatan Transfer	2.461.886.209.957,00	58,32%	2.627.195.349.110,00	60,75%	-6,29%
Dana Perimbangan	2.461.886.209.957,00	58,32%	2.627.195.349.110,00	60,75%	-6,29%
Dana Bagi Hasil Pajak	123.204.760.040,00	75,58%	87.416.096.820,00	63,40%	40,94%
Bagi Hasil Bukan Pajak	34.589.203.086,00	79,73%	51.128.238.596,00	120,69%	-32,35%
DAU	1.732.551.921.000,00	99,58%	1.906.780.297.000,00	100%	-9,14%
DAK	2.241.636.524.692,00	98,53%	2.137.405.212.606,00	95,53%	4,88%
DAK Non Fisik	-	-	-	-	0,00%
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	0,00%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	55.380.974.858,00	92,56%	55.865.911.783,00	92,57%	-0,87%
Pendapatan Hibah	8.946.876.858,00	64,30%	11.362.590.000,00	83,93%	-21,26%
Dana Penyesuaian	46.434.098.000,00	100%	26.756.363.000,00	100%	73,54%
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	17.746.958.783,00	90,82%	Tanpa Target

Sumber : Data Diolah (Bappenda, 2021)



B. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan proyeksi target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung T.A. 2022 dirancang secara lebih terukur dengan memperhatikan :

1. Regulasi dan potensi penerimaan pajak daerah yang lebih realistis, berdasarkan data realisasi pendapatan daerah beberapa tahun terakhir, termasuk di dalamnya telah pula memperhitungkan kondisi (realisasi) hingga pertengahan tahun 2021 yang dalam kondisi masa pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid 19.
2. Mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi yang disusun oleh Pemerintah Daerah, antara lain : asumsi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta PDRB Perkapita masyarakat Provinsi Lampung.
3. Penetapan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (transfer pusat ke daerah) tahun 2022 mengacu pada peraturan presiden nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan rincian APBN Anggaran Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 dirancang pada pada Tabel IV-2.



PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022



Tabel IV-2 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH		TARGET 2021 (yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung)	TARGET PENDAPATAN DAERAH 2022	PERTUMBUHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 TERHADAP TARGET 2021
		2019	2020			
4	PENDAPATAN	7.266.993.438.827,88	7.019.319.471.883,36	7.538.150.772.809,50	6.558.085.742.933,00	-13,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.018.067.291.159,88	2.842.286.479.070,36	3.336.257.494.574,50	3.447.849.161.718,00	3,34%
4.1.1	Pajak Daerah	2.627.888.230.394,00	2.386.345.268.304,00	2.653.659.165.839,00	2.678.859.165.839,00	0,95%
4.1.2	Retribusi Daerah	11.069.477.866,00	17.080.208.104,00	13.597.476.628,00	8.424.510.038,00	-38,04%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	27.837.905.348,92	29.873.630.623,14	225.327.175.290,14	276.855.820.869,00	22,87%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	351.271.677.550,96	408.987.372.039,22	443.673.676.817,36	483.709.664.972,00	9,02%
4.2	Pendaparan Transfer	4.210.807.194.668,00	4.121.652.017.955,00	4.153.418.184.000,00	3.090.977.700.680,00	-25,58%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.210.807.194.668,00	4.121.652.017.955,00	4.145.956.082.000,00	3.062.179.175.100,00	-26,14%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	4.210.807.194.668,00	4.121.652.017.955,00	4.128.566.334.000,00	3.060.738.001.100,00	-25,86%
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	138.544.335.416,00	157.793.963.126,00	132.256.631.000,00	175.436.322.100,00	32,65%
4.2.1.1.3	DAU	1.906.780.297.000,00	1.732.551.921.000,00	1.726.296.248.000,00	1.726.296.248.000,00	0,00%
4.2.1.1.4	DAK	2.147.735.603.469,00	2.231.306.133.829,00	2.270.013.455.000,00	1.159.005.431.000,00	-48,94%



PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022



NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH		TARGET 2021 (yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung)	TARGET PENDAPATAN DAERAH 2022	PERTUMBUHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 TERHADAP TARGET 2021
		2019	2020			
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	17.389.748.000,00	1.441.174.000,00	-91,71%
4.2.2	Transfer antar Daerah			7.462.102.000,00	28.798.525.580,00	285,93%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	17.746.958.783,00		7.462.102.000,00	28.798.525.580,00	285,93%
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	38.118.953.000,00	55.380.974.858,00	48.475.094.235,00	19.258.880.535,00	-60,27%
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.362.590.000,00	8.946.876.858,00	48.475.094.235,00	19.258.880.535,00	-60,27%
1.3.2	Dana Penyesuaian	26.756.363.000,00	46.434.098.000,00	-	-	-

Sumber : Data Diolah (BAPPENDA Provinsi Lampung, 2021)



Hasil analisis Target Pendapatan Daerah Sementara pada Tahun 2022 diperoleh dengan merujuk pada hasil rapat koordinasi untuk penetapan Target Asumsi Makro, yang dihadiri oleh peserta rapat antara lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang Mewakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung, dan beberapa OPD terkait lainnya, maka Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 disepakati berdasarkan pada alokasi Target Pendapatan Daerah sebagai berikut.

Tabel IV-3 Target Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

No	URAIAN	REALISASI 2020 (Rp)	TARGET PENDAPATAN DAERAH SEMENTARA 2022 (Rp)	PERTUMBUHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 TERHADAP TARGET 2021
4	PENDAPATAN	7.538.150.772.809,50	6.558.085.742.933,00	-13,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.336.257.494.574,50	3.447.849.161.718,00	3,34%
4.1.1	Pajak Daerah	2.653.659.165.839,00	2.678.859.165.839,00	0,95%
4.1.2	Retribusi Daerah	13.597.476.628,00	8.424.510.038,00	-38,04%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	225.327.175.290,14	276.855.820.869,00	22,87%
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	443.673.676.817,36	483.709.664.972,00	9,02%
4.2	Pendapatan Transfer	4.153.418.184.000,00	3.090.977.700.680,00	-25,58%
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.145.956.082.000,00	3.062.179.175.100,00	-26,14%
4.2.1.1	Dana Perimbangan	4.128.566.334.000,00	3.060.738.001.100,00	-25,86%
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	132.256.631.000,00	175.436.322.100,00	32,65%
4.2.1.1.3	DAU	1.726.296.248.000,00	1.726.296.248.000,00	0,00%
4.2.1.1.4	DAK	2.270.013.455.000,00	1.159.005.431.000,00	-48,94%
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	17.389.748.000,00	1.441.174.000,00	-91,71%
4.2.2	Transfer antar Daerah	7.462.102.000,00	28.798.525.580,00	285,93%
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.462.102.000,00	28.798.525.580,00	285,93%
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	48.475.094.235,00	19.258.880.535,00	-60,27%
1.3.1	Pendapatan Hibah	48.475.094.235,00	19.258.880.535,00	-60,27%
1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, 2021)



Pemilihan proyeksi Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2022 yang mendasarkan pada rapat koordinasi pembahasan target pendapatan daerah Bersama instansi terkait diprediksikan akan mengalami penurunan pendapatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada pendapatan transfer yang mengalami penurunan -25,58 % dari Target Tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan karena akibat penurunan Dana Alokasi Khusus yang turun sebesar -48,94%. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung optimis dapat mencapai target Pendapatan Daerah tersebut. Pertimbangan Target terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:.

1. Kebijakan *Recovery* anggaran belanja nasional masih menjadi agenda Pemerintah Pusat, sehingga program lebih diarahkan pada pemulihan pasca pandemic Covid 19 dan refocusing anggaran pembangunan nasional yang berdampak pada penurunan Dana Alokasi Khusus sehingga pendapatan transfer mengalami kontraksi pertumbuhan.
2. Resiko pandemi Covid 19 gelombang ke dua dan lanjutan membuat kemungkinan masih terjadi, sehingga Anggaran Tahun 2022 difokuskan pada penanganan dampak Pandemi Covid 19, berdasarkan Kebijakan dari pemerintah pusat.
3. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan meningkat di tahun 2022 dengan target peningkatan pada Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah
4. Ada Kebijakan Program Pemutihan Pembayaran Pajak Kendaraan di Tahun 2021 yang diharapkan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2022, dengan asumsi terdapat peningkatan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak di tahun berikutnya, seiring dengan peningkatan kepemilikan jumlah kendaraan oleh masyarakat.
5. Ada perubahan pos pendapatan yang semula dari retribusi menjadi BLUD (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)
6. Ada koreksi Bagi Hasil dari Bank Lampung (dividen)



7. Prediksi ada pemulihan pasca covid 19 (dengan program vaksinasi efektif), sehingga terjadi penurunan pendapatan pada RSUD Abdul Muluk (BLUD)
8. Ada perubahan nomenklatur dalam PP 12 Tahun 2019 dan PMDN No 90 Tahun 2019 terkait dengan uraian anggaran pendapatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian beberapa pos pendapatan di Tahun 2022



BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas, dengan program prioritas pembangunan meliputi peningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, kehidupan masyarakat yang religius aman dan berbudaya, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Data Bappeda Provinsi Lampung menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,76% berada di bawah regional Sumatera -1,19%, tetapi masih berada di atas nasional -2,07%, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada pada urutan ke 8 se-Sumatera.

Dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung sepanjang Tahun 2020 mengalami kontraksi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat sebagai upaya pengendalian Covid-19.

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2020 adalah sebesar 69,69 meningkat 0,12 poin dibanding pada Tahun 2019 sebesar 69,57, dan termasuk dalam kategori sedang. Dalam hal ini, rata-rata pertumbuhan IPM dari tahun 2010-2020 adalah sebesar 0,9%, dan rata-rata lama sekolah merupakan Indeks komposit tertinggi pembentuk IPM dengan pertumbuhan Tahun 2020 sebesar 1,64%.



Pandemi Covid-19 memiliki dampak sangat berpengaruh dalam berbagai aspek selama ini. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satgas Penanganan Covid 19 (STPC-19) telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan Covid-19 selama ini. Kebijakan penanganan Pandemi Covid 19 diharapkan tepat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan akan meningkat kembali.

Berbagai sasaran dan usulan program pembangunan pada Tahun 2022 dan beberapa tahun mendatang dapat berjalan dengan tepat sasaran, yakni program prioritas jalan dan jembatan, berupa ruas jalan Bandar Lampung – sp. Teluk Kiluan, dan jembatan tiang pancang dari Panjang – Padang Cermin, pembangunan Shortcut Tegineneng – Tarahan, Sport Center dan Exhibition Center di kawasan Kota Baru, usulan Konsep Aerocity Bandara Raden Inten II, pengembangan Food Estate di Provinsi Lampung, pembangunan kereta api cepat, pembangunan kawasan terintegrasi pariwisata Bakauheni, kartu petani berjaya, smart village.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung dan mengedepankan penanganan pandemi Covid 19, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan dan penanganan covid di Tahun 2022, meliputi peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, percepatan perubahan perilaku, serta penetapan program vaksinasi nasional. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan dan surat edaran gubernur yang menegaskan Kewajiban menjalankan protokol kesehatan yang ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanggulangan Covid 19 (STPC-19) menerapkan empat strategi intervensi untuk membangun kesadaran dari dalam diri, yakni nasihat, dorongan, insentif, dan hukuman atas



pelanggaran Protokol Kesehatan Covid19. Intervensi tersebut diarahkan kepada individu, keluarga, komunitas, institusi, dan wilayah/masyarakat.

Nasihat diberikan dalam bentuk informasi yang masih dan benar agar masyarakat memahami pentingnya perilaku 3M. Dorongan dilakukan dengan mengingatkan secara berulang-ulang, mendorong tersedianya fasilitas agar masyarakat mudah menjalankan protokol kesehatan 3M, dan mengembangkan inovasi dan kreativitas daerah untuk menyukseskan program tersebut. Insentif diberikan dengan memberikan penghargaan atas perubahan yang terjadi. Sedangkan, hukuman diberikan dengan sanksi bagi mereka yang belum atau tidak patuh.

Lebih lanjut, kebijakan Belanja Darah pada Tahun 2022 dikelompokkan ke dalam 4 komponen yang terbagi kedalam sub-sub komponen anggaran belanja lainnya. komponen itu adalah Komponen Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, subsidi, hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten//Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Sedangkan untuk Komponen lainnya yaitu Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten//Kota dan Pemerintah Desa. Komponen Belanja Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel V-1.

Selisih dari total perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan, merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pelaksanaan program pembangunan pada setiap perangkat daerah (PD) yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah terutama dalam penyelenggaraan urusan wajib untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal, dan searah dengan prioritas pembangunan dan agenda kerja daerah, serta mendukung prioritas dan program strategis nasional. Sehubungan dengan hal



tersebut, penggunaan APBD dilakukan secara efisien, serta akan berfokus pada kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan mendorong kemajuan ekonomi daerah.

Dengan demikian, Target Plafon Anggaran Belanja dapat disusun sebagai berikut, yang dapat dilihat pada Tabel V-1.



TABEL V-1
Rekapan Plafon Belanja Sementara untuk Tahun Anggaran 2022.

Kode	Uraian	Target Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020	BELANJA DAERAH		Bertambah / (Berkurang) Dari TAHUN 2021	
			TARGET BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung)	TARGET BELANJA DAERAH TAHUN 2022	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA					
5.1.	BELANJA OPERASI	5.074.898.890.077,30	5.350.452.128.648,64	4.179.969.568.216,18	(1.170.482.560.432,46)	-21,88%
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.005.574.674.424,10	2.001.073.318.353,85	2.003.181.082.229,69	2.107.763.875,84	0,11%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.574.987.425.053,20	1.593.339.996.813,50	1.641.319.600.959,29	47.979.604.145,79	3,01%
5.1.03.	Belanja Bunga	33.000.000.000,00	22.500.000.000,00	25.490.000.000,00	2.990.000.000,00	13,29%
5.1.04.	Belanja Subsidi		0	0	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	1.460.836.790.600,00	1.728.397.986.481,29	500.615.433.027,20	(1.227.782.553.454,09)	-71,04%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	5.140.827.000,00	9.363.452.000,00	4.222.625.000,00	82,14%
5.2.	BELANJA MODAL	831.621.189.859,10	926.084.307.212,60	1.492.878.044.644,80	566.793.737.432,20	61,20%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	160.879.583.508,45	30.000.000.000,00	31.500.000.000,00	1.500.000.000,00	5,00%
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.286.836.044.218,60	1.250.961.416.087,30	1.307.351.413.072,02	56.389.996.984,72	4,51%



PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) DAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2022



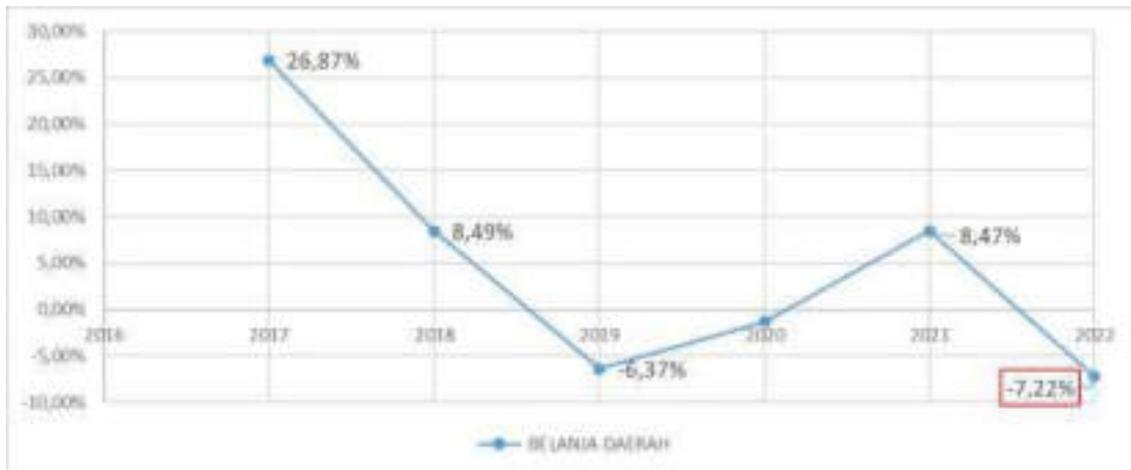
Kode	Uraian	Target Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020	BELANJA DAERAH		Bertambah / (Berkurang) Dari TAHUN 2021	
			TARGET BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung)	TARGET BELANJA DAERAH TAHUN 2022	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.286.836.044.218,60	1.250.961.416.087,30	1.307.351.413.072,02	56.389.996.984,72	4,51%
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	-	-
	JUMLAH BELANJA	7.354.235.707.663,45	7.557.497.851.948,54	7.011.699.025.933,00	(545.798.826.015,54)	-7,22%

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, 2021)

Catatan :

* Struktur belanja Tahun 2021 dan 2022 sudah mengalami perubahan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019

Tabel V-1 di atas menunjukkan pertumbuhan Target komponen belanja daerah tahun 2022 terhadap penyesuaian target tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -7,22%. Kontraksi Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh Penurunan anggaran komponen belanja operasional sebesar -21,88%. Dari penurunan anggaran Komponen Belanja Operasional tersebut, komponen belanja yang mengalami penurunan terbesar ada pada komponen belanja hibah sebesar -71,04 %. kemudian belanja modal menalami peningkatan 61,20% dan Belanja tidak terduga juga meningkat 5,00%. Selanjutnya Belanja Tranfer kepada Kabupaten/kota dan pemerintah desa meningkat 4,51%, jika dibandingkan dengan komponen belanja yang sama tahun 2021. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komponen belanja daerah dialokasikan secara efektif dan efisien karena nilai komponen belanja daerah tersebut dialokasikan fokus untuk belanja modal yang diharapkan digunakan untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat.



**Gambar V-1 Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2017-Tahun 2022
(Prediksi)**

Dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah, dari tahun 2017 hingga tahun 2018 realisasi belanja daerah selalu tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan belanja daerah di tahun 2017 sebesar 21,87% dan di tahun 2018 mencapai 8,49%. Namun demikian pada tahun 2019 terjadi kontraksi pertumbuhan belanja sebesar -6,37%, dan tahun 2020 kembali mengalami kontraksi di angka -1,29 %. Adanya *refocusing* anggaran dan terjadinya pandemi Covid 19 membuat anggaran belanja daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian dengan merujuk dari tingkatan target pendapatan daerah yang meningkat pada tahun 2021 maka adanya peningkatan pendapatan daerah menyebabkan peningkatan belanja Daerah di tahun 2021 yang diprediksi mencapai 8,47% atau sekitar Rp 7.557.497.851.948,54 selama tahun 2021. Namun demikian, akibat adanya keterbatasan pendapatan dana alokasi umum dan alokasi khusus yang mengalami penurunan di tahun 2022, maka anggaran belanja daerah di Tahun 2022 mengalami Kontraksi pertumbuhan belanja daerah mencapai -7,22% atau sekitar Rp 7.011.699.025.933,00 di tahun 2022 yang di fokuskan pada peningkatan infrastruktur daerah. Dengan kondisi prediksi dan kemampuan pendapatan daerah saat ini, kemungkinan sulit untuk mampu membiayai anggaran tersebut



dengan Pendapatan yang ada. Sehingga opsi pilihan untuk memenuhi anggaran belanja daerah tersebut melalui pos pembiayaan daerah. Adapun pos pembiayaan daerah yang dimaksud adalah pinjaman daerah dengan total pinjaman mencapai Rp. 569.000.000.000,00. Pinjaman Daerah ini diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara, dengan kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Kementerian Keuangan) yang merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur, yang didirikan untuk menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk mendukung skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

B. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

1. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai, disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU tahun anggaran 2022 serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan (KUA Provinsi Lampung, 2021).

Belanja Barang dan Jasa ditinjau dari pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006.

Belanja Bunga, dianggarkan sesuai kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Anggaran 2022.

Belanja Subsidi, diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas, serta ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Belanja Bantuan Sosial, dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Selain itu, mulai tahun anggaran 2022 ada bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, komponen belanja bantuan sosial pada tahun 2022 belum tercatat dan teralokasi dalam



komponen belanja barang dan jasa. Rincian Alokasi Anggaran Belanja Operasi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel V-2.

Tabel V-2
Alokasi Penganggaran Belanja Operasi Tahun 2022

Uraian Berdasarkan PP 12 TAHUN 2019	ANGGARAN BELANJA		Pertumbuhan Target Belanja 2022 Terhadap Penyesuaian Target Belanja Tahun 2021 (Rp)
	Penyesuaian Target Belanja Tahun 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	
BELANJA OPERASI	5.350.452.128.648,64	4.179.969.568.216,18	-21,88%
1 Belanja Pegawai	2.001.073.318.353,85	2.003.181.082.229,69	0,11%
2 Belanja Barang dan Jasa	1.593.339.996.813,50	1.641.319.600.959,29	3,01%
3 Belanja Bunga	22.500.000.000,00	25.490.000.000,00	13,29%
4 Belanja Subsidi	-	-	-
5 Belanja Hibah	1.728.397.986.481,29	500.615.433.027,20	-71,04%
6 Belanja Bantuan Sosial	5.140.827.000,00	9.363.452.000,00	82,14%
RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI			5,50%

Sumber : Data diolah, dari BPKAD Provinsi Lampung (Maret 2021)

Tabel V-2 di atas menunjukkan bahwa target komponen belanja operasi tumbuh rata-rata sebesar 5,50% pada tahun 2022 terhadap penyesuaian target komponen belanja operasi tahun 2021 didorong oleh pertumbuhan Belanja Bantuan Sosial sebesar 82,14% dan pertumbuhan belanja bunga sebesar 13,29% serta belanja barang dan jasa sebesar 3,01%. Namun demikian, secara umum Belanja Operasional mengalami kontraksi pertumbuhan pada nilai belanja operasi secara umum sebesar -21,88%. Hal ini dipengaruhi oleh belanja hibah yang mengalami kontraksi pertumbuhan pada komponen belanja hibah sebesar -71,04%.



2. KEBIJAKAN BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, DAN BELANJA TRANSFER

Untuk kebijakan belanja daerah lain selain belanja operasional adalah Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja Transfer dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, yang secara rinci alokasi anggarannya dapat dilihat pada Tabel V-3.

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Sementara itu untuk Belanja Tidak Terduga mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta untuk pengembalian pendapatan yang telah ditutup.

Sedangkan untuk Belanja transfer yang merupakan belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa memperhitungkan rencana pendapatan pada tahun anggaran 2021. Jika target anggaran Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022 belum terealisasi, dan alokasi hak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten juga belum terealisasi, maka sisa anggaran tersebut ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.



Tabel V-3
Alokasi Penganggaran Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Dan Belanja
Transfer Tahun 2022

Uraian Berdasarkan PP 12 TAHUN 2019	ANGGARAN BELANJA		Pertumbuhan Target Belanja 2022 Terhadap Penyesuaian Target Belanja Tahun 2021 (Rp)
	Penyesuaian Target Belanja Tahun 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	
BELANJA MODAL	926.084.307.212,60	1.492.878.044.644,80	61,20%
BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	31.500.000.000,00	5,00%
BELANJA TRANSFER	1.250.961.416.087,30	1.307.351.413.072,02	4,51%
1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten//Kota dan Pemerintah Desa	1.250.961.416.087,30	1.307.351.413.072,02	4,51%
RATA-RATA PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI			23,57%

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, 2021)

Tabel V-3 di atas menunjukkan bahwa target komponen Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer tumbuh rata-rata sebesar 23,57% pada tahun 2022 terhadap penyesuaian target komponen belanja tersebut di tahun 2021. Pos belanja tertinggi pada tahun 2022 berada pada komponen Belanja Modal sebesar Rp 1.492.878.044.644,80. Sementara itu alokasi pos belanja terendah adalah belanja tidak terduga sebesar Rp 31.500.000.000,00. Sementara itu Belanja Transfer mengalami pertumbuhan 4,51%. Tingginya belanja modal dikarenakan adanya target peningkatan infrastruktur daerah di tahun 2022 sehingga kebutuhan akan belanja modal di tahun 2022 meningkat.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. UMUM

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

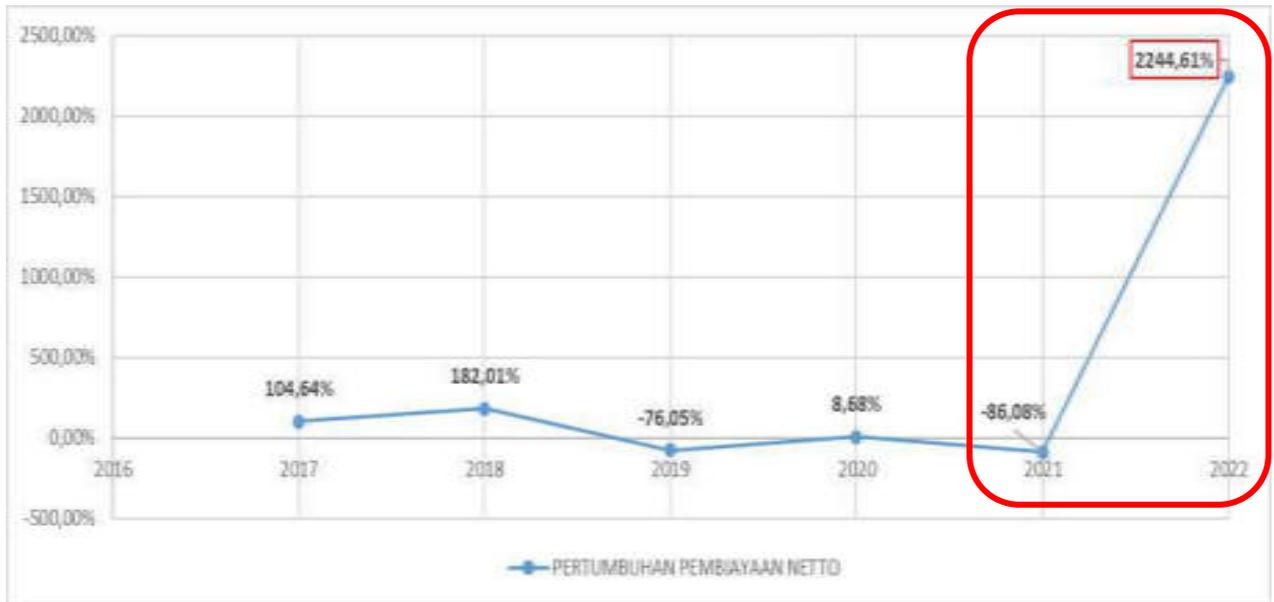
Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 direncanakan berasal dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih berniali ekonomis. Sementara Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk menambah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD Pemerintah Provinsi Lampung serta pembayaran pokok hutang atas pinjaman daerah yang telah direalisasikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Tabel VI-1 Rincian Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022

URAIAN	REALISASI		PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2021 (Rp)	TARGET 2022 (Rp)	Pertumbuhan Target Belanja 2022 Terhadap Penyesuaian Target Belanja Tahun 2021 (Rp)
	2019 (Rp)	2020 (Rp)			
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	213.991.004.690,84	336.132.388.142,31	190.917.079.139,04	644.793.283.000,00	237,73%
1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	93.875.534.190,84	336.132.388.142,31	190.917.079.139,04	75.793.283.000,00	-60,30%
2 Penerimaan Pinjaman Daerah	120.115.470.500,00	-	-	569.000.000.000,00	-
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.138.166.352,00	197.176.332.704,00	171.570.000.000,00	191.180.000.000,00	11,43%
1 Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	15.550.000.000,00	56.000.000.000,00	30.390.000.000,00	50.000.000.000,00	64,53%
2 Pembayaran Pokok Utang	70.588.166.352,00	141.176.332.704,00	141.180.000.000,00	141.180.000.000,00	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	127.852.838.338,84	138.956.055.438,31	19.347.079.139,04	453.613.283.000,00	2244,61%

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, 2021)



Gambar VI-1

Laju Pertumbuhan dan prediksi pertumbuhan Pembiayaan Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2017-2022

Laju Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Di Provinsi Lampung ditinjau dari laju pertumbuhan Pembiayaan Daerah nya setiap tahunnya sangat berfluktuatif. Hal ini berkaitan erat dengan dengan acuan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Terjadi Peningkatan pada tahun 2017 dari Tahun 2016 karena faktor sisa Lebih Perhitungan Anggaran dengan Tingkatan pertumbuhan di tahun 2017 mencapai 104,64% dari tahun sebelumnya. Kemudian di tahun 2018 dengan adanya pinjaman daerah sebesar Terdapat nya pinjaman di tahun 2018 membuat Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Meningkat menjadi 182,01%. Pertumbuhan Pembiayaan Daerah mengalami kontraksi di Tahun 2019 karena penurunan belanja daerah dan pembayaran pokok hutang -76,05% karena adanya pembayaran hutang dan penyertaan Investasi daerah. Pembiayaan Daerah mengalami pertumbuhan di tahun 2020 mencapai 8,68% karena faktor tingginya penerimaan pembiayaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, meskipun sudah dikurangi



dengan pembayaran pokok hutang. Dengan merujuk pada kondisi keuangan yang ada pada saat ini, prediksi pertumbuhan pembiayaan daerah pada tahun 2021 masih berkontraksi -86,08%. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *Balancing* Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Kemudian dengan adanya rencana pinjaman daerah dengan total pinjaman mencapai Rp 569.000.000.000,00,- dengan skema pembayaran berjangka. Pinjaman Daerah ini diperoleh dari PT Sarana Multi Infrastruktur, yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah di Tahun 2022, maka terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 2244,61% dengan total pembiayaan neto sebesar Rp 453.613.283.000,00 jika dibandingkan penyesuaian target pembiayaan daerah di Tahun 2021.

B. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah Di Provinsi Lampung terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan di pengaruhi oleh Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang. Adapun rincian prediksi Alokasi Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel VI-2 berikut.

Tabel VI-2
Total Alokasi Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2022

No	URAIAN	Penyesuaian Target Alokasi Anggaran 2021 (Rp)	Prediksi Alokasi Anggaran 2022 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	190.917.079.139,04	644.793.283.000,00	237,73%
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	190.917.079.139,04	75.793.283.000,00	-60,30%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	569.000.000.000,00	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	171.570.000.000,00	191.180.000.000,00	11,43
1	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	30.390.000.000,00	50.000.000.000,00	64,53
2	Pembayaran Pokok Utang	141.180.000.000,00	141.180.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(112.573.772.727,00)	453.613.283.000,00	502,95%
RATA-RATA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN				

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, 2021)



Tabel VI-2 tersebut menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan pertumbuhan Pembiayaan Netto Daerah mencapai 502,95% atau sebesar Rp 453.613.283.000,00. Nilai tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun rincian kebijakannya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah di Tahun 2022 dipengaruhi oleh Penganggaran sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, serta penerimaan pinjaman daerah. Adapun rincian alokasi penerimaan pembiayaan daerah provinsi lampung tahun 2022 dapat dilihat pada tabel VI-3.

Tabel VI-3
Total Alokasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2022

No	URAIAN	PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2021 (Rp)	Prediksi Alokasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	190.917.079.139,04	644.793.283.000,00	237,73%
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	190.917.079.139,04	75.793.283.000,00	-60,30%
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	569.000.000.000,00	-

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, Maret 2021)

Tabel VI-3 di atas menunjukkan bahwa target Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 terhadap penyesuaian target Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2021 tumbuh sebesar 237,73%. Pos penerimaan pembiayaan daerah tertinggi pada tahun 2022 berada pada komponen komponen penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp569.000.000.000,00. Sementara itu, alokasi Sisa Lebih Perhitungan



Anggaran Tahun sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -60,30%. Jika ditinjau secara keseluruhan maka alokasi penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan dalam rangka menyeimbangkan anggaran belanja dan pendapatan Tahun 2022 agar kegiatan APBD Provinsi Lampung berjalan efektif.

b. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penambahan Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan BUMD sehingga dapat lebih berkompetisi dan memperluas skala ekonomi unit usaha. Penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Pokok Hutang adalah kewajiban yang harus dibayarkan pemerintah daerah kepada pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dimana pinjaman tersebut telah direalisasikan pada tahun 2018. Untuk itu pembayaran pokok hutang perlu mentaati jadwal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Ketentuan terkait dengan pembayaran pokok hutang sebagaimana dimaksud, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel VI-4
Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2022

No	URAIAN	PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2021	Prediksi Alokasi Anggaran Tahun 2022	Pertumbuhan (%)
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	171.570.000.000,00	191.180.000.000,00	11,43%
1	Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah	30.390.000.000,00	50.000.000.000,00	64,53%
2	Pembayaran Pokok Utang	141.180.000.000,00	141.180.000.000,00	0,00%
RATA-RATA PENGELUARAN PEMBIAYAAN				25,32%

Sumber : Data Diolah (BPKAD Provinsi Lampung, Maret 2021)



Tabel VI-4 di atas menunjukkan bahwa target Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2022 terhadap penyesuaian target Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2021 tumbuh rata-rata sebesar 25,32%. Pos pengeluaran pembiayaan daerah tertinggi pada tahun 2022 berada pada komponen pembayaran pokok utang daerah dengan nilai yang tidak mengalami perubahan pada tahun sebelumnya sebesar Rp141.180.000.000,00. Sementara itu komponen pembiayaan Penyertaan Investasi Pemerintah Daerah tumbuh sebesar 64,53% dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000,00. Secara Umum Pengeluaran pembiayaan tumbuh sebesar 11,43%.



BAB VII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Target asumsi makro ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan target asumsi makro ekonomi pada tahun 2021. Pertumbuhan target asumsi makro ekonomi pada tahun 2022, khususnya pada pertumbuhan PDRB Perkapita dan Pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan yang positif. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebagai dampak penurunan tingkat penularan Pandemi Covid-19 dan penurunan secara bertahap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung sejak tahun 2021, dan diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun 2022 jika pemanfaatan vaksin di tahun 2021 tidak berjalan dengan efektif.

Pertumbuhan pendapatan daerah secara umum menunjukkan peningkatan seiring dengan peningkatan PAD tahun 2021, dan pembiayaan dari Pinjaman Daerah yang direncanakan akan dialokasikan terbesar pada belanja infrastruktur.